

Laporan Akutabilitas Kinerja

Direktorat Diseminasi Statistik

2021



Laporan Akutabilitas Kinerja

Direktorat Diseminasi Statistik

2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021

ISBN: -

No. Publikasi: 03200.2202

Katalog: 1202062

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+138 halaman

Naskah:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penyunting:

Direktorat Diseminasi Statistik

Desain Kover:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

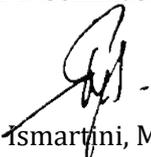
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik ini dibuat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan keseluruhan prinsip *Clean Government dan Good Governance*.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pencapaian visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Direktorat Diseminasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Diseminasi Statistik yakni melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

Laporan ini dapat pula digunakan sebagai masukan pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2021. Selain itu, laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Diseminasi Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan hingga penerbitan laporan ini, disampaikan terima kasih. Kami sangat menghargai atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan laporan ini di masa mendatang

Jakarta, 26 Januari 2022
Direktur Diseminasi Statistik



Dr. Pudji-ismartini, M.App.Stat.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan Eksekutif.....	xi
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	4
1.5 Potensi dan Permasalahan	5
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2021	7
2. Perencanaan Kinerja	9
2.1 Rencana Strategis 2020–2024.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
3. Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021	15
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020	20
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2024	22
3.4 Prestasi.....	25
3.5 Kegiatan Prioritas Tahun 2021	28
3.6 Upaya Efisiensi.....	28
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021	30
4. Penutup.....	31
4.1 Tinjauan Umum	33
4.2 Tindak Lanjut.....	33
Lampiran	35



Daftar Tabel

Tabel 1	Reviu Rencana Strategis (Renstra) DDS 2020–2024	11
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021	12
Tabel 3	Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021	16
Tabel 4	Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik , 2020 dan 2021	21
Tabel 5	Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 Terhadap Target Rencana Strategis 2024	23
Tabel 6	Jumlah Anggaran menurut Kegiatan di Direktorat Diseminasi Statistik, 2021.....	29
Tabel 7	Realisasi Anggaran Menurut Sumber Anggaran di Direktorat Diseminasi Statistik, 2021	30



Daftar Gambar

Gambar 1	Komposisi SDM Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Tingkat Pendidikan, 2021	5
Gambar 2	Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 terhadap Realisasi Kinerja Akhir Rencana Strategis, 2019 dan 2020	21



Daftar Lampiran

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik.....	37
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Fungsi Rujukan Statistik.....	39
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik.....	41
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja Fungsi Layanan dan Promosi Statistik.....	43
Lampiran 5	Perjanjian Kinerja Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.....	45
Lampiran 6	Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik.....	47
Lampiran 7	Laporan Kegiatan Fungsi Rujukan Statistik.....	48
Lampiran 8	Laporan Kegiatan Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik	69
Lampiran 9	Laporan Kegiatan Fungsi Layanan dan Promosi Statistik	87
Lampiran 10	Laporan Kegiatan Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	128
Lampiran 11	Jadwal Kegiatan	133

Ringkasan Eksekutif

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

Visi Direktorat Diseminasi Statistik adalah “Penyelenggara layanan statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju” untuk mendukung visi Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik yaitu “Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas dituangkan dalam tujuan Direktorat Diseminasi Statistik, yaitu Meningkatkan Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan tugas di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar 8,008 milyar, yang terdiri dari 0,419 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan 7,589 milyar bersumber dari PNBPN. Adapun realisasi yang bersumber dari RM adalah sebesar 90,28 persen dan yang bersumber dari PNBPN sebesar 70,87. Pelaksanaan program Direktorat Diseminasi Statistik tersebut terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

1. Sistem yang baru dalam penghimpunan dan pemeriksaan metadata masih belum familiar digunakan serta masih menyisakan beberapa kekurangan fitur yang diperlukan.
2. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih rendah.
3. Belum berakhirnya pandemi COVID-19, serta terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Masih perlu ditingkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (*subject matter*) dengan K/L/OPD dalam percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).

5. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota.
6. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, template presentasi, template website, aset 3D, template video, audio, dan lainnya) serta *software* yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.
7. PC/laptop untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai.
8. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menulis naskah Berita Resmi Statistik atau publikasi dalam bahasa Inggris, baik lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik maupun di lingkungan BPS (*subject matter* penanggung jawab publikasi).
9. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur penunjang proses pemenuhan layanan data, informasi statistik serta proses penyiapan promosi digital dan proses pengembangan sistem dan basis data sehingga menjadi kendala performa website.
10. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam desain grafis/videografis serta teknik *marketing* sektor *public*.
11. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat *offline*.
13. Terbatasnya jumlah SDM Promosi Statistik sehingga percepatan pembentukan Pojok Statistik menjadi kurang efektif;
14. Pengembangan SDM di bidang IT dan pengembangan website terhalang pandemi sehingga tidak dapat melakukan pelatihan teknis.
15. Kurang maksimalnya interoperabilitas data dari sisi kuantitas dan kualitas metadata indikator dan variabel untuk mendukung diseminasi data statistik di *website*.
16. Masih kurangnya pemahaman pengguna data terkait mekanisme pengajuan permohonan data melalui aplikasi Silastik.
17. Kurang optimalnya kolaborasi dan kerjasama dengan *subject matter* teknis di BPS terkait pemenuhan permohonan data dari pengguna data.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Pengembangan sistem yang memudahkan pengguna dalam menyampaikan, serta memperkaya fitur-fitur untuk membantu verifikator dalam proses verifikasi metadata.
2. Melakukan sosialisasi rekomendasi dan metadata kepada *Subject Matter* dan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
3. Kolaborasi dengan pusdiklat yang memiliki sistem/aplikasi dan alokasi anggaran untuk proses pembinaan, juga memaksimalkan sarana pertemuan secara daring dalam proses pembinaan statistik sektoral.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang lebih menarik.
5. Melakukan pengadaan akun berlangganan desain grafis, yaitu akses satu tahun berupa elemen *graphics, fonts, templates* dan *stock video, music tracks* dan *sound effects*, dan elemen lainnya dari Freepik dan Envato Elements; serta akses 1 bulan untuk 350 gambar dari Shutterstock.
6. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menyusun Berita Resmi Statistik berbahasa Inggris dengan *virtual meeting*.

7. Melakukan optimalisasi strategi promosi digital sebagai solusi promosi statistik di masa pembatasan aktivitas sosial.
8. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang marketing melalui kegiatan kursus/pelatihan.
9. Menyusun naskah kebijakan diseminasi yang komprehensif dan sesuai dengan isu terkini.
10. Merancang kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten promosi digital.
11. Melakukan sosialisasi mekanisme permohonan data, khususnya layanan nol rupiah kepada Subjek Matter dan Kementerian/Lembaga.
12. Melakukan koordinasi dengan fungsi Jaringan Komunikasi Data dan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik, menyimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target tahun 2021 adalah 115,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang dilakukan telah melampaui target pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian ini terlihat juga dari Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra Tahun 2021 yang mencapai 111,49 persen dari target yang telah ditetapkan.



1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun untuk memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja di Direktorat Diseminasi Statistik sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021 tertuang hasil capaian kinerja selama setahun. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2021 juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Diseminasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2021 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat Diseminasi Statistik di tahun yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap K/L diwajibkan melaporkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Diseminasi Statistik kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2021.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Diseminasi Statistik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Tugas

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

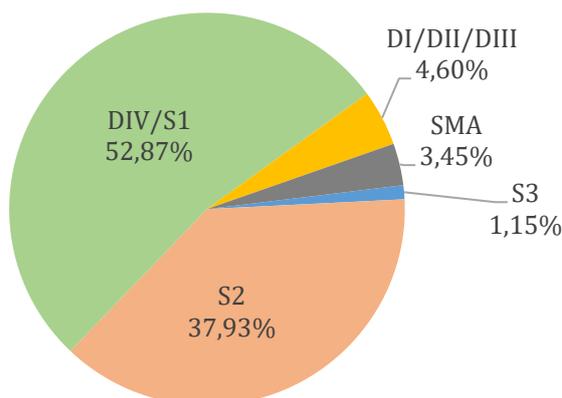
- a. Pelaksanaan pengelolaan rujukan statistik;
- b. Pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan layanan dan promosi statistik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat Diseminasi Statistik terdiri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2021 adalah 93 orang. Namun, ada beberapa yang sedang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebanyak 6 orang, sehingga pada pada akhir tahun 2021 jumlahnya 87 orang. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Adapun komposisi SDM didominasi pada tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 52,87 persen (46 orang), dan S2 sebanyak 37,93 persen (33 orang). Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Direktorat Diseminasi Statistik baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Komposisi SDM Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Tingkat Pendidikan, 2021

1.5 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Diseminasi Statistik dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial.
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Diseminasi Statistik memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPS, Direktorat Diseminasi Statistik memiliki potensi untuk mencapai sasaran tersebut melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatkan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektorial dan Khusus
2. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Peningkatkan Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik
4. Peningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik
5. Pewujudkan Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik yang Prima

Dalam pelaksanaan program Direktorat Diseminasi Statistik terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

1. Sistem yang baru dalam penghimpunan dan pemeriksaan metadata masih belum familiar digunakan serta masih menyisakan beberapa kekurangan fitur yang diperlukan.
2. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih rendah.
3. Belum berakhirnya pandemi COVID-19 serta terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektorial memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Masih perlu ditingkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (*subject matter*) dengan K/L/OPD dalam percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).
5. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota.
6. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, *template* presentasi, *template website*, aset 3D, *template video*, audio, dan lainnya) serta *software* yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.
7. PC/laptop untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai.
8. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menulis naskah Berita Resmi Statistik atau publikasi dalam bahasa Inggris, baik lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik maupun di lingkungan BPS (*subject matter* penanggung jawab publikasi).

9. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki keterampilan dalam desain grafis maupun videografis;
10. Terbatasnya pemahaman baik secara teori maupun praktisi dalam teknik marketing sektor publik;
11. Sangat minimnya jumlah SDM Promosi Statistik dibandingkan beban pekerjaan promosi digital yang tinggi dan menuntut untuk tayang dalam waktu yang cepat, sehingga beberapa target promosi digital kurang dicapai secara optimal;
12. Kurangnya dukungan anggaran RM untuk kegiatan Promosi Statistik di BPS, sehingga penyelenggaraan pengembangan SDM, penyediaan media promosi dan kebutuhan terkait promosi hanya dapat diselenggarakan mulai Triwulan 3 karena menunggu anggaran PNBPN terkumpul;
13. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
14. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat *offline*;
15. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten promosi digital;
16. Terbatasnya jumlah SDM Promosi Statistik sehingga percepatan pembentukan Pojok Statistik menjadi kurang efektif;
17. Kurangnya dukungan anggaran dalam Rumah Murni (RM) dalam pembentukan dan penyelenggaraan Pojok Statistik, sehingga anggaran dekorasi Pojok Statistik seluruhnya dibebankan pada anggaran PNBPN Direktorat Diseminasi Statistik. Hal ini berdampak pada proses pembentukan yang hanya dapat direalisasikan di triwulan 3 dan 4 karena menunggu anggaran PNBPN terkumpul;
18. Jaringan VPN yang tidak stabil menghambat proses pengembangan sistem dan basis data.
19. Storage infrastruktur yang terbatas dan infrastruktur *server* yang di beberapa *website* kabupaten kota menjadi kendala performa *website*.
20. Pengembangan SDM di bidang IT dan pengembangan website terhalang pandemi sehingga tidak dapat melakukan pelatihan teknis.
21. Kurang maksimalnya interoperabilitas data dari sisi kuantitas dan kualitas metadata indikator dan variabel utk mendukung diseminasi data statistik di website.
22. Terjadinya serangan *ransomware* menghambat proses kinerja dimana file tidak bisa *direstore*.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2021

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya

manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Diseminasi Statistik; serta sistematika penyajian laporan.

- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2021; perkembangan capaian kinerja tahun 2021 terhadap realisasi kinerja tahun 2020; capaian kinerja tahun 2021 terhadap target renstra 2019 dan 2020; prestasi; kegiatan prioritas; upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 2021.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2020–2024

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat Diseminasi Statistik mengacu pada Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020–2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005–2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020–2024.

Renstra yang sudah disusun pada tahun 2020, kemudian di reviu pada tahun 2021 dan dipilih lima indikator kinerja utama (IKU) saja yang paling berpengaruh (tajam) terhadap kinerja unit kerja Direktorat Diseminasi Statistik, yang mendukung IKU Deputy Metodologi dan Informasi Statistik. Hal ini sesuai dengan surat Sestama No B-433/BPS/2110/6/2020 tanggal 12 juni 2020 Perihal Penyampaian Renstra BPS Tahun 2020–2024 dan penyusunan Renstra serta IKU Unit Kerja.

Tabel 1
Reviu Rencana Strategis (Renstra) DDS 2020–2024

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional							
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	NA	100	100	100	100	PKS
		Persentase layanan yang telah selesai diproses	NA	100	100	100	100	LPS
		Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	80	81	82	84	86	RuSa LPS PDS
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	NA	27	30	32	35	RuSa
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik		NA	30	38	45	53	RuSa	

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Selama periode 2021 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Direktorat Diseminasi Statistik yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit

kerja BPS. Tabel 2 menyajikan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2021. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 terhadap target.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1 Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional			
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	100
	Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	81
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	27
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	30

Kegiatan

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Anggaran

Rp.2.877.373.000

Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Fungsi tahun 2021 pada Lampiran 1.

3

Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara setiap Tahun Anggaran berakhir, wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun Anggaran yang bersangkutan. Demikian halnya dengan keseluruhan Direktorat yang berada di bawahnya, wajib membuat laporan akuntabilitas masing-masing selama periode yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2021 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2021. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2021 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut:

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021

Direktorat Diseminasi Statistik secara berkala melaksanakan pemantauan kinerja sasaran setiap triwulan yang mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk memonitor, mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2021 dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran diakhir tahun anggaran.

Tujuan dari Direktorat Diseminasi Statistik yaitu **“Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional”**. Tujuan tersebut memiliki dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dengan tiga indikator kinerja sasaran.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, dengan dua indikator kinerja sasaran.

Secara rinci, lima indikator kinerja sasaran (IKS) Direktorat Diseminasi Statistik disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh IKS Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2021 sudah memenuhi target, bahkan realisasi empat IKS melampaui target yang ditetapkan. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik menyimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target tahun 2021 adalah 111,49 persen. Capaian kinerja tertinggi diperoleh oleh indikator “Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik”. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari BPS pada 2021 ditargetkan sebesar 30,00 persen, namun realisasinya mencapai 67,16 persen. Capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran di sajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional					
Meningkatnya pelayanan prima dalam Penyelenggaraan SSN	Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00
	Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100,00	119,18	119,18
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	81,00	87,59	108,14
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	27,00	29,73	110,00
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	30,00	67,16	120,00
Rata-Rata Capaian Kinerja					111,49

Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan prima dalam Penyelenggaraan SSN

IKS 1.1: Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00

Advance Release Calendar (ARC) adalah jadwal rilis/tayang publikasi yang dihasilkan oleh BPS kepada pengguna data, khususnya terhadap waktu penyajian produk statistik. Target dari indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis pertama pada tahun 2021 sebesar 100 persen. Hal ini berarti semua publikasi yang memiliki ARC harus rilis tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2021 banyaknya publikasi statistik yang dihasilkan Direktorat Diseminasi Statistik dan memiliki ARC adalah 14 publikasi, yaitu 12 publikasi Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE), Publikasi Statistik Indonesia 2021, dan Publikasi Katalog Publikasi BPS 2021. Sesuai target, sebanyak 14 publikasi tersebut sudah rilis tepat waktu, sesuai jadwal ARCnya. Dengan demikian, realisasi indikator sasaran sudah mencapai 100 persen dan capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen.

Kendala:

Belum optimalnya koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak yang tersebar di beberapa unit kerja dan direktorat berbeda selaku subject matter (penanggung jawab data) dengan Kementerian/Lembaga selaku produsen data sektoral untuk percepatan penyediaan data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA). Hal ini berpengaruh pada kelengkapan data yang tersedia di SIMDASI.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

Meningkatkan koordinasi dengan subject matter dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyediaan data untuk Publikasi Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka.

Rencana tindak lanjut:

Melakukan evaluasi, mempertajam pembagian tugas dan identifikasi kegiatan saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga lebih meningkatkan koordinasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (*subject matter*) dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) tahun berikutnya.

IKS 1.2: Persentase layanan yang telah selesai diproses

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100,00	119,18	119,18

Target dari indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama pada tahun 2021 yaitu sebesar 100 persen. artinya semua layanan yang masuk harus selesai diproses dan tidak ada yang tertunda. Adapun realisasi indikator sasaran ini melebihi target karena sudah mencapai 119,18 persen dan capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 119,18 persen. Pada tahun 2021 ini jumlah layanan yang masuk sebanyak 5.065 layanan yang ditargetkan hanya 4.250 layanan.

Kendala:

Kendala yang dihadapi pada indikator kinerja Persentase layanan yang telah selesai diproses adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya kolaborasi dan kerjasama dengan subject matter teknis di BPS terkait pemenuhan permohonan data dari pengguna data.
2. Jaringan VPN yang tidak stabil menghambat proses layanan publik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

Melakukan koordinasi dengan *subject matter* teknis di BPS terkait dan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia serta memperkaya konten data dan informasi yang disajikan melalui *website* BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh pengguna data.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dengan subject matter teknis di BPS terkait dalam rangka meningkatkan kolaborasi pada pelayanan publik.

- Menyelenggarakan pelayanan prima secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi publik, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi.

IKS 1.3: Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	81,00	87,59	108,14

Target dari indikator kinerja sasaran yang ketiga dari sasaran strategis pertama pada tahun 2021 yaitu sebesar 81,00 persen. Target Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik tersebut juga telah dilampaui, karena realisasi mencapai 87,59 persen (kategori baik).

Kendala:

- Masih kurangnya pemahaman pengguna data terkait mekanisme pengajuan permohonan data melalui aplikasi Silastik.
- Kurang optimalnya kolaborasi dan kerjasama dengan *subject matter* teknis di BPS terkait pemenuhan permohonan data dari pengguna data sehingga bertambahnya waktu penyelesaian layanan statistik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

- Melakukan sosialisasi mekanisme permohonan data, khususnya layanan nol rupiah kepada Kementerian/Lembaga/institusi terkait.
- Melakukan koordinasi dengan *subject matter* teknis di BPS terkait dan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia serta memperkaya konten data dan informasi yang disajikan melalui *website* BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh pengguna data.
- Mengembangkan aplikasi layanan pendukung yang bertujuan untuk mempercepat proses bisnis pada pemenuhan layanan statistik.
- Melakukan beberapa kajian untuk layanan statistik yang lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan sosialisasi mekanisme permohonan data, khususnya layanan nol rupiah kepada *subject matter* dan Kementerian/Lembaga.
- Melakukan koordinasi dengan *subject matter* teknis di BPS terkait dan mengembangkan aplikasi pendukung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran 2: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

IKS 2.1: Pesentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	27,00	29,73	110,00

Pemberikan rekomendasi serta pembinaan statistik kepada K/L/D/I merupakan salah satu fungsi utama dari tugas BPS khususnya Direktorat Diseminasi Statistik dalam pelaksanaan tugas sebagai Pembina Statistik. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral merupakan indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua. Pada tahun 2021 target untuk indikator ini sebesar 27,00 persen dan realisasi indikator ini sudah mencapai lebih dari target yaitu 29,73 persen. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 120,00 persen. Pada tahun ini Direktorat Diseminasi Statistik telah memberikan rekomendasi kepada sebanyak 11 K/L/D/I dari 10 K/L/D/I yang ditargetkan. Sebelas K/L/D/I tersebut adalah: 1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, 2. Kementerian Hukum dan HAM, 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 4. Kementerian PUPR, 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 6. Kementerian Keuangan, 7. Kementerian Pertanian, 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 9. Ombudsman Republik Indonesia, 10. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan 11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kendala:

Tingkat kepatuhan K/L/I/D terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih rendah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

Melakukan sosialisasi rekomendasi kepada *Subject Matter* dan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Rencana Tidak Lanjut:

1. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik.
2. Melakukan pembinaan statistik ke K/L/I/D dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk K/L/I/D yang melakukan kegiatan statistik.

IKS 2.2: Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	30,00	67,16	120,00

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik merupakan indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis kedua. Pada kegiatan pembinaan statistik sektoral, Direktorat Diseminasi Statistik menargetkan ada sebanyak 30,00 persen. Pada tahun 2021 telah melakukan pembinaan sebanyak 45 K/L/D/I, atau dengan kata lain realisasi telah melebihi target yaitu 67,16 persen dari target 30,00 persen. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada indikator ini lebih dari 120,00 persen.

Kendala:

Belum berakhirnya pandemi COVID-19, serta terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral memberi ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

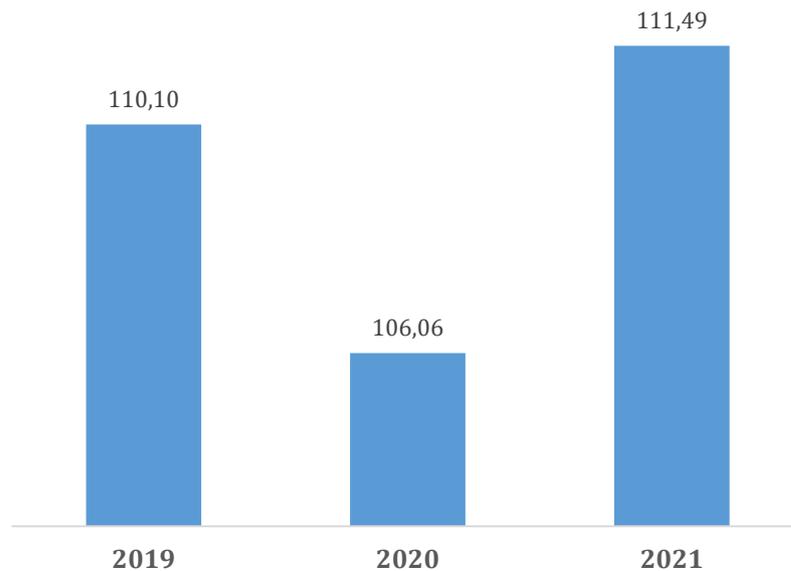
1. Mengundang para K/L/D/I untuk mengikuti pembinaan melalui webinar.
2. Kolaborasi dengan pusdiklat yang memiliki sistem/aplikasi dan alokasi anggaran untuk proses pembinaan.
3. Memaksimalkan sarana pertemuan secara daring dalam proses pembinaan statistik sektoral.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan statistik.
2. Melakukan pembinaan statistik ke K/L/I/D.
3. Penguatan Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2021, capaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Diseminasi Statistik dibandingkan dengan capaian pada indikator kinerja tahun 2020 menunjukkan keberhasilan, bahkan terdapat kegiatan yang melampaui target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercemin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 111,49 persen seperti pada Gambar 2.



Gambar 2
Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 terhadap Realisasi Kinerja Akhir Rencana Strategis, 2019 dan 2020

Dilihat dari capaian indikator, perkembangan capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik , 2020 dan 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan: Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional						
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Publikasi statistik ARC yang rilis tepat waktu	Publikasi/ Laporan	2020	14	15	107,14
	Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	2021	100,00	100,00	100,00
	Jumlah aktivitas layanan terhadap konsumen	Aktivitas	2020	5.000	5.196	120,00
	Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	2021	100,00	119,18	119,18
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	2020	80,00	90,41	113,01
2021			81,00	87,59	108,14	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah Instansi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	2020	15	10	66,70
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	2021	27,00	29,73	110,00
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan	Aktivitas	2020	3	4	120,00
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	2021	30,00	67,16	120,00
Rata-Rata Capaian Kinerja			2020			106,06
			2021			111,49

Tabel 4 memperlihatkan bahwa satuan dari Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2021 dan 2020 banyak yang berbeda. Oleh karena itu, target dan realisasi IKS antara tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan. Namun tingkat capaian kinerja tetap dapat dibandingkan. Target indikator kinerja sasaran tahun 2021 telah tercapai dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 111,49 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian sasaran kinerja tahun 2021 sudah di atas 100,00 persen, dan secara rata-rata capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 5,43 persen, dimana sebelumnya tahun 2020 rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai sebesar 106,06 persen.

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2024

Renstra 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang memuat target Indikator Kinerja Utama Direktorat Diseminasi Statistik dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk mendukung visi dan misi dari Deputi Metodologi dan Informasi Statistik dan tentunya mendukung visi dan misi BPS, maka Direktorat Diseminasi Statistik fokus pada visi atau tujuan akhir yaitu “Penyelenggara layanan statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju”. Pemantauan target akhir Renstra 2020–2024 perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi langkah apa saja atau indikator mana saja yang membutuhkan kinerja lebih dan penyesuaian dalam pencapaian targetnya.

Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 terhadap target akhir Renstra di Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 5. Terdapat lima indikator untuk mencapai tujuan tersebut. Ada satu indikator yang belum bisa dicapai pada tahun 2021, sementara 4 indikator sudah dapat dicapai pada tahun 2021. Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2024 dihitung berdasarkan realisasi 2021 terhadap target 2024. Capaian

kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5
Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2021 Terhadap Target Rencana Strategis 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 Meningkatkan Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional					
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00
	Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100,00	119,18	119,18
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	86,00	87,59	101,85
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	35,00	29,73	84,94
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	53,00	67,16	120,00
Rata-rata Capaian Kinerja					106,54

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Ke-2 dari Tujuan 1 yaitu “Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral” memiliki target akhir pada Renstra 2024 sebesar 35 persen. dan pada tahun 2021 baru mencapai 29,73 persen. Dengan capaian 84,94 persen tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik optimis pada tahun 2024 mendatang akan tercapai lebih dari 35 persen.

Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan prima dalam Penyelenggaraan SSN

IKS 1.1: Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00

Sesuai dengan Reviu Renstra Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase Publikasi statistik yang memiliki ARC yang rilis tepat waktu, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100,00 persen. Pada tahun 2021 target tersebut telah tercapai yaitu dengan realisasi 100,00 persen dan tingkat capaian kinerja juga 100,00 persen.

IKS 1.2: Persentase layanan yang telah selesai diproses

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100,00	119,18	119,18

Sesuai dengan Reviu Renstra Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase layanan yang telah selesai diproses, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100,00 persen. Pada tahun 2021 target tersebut telah tercapai dan melebihi target yaitu dengan realisasi 119,18 persen dan tingkat capaian kinerja juga 119,18 persen.

IKS 1.3: Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	86,00	87,59	101,85

Sesuai dengan Reviu Renstra Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 86,00 persen. Pada tahun 2021 target tersebut telah tercapai dan melebihi target yaitu dengan realisasi 87,59 persen dan tingkat capaian kinerja juga 101,85 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

IKS 2.1: Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	35,00	29,73	84,94

Sesuai dengan Reviu Renstra Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 35,00 persen. Pada tahun 2021 target tersebut baru tercapai 29,73 persen dan tingkat capaian kinerja juga 84,94 persen. Target 35,00 persen tersebut optimis akan tercapai pada tahun 2024, dimana masih ada 3 tahun lagi untuk mencapai hal tersebut. Apabila di bagi setiap tahun, maka target akan tercapai apabila pertahunnya naik sebesar 2 persen.

IKS 2.2: Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	53,00	67,16	120,00

Sesuai dengan Reviu Renstra Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020–2024 pada indikator Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 53,00 persen. Pada tahun 2021 target tersebut telah tercapai dan melebihi target yaitu dengan realisasi 67,16 persen dan tingkat capaian kinerja lebih dari 120,00 persen.

3.4 Prestasi

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2021 diantaranya:

1. Layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) mendapatkan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 yaitu Layanan Perpustakaan (Online), Layanan Konsultasi Statistik Online, Layanan Penjualan Publikasi Online, Layanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Online dan Layanan Rekomendasi Statistik.
2. BPS menerima penghargaan dari Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. BPS mendapatkan penghargaan kategori “Informatif” atas pengelolaan informasi publik.
3. BPS menerima penghargaan dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI. BPS mendapatkan penghargaan kategori “Kepatuhan Tinggi” atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik.
4. Portal website bps.go.id meraih penghargaan Terbaik II Kategori Website Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri pada acara Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan di Bali 4 November 2011.
5. BPS aktif berpartisipasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya sejak KIPP tersebut diselenggarakan pada tahun 2014. Pada KIPP Tahun 2021, BPS belum berhasil lolos seleksi TOP 99.
6. Penyusunan kajian data mikro kaitannya dengan kriteria aset. Berdasarkan identifikasi kriteria penentuan aset tetap dan aset tidak berwujud pada PMK 234/PMK.05/2020, data mikro bukan merupakan aset tetap dan juga bukan merupakan aset tidak berwujud dikarenakan sulitnya mengukur biaya perolehan secara handal.
7. Penyusunan kajian datalab. Mengkaji kondisi penyediaan akses data mikro di BPS saat ini dengan melakukan perbandingan pada NSO di negara lain, serta mengkaji sistem datalab yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi infrastruktur dan jaringan BPS.
8. Penyusunan revisi PP PNBPN Nomor 7 tahun 2015 atas terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan di BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

10. Penyusunan Tata Kelola Pojok Statistik menjadi salah satu capaian yang berhasil diraih pada tahun 2021. Tata kelola ini disusun dalam bentuk draft Pedoman Penyelenggaraan Pojok Statistik yang akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Pojok Statistik di Indonesia.
11. BPS mendapat kepercayaan dari KemenPANRB untuk membantu dalam penyelenggaraan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kolaborasi ini terjalin sejak SHPRBZI diselenggarakan pada tahun 2015. Pada tahun 2020, SHPRBZI diselenggarakan secara online terhadap seluruh responden.
12. Terselenggaranya penghimpunan metadata statistik berdasarkan perban no 5 tahun 2020.
13. Mengintegrasikan tata kelola metadata melalui metadata management system (MMS) dan aplikasi INDAH.
14. Pengembangan aplikasi SKD Online.
15. Penyusunan 4 buku modul panduan pembinaan sektoral dan sudah dipergunakan sebagai materi pembinaan statistik sektoral tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan jumlah peserta 1300 orang, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS.
16. Penyegaran wajah baru Berita Resmi Statistik (BRS) yang diluncurkan secara serentak baik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang melakukan rilis data Inflasi di bulan Oktober 2021. Peluncuran wajah baru BRS ini juga menjadi salah satu rangkaian acara kegiatan perayaan Hari Statistik nasional 2021.
17. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi antara lain pembuatan publikasi Statistik Indonesia dalam Infografis 2021. Statistik Indonesia dalam Infografis 2021 ini dikemas sedemikian rupa guna memudahkan pengguna data untuk lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2021. Buku Statistik Indonesia dalam Infografis 2021 telah dilakukan pencetakan secara fisik dan disebarluaskan ke BPS Provinsi/Kab/Kota serta Pojok Statistik di beberapa kampus seperti USU, UNP, Unhas, dan perpustakaan daerah.
18. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) di lingkungan BPS baik level pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) untuk data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) untuk data level regional/daerah.
19. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di tahun 2021.
20. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS) untuk pengelolaan penyusunan naskah Berita Resmi Statistik.
21. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Portal Publikasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di tahun 2021
22. Optimalisasi layanan digital melalui portal satu pintu layanan pst.bps.go.id yang dilengkapi dengan layanan reservasi kunjungan langsung sebagai bentuk inovasi pelayanan statistik di masa pandemi. Hal ini merupakan bukti komitmen BPS kepada publik akan jaminan pelayanan meskipun dalam kondisi yang terbatas
23. Pembangunan aplikasi SBE Mail, yaitu aplikasi mobile berbasis Android untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan proses disposisi dan persetujuan e-sign untuk layanan transaksi melalui surat.

24. Pengembangan Silastik-Backend yaitu dengan membangun modul E-sign. Implementasi e-sign ke dalam aplikasi silastik backend (SBE) untuk pembuatan surat balasan kepada pengguna data dan invoice.
25. Pengembangan SBE Mobile, yaitu merupakan aplikasi mobile berbasis android untuk mempermudah operator layanan PST dalam menjawab konsultasi statistik yang masuk.
26. Pengembangan sistem Transdata, yaitu pengembangan modul pertukaran data transdata, yaitu approval draft Perjanjian Kerjasama, dashboard Kementerian/Lembaga dan dashboard Subject Matter.
27. Promosi melalui media digital, baik website maupun media sosial pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Melalui promosi digital ini, diharapkan dapat meningkatkan awareness dan literasi statistik masyarakat.
28. Pembangunan Pojok Statistik 2021 berhasil melampaui target yang semula ditargetkan 3 Provinsi menjadi terealisasi sebanyak 5 Provinsi. Hal ini merupakan capaian terbesar sepanjang 2019-2021. Dengan berdirinya 5 Pojok Statistik di tahun 2021, berhasil menambah jumlah Pojok Statistik di Indonesia menjadi 7 lokus.
29. Pembangunan website Pojok Statistik Virtual merupakan salah satu prestasi yang diraih oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Website ini diluncurkan pada 28 September 2021 secara nasional oleh Kepala BPS RI. Website Pojok Statistik Virtual (PSV) ini dibangun dalam menjawab tantangan keterbatasan mobilisasi. Website dengan alamat pojokstatistik.bps.go.id akan menjadi media kolaborasi BPS dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan literasi statistik di lingkup perguruan tinggi.
30. Manajemen tabel Subject Matter dengan tata kelola ARC tabel dan status kepemilikan tabel setiap Subject Matter pada tahun 2021 berjalan dengan baik;
31. Bertambahnya kepemilikan tabel pada tahun 2021 oleh Subject Matter sehingga mendukung tersedianya data yang lengkap dan mutakhir di website BPS;
32. Aplikasi allstats android selalu diperbarui untuk meningkatkan performa bagi pengguna aktif android dan IOS yang pada tahun 2021 masing masing mencapai 17.900 dan 4.100;
33. Implementasi aplikasi *Online Public Access Catalogue* (OPAC) yang mulai dibangun pada tahun 2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. OPAC menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS, aplikasi ini menyediakan fasilitas download koleksi pustaka berwatermark. OPAC dapat diakses secara online oleh pengguna layanan perpustakaan BPS dimana saja mereka berada tanpa harus datang ke perpustakaan BPS.
34. Implementasi aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST)-Online yang mulai dibangun pada tahun 2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. PST-Online menggantikan aplikasi PST-Offline yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2011. PST-Online menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS, aplikasi ini menyediakan fasilitas download koleksi pustaka berwatermark. PST-Online hanya dapat diakses oleh pengguna layanan yang datang ke perpustakaan BPS. PST-Online sudah diimplementasikan di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/kota.

3.5 Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Pada tahun 2021, Direktorat Diseminasi Statistik telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik rutin maupun prioritas, yang secara rinci diuraikan dalam lampiran. Beberapa kegiatan prioritas Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2021 di antaranya adalah:

1. Pembinaan Statistik Sektoral kepada K/L/I/D
2. Penghimpunan Metadata dari K/L/I/D
3. Pelaksanaan SKD 2021
4. Pemberian layanan rekomendasi
5. Pembentukan Pojok Statistik
6. Pembangunan website Pojok Statistik Virtual
7. Pemberian layanan data dan informasi statistik, yang meliputi layanan konsultasi, penjualan data mikro, publikasi tercetak, publikasi elektronik dan peta digital wilayah kerja statistik.
8. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Statistik Backend dan aplikasi pertukaran data (Transdata).
9. Penyusunan kajian data mikro sebagai aset, datalab dan revisi PP PNBP.
10. Tata kelola tabel dengan pengelompokan subjek berbasis standar internasional yaitu *Classification of Statistic Activities (CSA)*.
11. Pemeliharaan website Sensus Penduduk 2020.
12. Tata kelola menu konten PPID di website BPS.
13. Melakukan workshop penyusunan *Official Statistics News* dengan *Australian Bureau Of Statistics (ABS)*.
14. Melaksanakan Pelatihan menulis Berita Resmi Statistik dalam Bahasa Inggris.
15. Penyajian Berita Resmi Statistik dalam Bahasa Inggris.
16. Penyegaran wajah baru Berita Resmi Statistik untuk versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
17. Interoperabilitas data SI dan DDA antara SIMDASI dengan sistem yang ada di K/L dan interoperabilitas antara SIMDASI dengan sistem pengolahan data yang tersedia di BPS.
18. Pengembangan dan pemeliharaan sistem, antara lain penambahan berbagai fitur/ fungsi di SIMDASI, SIMBRS, Portal Publikasi, repository gambar, dan SIMOTIK
19. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi publik, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi.

3.6 Upaya Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu tolok ukur dalam penerapan *good governance*. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, birokrasi yang efektif menjadi salah satu sasaran dan reformasi birokrasi. Salah satu efisiensi yang dapat dilakukan instansi pemerintah adalah efisiensi dalam penggunaan anggaran. Bahkan, Kementerian PAN-RB menjadikan efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai dasar evaluasi implementasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, instansi pemerintah juga diminta untuk *refocusing* kegiatan dan realokasi anggarannya dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Penghematan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Diseminasi dilakukan di beberapa pos anggaran antara lain pelaksanaan pelatihan dan *workshop* secara *online*. Penyampaian materi melalui online sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan *workshop*. Pagu anggaran (tidak termasuk PNBP) sebelum dilakukan efisiensi adalah sebesar Rp.2.877.373.000 dan setelah dilakukan *selfblocking* sebesar Rp.2.877.373.000 atau sekitar 85,44 persen menjadi Rp.418.979.00. Adapun realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 90,28 persen.

Penghematan yang dilakukan cukup besar, untuk kegiatan laporan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) anggaran yang dihebat sebesar 78,85 persen atau sekitar Rp877.149.000. Sedangkan penghematan Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik lebih besar dari pada kegiatan laporan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yaitu mencapai 89,59 persen atau sebesar Rp1.581.245.000. Walaupun dengan penghematan 85,44 persen, akan tetapi capaian kinerja masih cukup tinggi yaitu mencapai 111,49 persen. Untuk melihat besaran anggaran sebelum *selfblocking* (pagu awal) dan sesudah *selfblocking* (pagu akhir) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Jumlah Anggaran menurut Kegiatan di Direktorat Diseminasi Statistik, 2021

Proyek/Tolak Ukur/Kegiatan	Pagu Awal (rupiah)	Pagu Akhir (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
(2897.BDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (003) Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1.764.944.000	183.699.000	153.426.981	83,52	30.272.019
(2897.BMA) Data dan Informasi Publik (RM) (004) Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	1.112.429.000	235.280.000	224.807.656	95,54	10.472.344
Jumlah	2.877.373.000	418.979.000	383.125.259	90,28	40.744.363

Selain upaya efisiensi dari sisi anggaran, Direktorat Diseminasi Statistik juga melakukan efisiensi pada sisi sumber daya energi. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Diseminasi Statistik berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Upaya penghematan energi dengan cara mematikan lampu ruang yang tidak diperlukan serta mematikan komputer/laptop ketika sedang istirahat, sedangkan untuk penghematan air yaitu ketika sedang menggosok gigi atau ketika sedang mencuci piring kran tidak dibiarkan terbuka sehingga air mengalir dan tidak terpakai.

3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pagu yang diberikan ke Direktorat Diseminasi Statistik untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2021 adalah sebesar 8,008 milyar rupiah, yang terdiri dari 0,419 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan 7,589 milyar bersumber dari PNBP. Realisasi PNBP sebesar 70,87 persen dan APBN atau Rupiah Murni sebesar 901,28 persen. Beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi di tahun 2021 akibat adanya pembatasan aktivitas sosial sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2021. Adapun realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Realisasi Anggaran Menurut Sumber Anggaran di Direktorat Diseminasi Statistik, 2021

Kode	Proyek/Tolak Ukur/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)			Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	Sisa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2897	PNBP	7.589.353.650	5.378.931.100	2.210.422.550	70,87
2897	APBN (RM)	418.979.000	378.234.637	40.744.363	90,28



4

Penutup

4.1 Tinjauan Umum

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan mempunyai tingkat pencapaian indikator lebih dari rata-rata sebesar 111,49 persen.

4.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik selanjutnya adalah:

- a. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan statistik.
- b. Melakukan pembinaan statistik ke K/L/I/D.
- c. Penguatan Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- d. Pengembangan aplikasi metadata untuk penyajian hasil penghimpunan metadata.
- e. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).
- f. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi dan informasi statistik yang ada.
- g. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas publikasi BPS.
- h. Melakukan pengadaan untuk koleksi aset desain dan PC untuk desain grafis.
- i. Meningkatkan kemampuan keterampilan SDM dalam bidang pemasaran untuk meningkatkan kegiatan promosi statistik.
- j. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai khususnya dalam keterampilan desain grafis maupun infografis untuk mendukung penyusunan konten promosi statistik yang lebih kreatif dan inovatif.
- k. Melakukan perekrutan pegawai dengan talenta grafis dan konten kreatif untuk mendukung kegiatan promosi statistik.
- l. Menyediakan anggaran untuk Dekorasi dan penyelenggaraan Pojok Statistik pada anggaran Rupiah Murni (RM).
- m. Menambah jumlah SDM untuk optimalisasi promosi statistik.
- n. Melakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan.
- o. Melakukan pembinaan Agen Statistik untuk optimalisasi penyelenggaraan Pojok Statistik 2022.
- p. Finalisasi draft perban kebijakan diseminasi.
- q. Menyelenggarakan pelayanan prima secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan informasi publik, keterbukaan informasi publik, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi.
- r. Melakukan sosialisasi mekanisme permohonan data, khususnya layanan nol rupiah kepada Subject Matter dan Kementerian/Lembaga.

- 
- s. Melakukan koordinasi dengan fungsi Jaringan Komunikasi Data dan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia.

The background is a dark blue gradient with various abstract elements: large, overlapping, rounded shapes in lighter blue; several small, solid blue circles scattered throughout; and faint, repeating patterns of wavy lines and vertical dots in a slightly lighter shade of blue.

Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Eng. Imam Machdi M.T.
Jabatan : Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Eng. Imam Machdi M.T.
NIP. 19710423 199102 1 001

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama

Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Satuan (3)	Target (4)
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase publikasi statistik yang memiliki ARC dan terbit tepat waktu	Persen	100
	Persentase layanan yang telah selesai diproses	Persen	100
	Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	81
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	Persen	27
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	30

Kegiatan

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Anggaran

Rp. 2.877.373.000,-

Pihak Kedua



Dr. Eng. Imam Machdi M.T.
NIP. 19710423 199102 1 001

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama



Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Fungsi Rujukan Statistik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOORDINATOR FUNGSI RUJUKAN STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ahlam M.Si
Jabatan : Fungsional Statistisi Madya selaku Koordinator Fungsi Rujukan Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 30 April 2021
Pihak Pertama


Ir. Ahlam M.Si
NIP. 196302151985012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOORDINATOR FUNGSI RUJUKAN STATISTIK

Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan Statistik	RKA	1
Jumlah sistem pendukung rujukan statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	4
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun	Metadata	100
Jumlah K/L yang menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral sesuai standar	Metadata	10
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	Metadata	110
Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	2
Jumlah modul pembinaan statistik	Modul	4
Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	Publikasi/Laporan	2
Jumlah dokumen SKD yang dihimpun	Dokumen	150
Jumlah K/L/D yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	10
Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Aktivitas	12
Jumlah K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik	Instansi	20

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 30 April 2021
Pihak Pertama


Ir. Ahlam M.Si
NIP. 196302151985012001

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOORDINATOR FUNGSI PUBLIKASI DAN KOMPILASI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwiek Widyati, S.Sos., M.M.
Jabatan : Koordinator Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DR. Pudji Ismartini, M.App.Stat.
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama

Wiwiek Widyati, S.Sos., M.M.
NIP. 19631102 198303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOORDINATOR FUNGSI PUBLIKASI DAN KOMPILASI STATISTIK

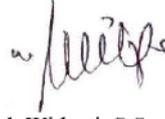
Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
Jumlah usulan RKA aktivitas Publikasi dan Kompilasi Statistik	RKA	1
Jumlah publikasi statistik yang sudah sesuai standar	Publikasi	15
Persentase publikasi statistik yang memiliki ISSN/ISBN	Persen	100
Jumlah publikasi statistik ARC yang terbit tepat waktu	Publikasi	14
Jumlah permintaan perwajahan publikasi yang telah selesai dilayani	Layanan	125
Persentase pengelolaan BRS yang rilis tepat waktu	Persentase	100
Jumlah laporan evaluasi publikasi ARC	Laporan	24
Jumlah sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	5

Pihak Kedua



DR. Pudji Ismartini, M.App.Stat.
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama



Wiwiek Widayati, S.Sos., M.M.
NIP. 19631102 198303 2 001

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Fungsi Layanan dan Promosi Statistik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KOORDINATOR FUNGSI LAYANAN DAN PROMOSI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Setiawan M.Env.Sc.
Jabatan : Fungsional Statistisi Madya selaku Koordinator Fungsi Layanan dan Promosi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 1 April 2021
Pihak Pertama


Agus Setiawan M.Env.Sc.
NIP. 196908191992111001

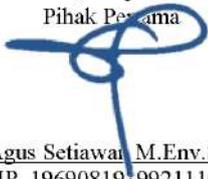
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOORDINATOR FUNGSI LAYANAN DAN PROMOSI STATISTIK

Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
Jumlah usulan RKA aktivitas Layanan dan Promosi Statistik	RKA	1
Jumlah sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	9
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	Aktivitas	4.250
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	81
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Pengunjung	2.322.354
Jumlah satker yang memiliki website yang terhubung secara online	Satker	549

Pihak Kedua


Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 1 April 2021
Pihak Pertama


Agus Setiawan, M.Env.Sc.
NIP. 196908191992111001

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOORDINATOR FUNGSI PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayat Rochadiyat S.ST, M.M.
Jabatan : Fungsional Statistisi Madya selaku Koordinator Fungsi Perpustakaan Dan Dokumentasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama

Yayat Rochadiyat S.ST, M.M.
NIP. 196605091991011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOORDINATOR FUNGSI PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI STATISTIK

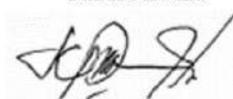
Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
Jumlah usulan RKA aktivitas Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	RKA	1
Jumlah sistem pendukung perpustakaan dan dokumentasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	4
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	Aktivitas	1800
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	80
Jumlah Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang menggunakan sistem aplikasi perpustakaan	Unit Kerja	69

Pihak Kedua



Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815 199312 2 002

Jakarta, 3 Februari 2021
Pihak Pertama



Yayat Rochadiyat S.ST. M.M.
NIP. 196605091991011001

Lampiran 6 Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik

Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan, 2021

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	≤ SMA	DI-DIII	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktur Diseminasi Statistik	-	-	-	-	1	1
Fungsi Rujukan Statistik	-	-	7	11	-	18
Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik	-	-	13	7	-	20
Fungsi Layanan dan Promosi Statistik	1	1	19	9	-	30
Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	2	3	7	6	-	18
Jumlah	3	4	46	33	1	87

Lampiran 7 Laporan Kegiatan Fungsi Rujukan Statistik

7.1 Penghimpunan Metadata Statistik

7.1.1 Metadata Statistik Dasar

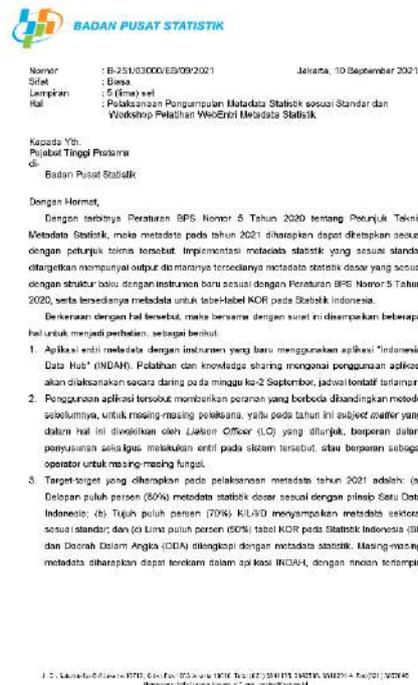
Fungsi Rujukan Statistik melaksanakan kegiatan penghimpunan metadata kegiatan statistik dasar untuk mendukung penyediaan informasi mengenai kegiatan statistik dasar pada portal Indonesia Data Hub (INDAH). Penghimpunan metadata statistik dasar dilakukan di lingkungan BPS Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antara Fungsi Rujukan Statistik dengan *Liaison Officer* (LO) metadata statistik dasar. LO metadata statistik dasar berasal dari perwakilan masing-masing subject matter pada setiap fungsi di lingkungan BPS Pusat. Rapat koordinasi tersebut memberikan pembekalan kepada LO tentang tata cara pengisian tiga (3) kuesioner metadata yaitu Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg), Metadata Variabel Statistik (MS-Var) dan Metadata Indikator Statistik (MS-Ind). Rapat koordinasi LO dilakukan secara daring via Zoom Meeting karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Rapat Koordinasi LO Metadata Statistik Dasar dilaksanakan dua termin pada tanggal 15 September 2021 dan 16 September 2021 dan dimulai pukul 07.30 s.d 12.30 WIB.

2. Penghimpunan metadata statistik dasar

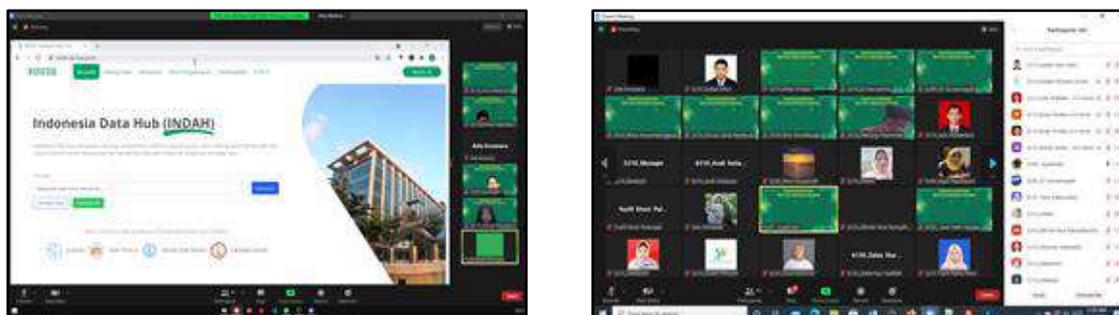
Penghimpunan metadata statistik dasar dikumpulkan melalui instrumen Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg), Metadata Variabel Statistik (MS-Var) dan Metadata Indikator Statistik (MS-Ind).



Surat Deputi MIS tentang Pelaksanaan Pengumpulan Metadata Statistik sesuai Standar dan Workshop Pelatihan WebEntri Metadata Statistik

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kuesioner Metadata yang telah diisi oleh LO masing-masing subject matter. Diskusi dan crosscheck mengenai isian yang terdapat pada kuesioner juga dilakukan oleh LO dari subject matter dengan petugas dari fungsi Rujukan Statistik sehingga kemungkinan kesalahan dalam kuesioner dapat diminimalisasi.



Zoom meeting koordinasi LO metadata statistik dasar 2021

Penghimpunan metadata kegiatan statistik dasar pada tahun 2021 sebanyak 2.422 yang terdiri dari 200 Metadata Kegiatan Statistik, 1.280 Metadata Variabel Statistik dan 942 Metadata Indikator Statistik. Adapun jumlah metadata menurut asal Direktorat adalah sebagai berikut:

Jumlah Metadata Menurut Direktorat dan Jenis Metadata, 2021

No	Direktorat	Metadata Kegiatan	Metadata Variabel	Metadata Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	1	0	0
2	Direktorat Diseminasi Statistik	29	71	54
3	Direktorat Sistem Informasi Statistik	1	3	5
4	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	8	97	56
5	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	2	8	21
6	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	8	19	68
7	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	11	180	42
8	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	15	214	95
9	Direktorat Statistik Industri	16	359	73
10	Direktorat Statistik Distribusi	10	22	12
11	Direktorat Statistik Harga	16	68	30
12	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	18	101	32

No	Direktorat	Metadata Kegiatan	Metadata Variabel	Metadata Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Direktorat Neraca Produksi	16	52	67
14	Direktorat Neraca Pengeluaran	22	86	69
Total		200	1.280	942

7.1.2 Metadata Statistik Sektoral/Khusus

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, statistik dibagi menjadi tiga yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Oleh karena itu, penghimpunan metadata kegiatan tidak hanya dilakukan untuk kegiatan statistik dasar tetapi juga statistik sektoral dan statistik khusus. Penghimpunan kegiatan statistik sektoral dan khusus mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas tersebut diharapkan metadata kegiatan sektoral dan khusus yang dihimpun akan semakin lengkap dan beragam. Kegiatan penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus dilaksanakan dalam serangkaian tahapan, yaitu:

1. Knowledge Sharing dalam bentuk pelatihan terkait pemahaman penggunaan petunjuk teknis Metadata Statistik Sektoral/Khusus di Daerah

Tahapan awal yang dilakukan terkait dengan penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus adalah pelaksanaan koordinasi melalui pengiriman surat Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik nomor B-117/03000/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Pengumpulan Metadata Statistik Tahun 2021. Dalam surat tersebut setiap satker BPS baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota diminta menyesuaikan pengumpulan metadata statistik sektoral/khusus menggunakan instrumen yang baru yaitu Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg), Metadata Variabel Statistik (MS-Var) dan Metadata Indikator Statistik (MS-Ind). BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota juga dibekali pemahaman penggunaan Petunjuk Teknis Metadata Statistik, instrumen dan aplikasi metadata statistik.



Surat deputi MIS perihal pengumpulan metadata statistik 2021

2. Penghimpunan Metadata Statistik Sektor/Khusus

Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik pada level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Penghimpunan dilakukan dengan menghubungi LO masing-masing OPD/K/L atau dengan mendatangi Kementerian/Lembaga/Instansi/OPD menggunakan instrumen kuesioner Metadata Kegiatan Statistik (MS-Keg), Metadata Variabel Statistik (MS-Var) dan Metadata Indikator Statistik (MS-Ind). Penghimpunan dilakukan mulai dari Mei sampai dengan Oktober 2021.

Jumlah Metadata Menurut Satuan Kerja dan Jenis Metadata, 2021

Kode Wilayah	Satuan Kerja	Metadata Kegiatan	Metadata Variabel	Metadata Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
00	Pusat	187	1.281	943
11	Aceh	374	1.208	231
12	Sumatera Utara	353	1.794	592
13	Sumatera Barat	394	1.935	912
14	Riau	131	532	210
15	Jambi	208	814	324
16	Sumatera Selatan	188	1.214	285
17	Bengkulu	101	638	198
18	Lampung	269	1.458	552
19	Kepulauan Bangka Belitung	164	584	176
21	Kepulauan Riau	76	122	72
31	DKI Jakarta	27	63	0
32	Jawa Barat	578	5.241	1.025
33	Jawa Tengah	778	6.320	2.217
34	DI Yogyakarta	194	1.079	211
35	Jawa Timur	758	3.426	833
36	Banten	93	1.106	319
51	Bali	120	305	162
52	Nusa Tenggara Barat	103	492	170
53	Nusa Tenggara Timur	176	953	192
61	Kalimantan Barat	231	960	120
62	Kalimantan Tengah	181	744	153
63	Kalimantan Selatan	186	899	176
64	Kalimantan Timur	127	742	140
65	Kalimantan Utara	56	470	183
71	Sulawesi Utara	354	1.656	448
72	Sulawesi Tengah	130	591	54
73	Sulawesi Selatan	314	1.314	664
74	Sulawesi Tenggara	245	1.468	554
75	Gorontalo	59	342	70
76	Sulawesi Barat	84	495	231
81	Maluku	127	457	94
82	Maluku Utara	73	303	21
91	Papua Barat	68	306	10
94	Papua	63	67	15
Total		7.570	41.379	12.557

7.2 Pengembangan SIRUSA

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) merupakan suatu sistem untuk mengelola dan menyajikan metadata statistik, baik itu metadata kegiatan statistik maupun metadata variabel dan/atau indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik yang dimaksud. SIRuSa dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Fungsi Rujukan Statistik. Sistem ini terdiri dari dua komponen pokok yaitu *front-end system* dan *back-end system* yang dikelola secara terpadu. *Front-end system* digunakan untuk menampilkan metadata kepada publik. Metadata yang ditampilkan adalah metadata hasil entri BPS pusat maupun daerah yang telah diverifikasi pada *back-end system*. SIRuSa telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pemeliharaan dan pengembangan terus dilakukan terhadap SIRuSa, misalnya penambahan fitur maupun perbaikan fitur yang sudah ada sebelumnya.

Di tahun 2021, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan baik *front-end system* maupun *back-end system*. Pada *front-end system* terdapat update kuesioner metadata yang dapat diunduh oleh pengguna. Kuesioner yang sebelumnya adalah Q-Metadata dan Q-Metadata Dasar diganti menjadi kuesioner MS-Keg untuk metadata kegiatan, MS-Var untuk metadata variabel, dan MS-Ind untuk metadata indikator. Ketiga instrumen tersebut digunakan baik untuk menyusun metadata statistik dasar, sektoral, maupun khusus. Selain itu, terdapat update tautan untuk mengunduh kuesioner FS3 yang digunakan dalam Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Pengembangan juga dilakukan pada aplikasi *back-end system*. Terdapat update beberapa metadata yang telah dientri pada tahun sebelumnya melalui aplikasi *back-end system*. Selain itu juga terdapat kegiatan pengelolaan akun pengguna *back-end system*. Aplikasi *back-end system* ini sudah tidak digunakan untuk perekaman metadata sehingga fitur entri metadata dilakukan penutupan. Pengguna hanya bisa melakukan update metadata yang telah dientri pada tahun sebelumnya. Saat ini, perekaman metadata dilakukan melalui fitur metadata pada portal INDAH.

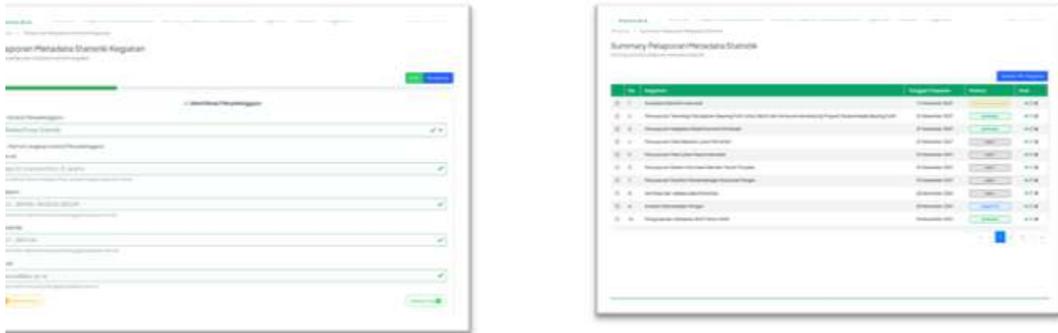


Front-End System dan Back-End System SIRuSa

7.3 Dukungan dalam Pengembangan Website Metadata dan MMS

Metadata Management System (MMS) merupakan sistem pengelolaan metadata di BPS. Sejak tahun 2021, metadata statistik dasar, sektoral, dan khusus direkam melalui portal Indonesia Data Hub (INDAH) dan disimpan ke dalam MMS. Perekaman metadata didasarkan pada instrumen MS-Keg untuk metadata kegiatan, MS-Var untuk metadata variabel, dan MS-Ind untuk metadata indikator seperti tercantum dalam Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020

tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sebelumnya, perekaman metadata melalui INDAH diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba yang dilakukan meliputi proses entri metadata dan pemeriksaan hasil entri. Hasil uji coba berupa masukan-masukan perbaikan kuesioner online yang belum sesuai dengan kuesioner metadata, penambahan rule validasi, penambahan fitur dashboard, dan perbaikan lain agar memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem metadata pada INDAH.



Perekaman metadata melalui Indonesia Data Hub (INDAH)

Metadata yang telah masuk ditampilkan kepada publik melalui Website Metadata yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Konten metadata yang bersumber dari MMS ditampilkan pada Website Metadata menggunakan mekanisme API. Pengembangan yang dilakukan pada Website Metadata misalnya menambahkan pagination pada daftar metadata yang diambil dan menampilkan konten metadata menggunakan fitur vertical tab untuk membagi konten metadata menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan pengguna untuk melihat metadata.

Konten metadata yang diperoleh dari MMS salah satunya bersumber dari metadata yang telah ada di SIRuSa sebelumnya. Saat ini, metadata SIRuSa masih dalam proses migrasi ke dalam MMS. Proses migrasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme API dari SIRuSa yang menghasilkan daftar metadata beserta detail metadatanya, yaitu metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel. Proses migrasi memperhatikan kualitas metadata sehingga metadata hasil migrasi sudah siap untuk dipublikasikan dengan kualitas yang baik.



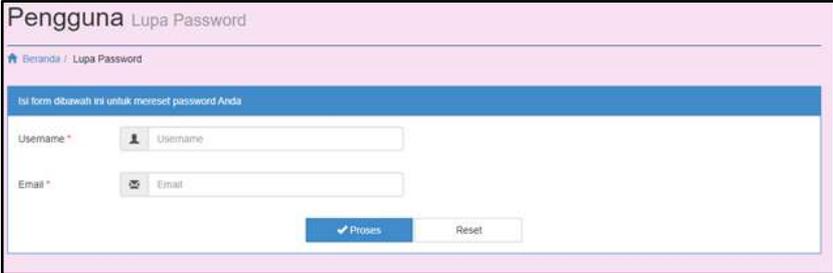
Website Metadata sebagai front-end system MMS

7.4 Pengembangan Aplikasi Romantik Online

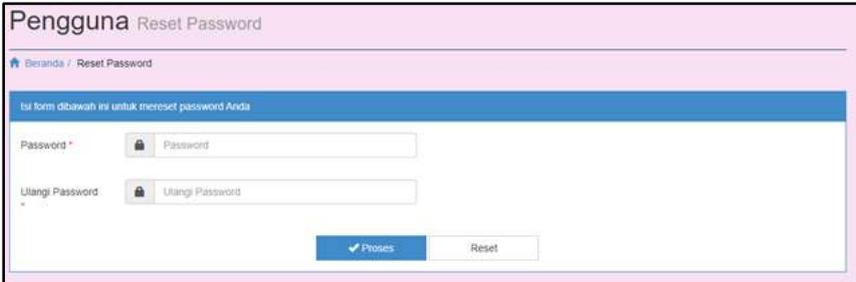
Seiring dengan semakin banyaknya penggunaan aplikasi Romantik Online baik di pusat maupun daerah, memunculkan beberapa kebutuhan beberapa fitur baru dan beberapa temuan kesalahan (error bugs). Oleh karena itu, aplikasi Romantik Online perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan layanan rekomendasi kegiatan statistik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pengembangan aplikasi Romantik Online yang dilakukan pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

A. Penambahan fitur lupa password

Fitur ini dibuat untuk memudahkan pengguna mengganti password akunnya jika pengguna tidak dapat masuk (login) karena lupa password. Melalui fitur ini pengguna diminta memasukkan nama akun (username) dan alamat email. Aplikasi akan memverifikasi nama akun dan email. Jika nama akun dan email sudah terdaftar, sistem akan mengirimkan tautan penggantian password ke email pengguna. Tautan tersebut akan mengarah ke formulir penggantian password. Selanjutnya pengguna dapat mengubah passwordnya melalui formulir tersebut.



Tampilan Formulir Lupa Password



Tampilan Formulir Penggantian Password

B. Penambahan fitur soft delete

Fitur ini untuk mengakomodir penghapusan pengajuan rekomendasi dari daftar rekomendasi yang masuk. Penghapusan ini hanya dapat dilakukan oleh admin baik pusat maupun daerah. Data yang dihapus dipindahkan ke penyimpanan sementara yang selanjutnya jika diperlukan data dapat dipulihkan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada pengguna yang tidak sengaja menghapus datanya. Proses pemulihan kembali ini hanya dapat dilakukan oleh admin pusat.

No	Penyelenggara	Judul Kegiatan	Status Rekomendasi	Waktu Pengajian	Waktu Divalidasi	Wilayah	Aksi
1	Kementerian A	Survei X	BELUM DIVALIDASI	12 Januari 2022 Pukul 13:05	-	PUSAT	[Aksi]
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana 2022	BELUM DIVALIDASI	30 Desember 2021 Pukul 15:09	-	KABUPATEN JEMBRANA	[Aksi]
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana 2022	BELUM DIVALIDASI	30 Desember 2021 Pukul 14:58	-	KABUPATEN JEMBRANA	[Aksi]
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Layanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana 2022	BELUM DIVALIDASI	30 Desember 2021 Pukul 14:44	-	KABUPATEN JEMBRANA	[Aksi]

Tampilan Daftar Pengajuan Rekomendasi yang Dihapus

C. Pembuatan master instansi

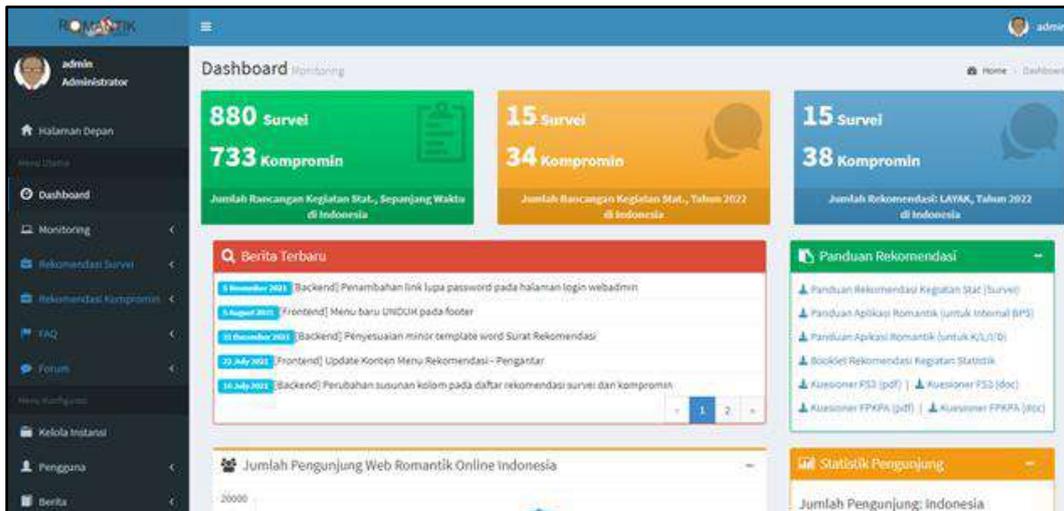
Pembuatan master instansi bertujuan menghindari penginputan berulang nama instansi pada formulir pengajuan rekomendasi sehingga dapat menghindari duplikasi data. Keperluan lainnya adalah untuk menampilkan pengajuan rekomendasi berdasarkan instansi sehingga memudahkan dalam monitoring ataupun pembuatan laporan. Namun, master instansi ini belum diterapkan pada formulir pengajuan rekomendasi dikarenakan perlu persiapan untuk melengkapi semua data instansi baik pusat maupun daerah sekaligus sosialisasi kepada pengguna.

No	Nama Instansi	Alias	Kategori	Aksi
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	-	Instansi Pusat	[Aksi]
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	Instansi Pusat	[Aksi]
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	Instansi Pusat	[Aksi]
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Investasi	-	Instansi Pusat	[Aksi]
5	Kementerian Sekretariat Negara	-	Instansi Pusat	[Aksi]
6	Kementerian Dalam Negeri	-	Instansi Pusat	[Aksi]
7	Kementerian Luar Negeri	-	Instansi Pusat	[Aksi]
8	Kementerian Pertahanan	-	Instansi Pusat	[Aksi]
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	Instansi Pusat	[Aksi]
10	Kementerian Keuangan	-	Instansi Pusat	[Aksi]

Tampilan Kelola Master Instansi

D. Penambahan informasi berita

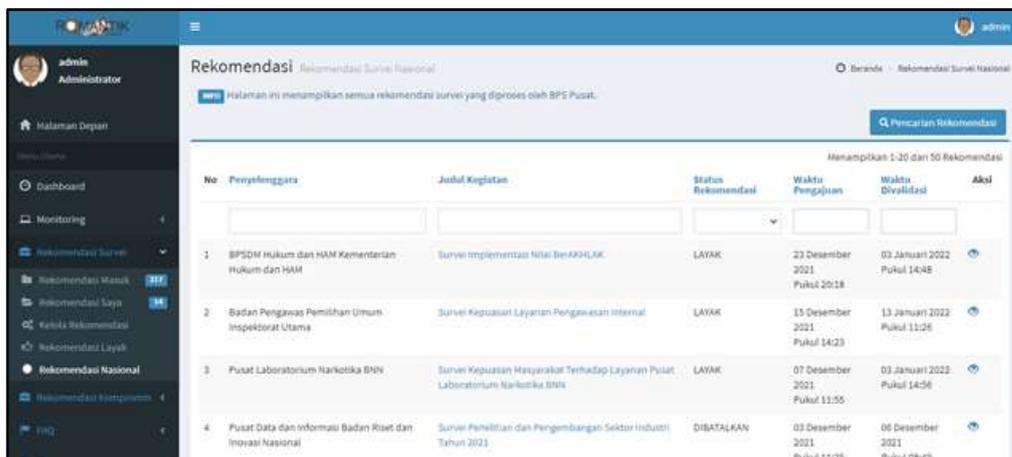
Fitur ini dimaksudkan untuk menginformasikan perubahan-perubahan pada aplikasi atau informasi terkait lainnya kepada pengguna/admin aplikasi romantik agar pengguna dapat mengetahui dan menyesuaikan perubahan aplikasi.



Tampilan Berita Terbaru

E. Penambahan fitur rekomendasi nasional

Fitur ini digunakan untuk menampilkan rekomendasi yang diajukan oleh kementerian/instansi pusat atau kegiatan statistik yang diselenggarakan secara nasional. Tujuannya agar pengguna/admin daerah dapat mengetahui kegiatan statistik yang berskala nasional sehingga jika ada instansi daerah yang mengajukan rekomendasi kegiatan yang sama yang sifatnya hanya turunan dari instansi pusat maka instansi daerah tidak perlu mengajukan kembali rekomendasi.



Tampilan Daftar Rekomendasi Nasional

F. Perbaikan tampilan daftar rekomendasi

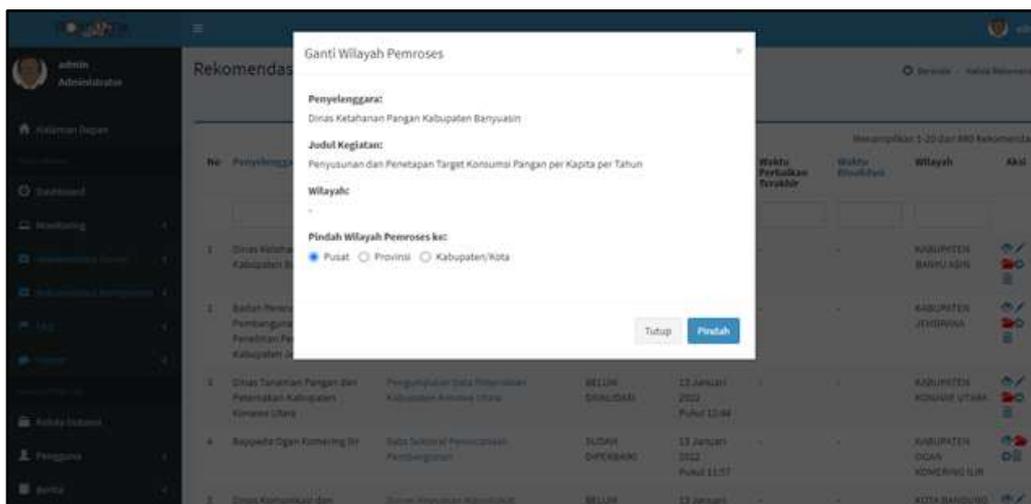
Perbaikan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi yang perlu ditampilkan dalam daftar pengajuan rekomendasi. Penyesuaian informasi yang dimuat dalam daftar pengajuan rekomendasi antara lain: penyelenggara, judul kegiatan, status rekomendasi, waktu pengajuan, waktu perbaikan terakhir, dan waktu validasi.

No	Penyelenggara	Judul Kegiatan	Status Rekomendasi	Waktu Pengajuan	Waktu Perbaikan Terakhir	Waktu Divalidasi	Wilayah	Aksi
1	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	BELUM DIVALIDASI	13 Januari 2022 Pukul 14:25	-	-	KABUPATEN BANYUWANGI	[Aksi]
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Jember	Penyusunan Dokumen SDA (Sistem Inovasi Daerah) Kabupaten Jember	BELUM DIVALIDASI	13 Januari 2022 Pukul 12:44	-	-	KABUPATEN JEMBER	[Aksi]
3	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara	Pengumpulan Data Peternakan Kabupaten Konawe Utara	BELUM DIVALIDASI	13 Januari 2022 Pukul 12:44	-	-	KABUPATEN KONAWA UTARA	[Aksi]
4	Bappeda Ogan Komering Ilir	Data Sekeloa Perencanaan Pembangunan	SUDAH DIPERBAIKI	12 Januari 2022 Pukul 11:57	-	-	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	[Aksi]

Tampilan Daftar Pengajuan Rekomendasi

G. Penambahan fitur penggantian wilayah pemroses

Fitur ini dibuat untuk mengakomodir penggantian wilayah pemroses pengajuan rekomendasi. Beberapa pengajuan rekomendasi oleh instansi daerah, melakukan kesalahan dalam memasukan cakupan kegiatan statistik sehingga pengajuan diterima oleh wilayah yang bukan semestinya. Oleh karena itu diperlukan mekanisme untuk memindahkan pengajuan rekomendasi ke pemroses yang sesuai dengan cakupan wilayah yang sebenarnya.



Tampilan Penggantian Wilayah Pemroses

H. Perbaikan kesalahan (error bugs)

Perbaikan kesalahan pada aplikasi antara lain: perbaikan pada paging dan filter daftar rekomendasi, perbaikan kesalahan pada formulir pengajuan kompromin, perbaikan pada dashboard monitoring, dan perbaikan kecil lainnya.

7.5 Pemberian Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan survei statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Organisasi

Perangkat Daerah (K/L/I/D). Pemberian layanan rekomendasi kegiatan statistik pada tahun 2021 dilaksanakan melalui aplikasi Romantik Online yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Mekanisme layanan rekomendasi statistik diawali dengan K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS dengan menggunakan instrumen FS3 (Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral) dan FP-KPA (Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi) melalui Romantik Online. Kemudian, BPS melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik untuk kemudian memberikan rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/I/D. Selanjutnya, K/L/I/D melaksanakan kegiatan statistik sesuai rekomendasi dari BPS serta menyerahkan hasil yang disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berupa publikasi dan metadata kepada BPS.

Selama tahun 2021, secara nasional BPS telah menerima sebanyak 1.305 pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dengan rincian 672 rekomendasi kegiatan survei dan 633 rekomendasi kegiatan kompilasi produk administrasi. Jumlah ini meningkat cukup banyak dibanding tahun 2020. Adapun dari 672 rekomendasi kegiatan survei yang diajukan, terdapat sebanyak 446 kegiatan survei yang dinyatakan layak. Sementara itu, untuk rekomendasi kegiatan kompilasi produk administrasi, terdapat 409 kegiatan yang dinyatakan layak dan diberikan rekomendasi oleh BPS. Sedangkan di BPS pusat hanya menerima sebanyak 11 pengajuan rekomednasi.

7.6 Pembinaan Statistik

7.6.1 Rapat Koordinasi Walidata Kementerian/Lembaga

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas sebagai pusat rujukan statistik serta penyediaan informasi statistik. Kegiatan statistik yang terbagi menjadi kegiatan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus, selanjutnya diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang mengatur tata kelola data di Indonesia. Sebagai pembina data statistik, BPS menyelenggarakan kegiatan Fullday Meeting Metadata Statistik Sektoral dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara statistik sektoral khususnya di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 September 2021 dan diikuti oleh 28 peserta dari BPS dan 74 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Kegiatan Fullday Meeting ini dimulai pada pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB setiap harinya. Acara diawali dengan pembukaan dan arahan dari Direktur Diseminasi Statistik, dilanjutkan pemaparan materi Implementasi Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia oleh perwakilan Sekretariat SDI Pusat. Setelah break memasuki acara utama yaitu Pemaparan Materi Metadata Statistik yang dilanjutkan diskusi dan praktek pengisian instrumen Metadata Statistik di masing-masing meja.



Dokumentasi Fullday Meeting Metadata Statistik

7.6.2 Penyusunan Modul Statistik Sektoral dan Pelatihan Statistik Sektoral Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021

Pada bulan Februari tahun 2021, Fungsi Rujukan Statistik dan fungsional statistisi ahli madya di Direktorat Diseminasi Statistik mulai menyusun modul untuk pembinaan statistik sektoral. Penyusunan modul terus dilanjutkan hingga akhirnya finalisasi dilakukan pada bulan Juli 2021. Modul yang disusun ialah,

1. Modul 1 Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik,
2. Modul 2 Langkah Praktis dalam Survei dan Kompilasi Produk Administrasi,
3. Modul 3 Aplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik,
4. Modul 4 Dasar-dasar Statistik.

Keempat modul yang telah disusun tersebut kemudian dikirim ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusdiklat BPS untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar pelatihan statistik sektoral. Pelatihan Statistik Sektoral Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang diselenggarakan Pusdiklat bekerjasama dengan Direktorat Diseminasi Statistik diselenggarakan pada 30 Agustus sampai dengan 15 Oktober 2021. Pelatihan tersebut melibatkan pengajar, penguji, dan coach dari Pusdiklat BPS, Direktorat Diseminasi Statistik, dan fungsional statistisi ahli utama BPS. Pelatihan tersebut diselenggarakan dengan metode Synchronous dan Asynchronous melalui Learning Management System Warung Kompetensi (LMS WARKOP) Pusdiklat BPS 2021.

Peserta pelatihan Statistik Sektoral Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) angkatan yang berasal dari BPS, Diskominfo, dan Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Satu angkatan terdiri dari 5 (lima) kelas dan setiap angkatan menempuh pembelajaran selama 5 (lima) hari. Setelah pembelajaran selesai, peserta selanjutnya dibentuk tim untuk membuat Rancangan Kegiatan Statistik (RKS) yang akan diimplementasikan pada tahun 2022. Setiap tim memiliki coach yang memberikan bimbingan kepada tim tersebut. Pada akhir rangkaian, dilakukan seminar terhadap RKS dimana dilakukan penilaian oleh penguji. Penutupan dari rangkaian pembelajaran, RKS, dan seminar RKS dilakukan pada tanggal 8 November 2021.



Modul 1 dan Modul 2



Modul 3 dan Modul 4



Seminar RKS Kab. Kayong Utara



Pembelajaran Saat Pelatihan

7.6.3 Asistensi Teknis/Technical Assistance terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral ke Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah

BPS sebagai Pembina Data Statistik memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pembinaan untuk penguatan statistik sektoral. Salah satu pembinaan yaitu memberikan asistensi teknis kepada Kementerian/Lembaga/OPD dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, baik dalam tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, maupun sekedar sharing knowledge terkait penyelenggaraan kegiatan statistik.

Pada tahun 2021, Fungsi Rujukan Statistik telah memberikan asistensi kepada Kementerian/Lembaga/OPD untuk menjadi pembicara maupun peserta dalam acara mereka dalam rangka sharing knowledge ataupun konsultasi terkait penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk didalamnya asistensi terkait penyusunan metadata statistik sesuai Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Beberapa Kementerian/Lembaga/OPD yang telah menerima asistensi adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Perpustakaan Nasional RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Kota Palu, dll.



Asistensi Bappeda Kota Palu



Asistensi Kemendesa PDTT



Asistensi Kementerian Perhubungan



Asistensi Kementerian Agama

7.7 Pelaksanaan SKD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. BPS sebagai salah satu penyelenggara layanan publik, melaksanakan kewajiban tersebut melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.

Secara rutin SKD dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Pada tahun 2021 SKD dilaksanakan pada 515 satuan kerja BPS, yaitu BPS Pusat, BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Kegiatan persiapan dilaksanakan pada periode Maret-Mei 2021 yang mencakup kegiatan perencanaan, perencanaan, pembangunan kuesioner, aplikasi, dan penyusunan buku panduan pencacahan dan pemeriksaan. Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan Petugas SKD untuk seluruh satker penyelenggara sampai dengan BPS Kabupaten/Kota. Pelatihan SKD dilaksanakan pada tanggal 27 Mei - 4 Juni 2021. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 7 Juni - 13 Agustus 2021 yang dilanjutkan dengan proses pengolahan, tabulasi, dan analisis Hasil SKD pada agustus sampai dengan Desember 2021.

Hasil SKD tahun 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi, yang diterbitkan secara serentak pada tanggal 23 Desember 2021. Publikasi "Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Tahun 2021" menyajikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data, termasuk indikator utama antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini secara umum merupakan laporan penyelenggaraan SKD yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.



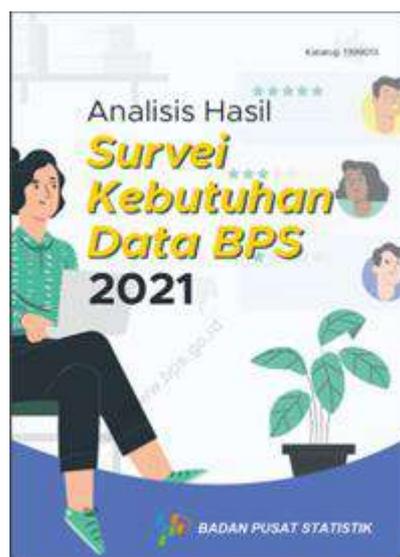
Pelatihan Petugas SKD 2021



Kuesioner SKD 2021



Buku Panduan Pencacahan dan Pemeriksaan SKD 2021



Publikasi Analisis Survei Kebutuhan Data BPS 2021

7.8 Pengembangan Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik

Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik diperuntukan untuk pendokumentasian pembinaan statistik yang dilakukan oleh BPS pusat maupun daerah. Aplikasi ini dapat diakses pada https://s.bps.go.id/dok_pembinaan. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan perekaman informasi pembinaan statistik yang telah dilakukan, seperti nama kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, narasumber, dan sebagainya. Selain itu, pengguna juga dapat mengupload file pendukung, diantaranya undangan, daftar hadir, notula, foto kegiatan, materi, lembar komitmen, dan file pendukung lainnya.

Pada tahun 2021, Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik tidak banyak mengalami perubahan. Aplikasi ini berada dalam tahap pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan yang dilakukan misalnya perbaikan aplikasi dari permasalahan yang terjadi saat penggunaan aplikasi ini. Contoh permasalahan tersebut yaitu saat perekaman informasi pembinaan statistik yang diinputkan tidak tersimpan dan file dokumentasi tidak terupload. Hal ini diatasi dengan memperbaiki source code aplikasi. Selain itu, terdapat penambahan ukuran maksimal file dokumentasi yang dapat diupload.

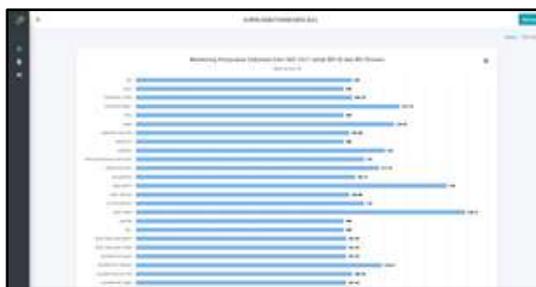


Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik

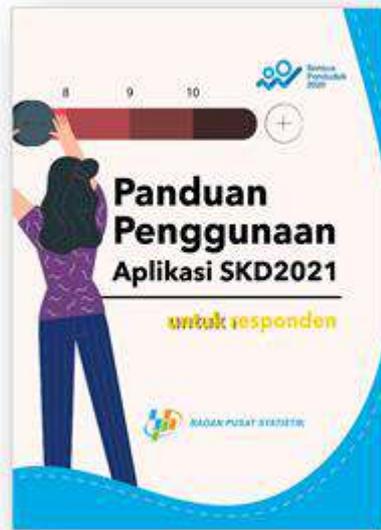
7.9 Pengembangan Aplikasi SKD Online

Survei Kebutuhan Data (SKD) 2021 dikelola dalam Aplikasi SKD 2021. Melalui aplikasi ini pengguna dapat mengelola petugas, melakukan pencacahan secara online, menginput hasil pencacahan manual, memantau pelaksanaan survei melalui dashboard, memeriksa hasil entri, mengolah hasil entri, mengunduh raw data, hingga membuat surat rekomendasi hasil SKD dan rencana tindak lanjutnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Aplikasi SKD 2021 dibuat dengan membangun ulang aplikasi, bukan dari pengembangan aplikasi SKD tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar aplikasi ini dapat mengakomodir perubahan-perubahan pada kuesioner SKD yang hampir selalu berubah setiap tahunnya. Meskipun demikian, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi SKD sebelumnya tetap ada di dalam aplikasi SKD 2021. Pada aplikasi ini terdapat perubahan pada tampilan aplikasi, penambahan fitur, dan perbaikan fitur dari aplikasi SKD sebelumnya. Misalnya pada fitur Dashboard di Aplikasi SKD 2021, grafik yang ditampilkan lebih beragam, tidak hanya menampilkan grafik tingkat kepuasan dan kepentingan tetapi juga grafik segmentasi konsumen, kepuasan layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kualitas data. Selain itu, Dashboard juga menampilkan angka ekstrim pada satker pengguna dan satker di bawahnya. Perbedaan lainnya adalah pada fitur login yang sudah menggunakan SSO secara penuh.



Aplikasi SKD 2021



Cover Publikasi Panduan Penggunaan SKD 2021 untuk Responden

7.10 Internalisasi Kegiatan Fungsi Rujukan Statistik

7.10.1 Internalisasi Metadata Statistik Dasar/Sektoral/Khusus Sesuai Standar dan Workshop Pelatihan WebEntri Metadata Statistik melalui aplikasi INDAH.

Dengan terbitnya Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, maka metadata pada tahun 2021 disusun sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Implementasi metadata statistik yang sesuai standar ditargetkan mempunyai output diantaranya tersedianya metadata statistik dasar dan sektoral/khusus yang sesuai dengan struktur baku dengan instrumen baru sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang menjadi point penting dalam kegiatan internalisasi yang dilakukan:

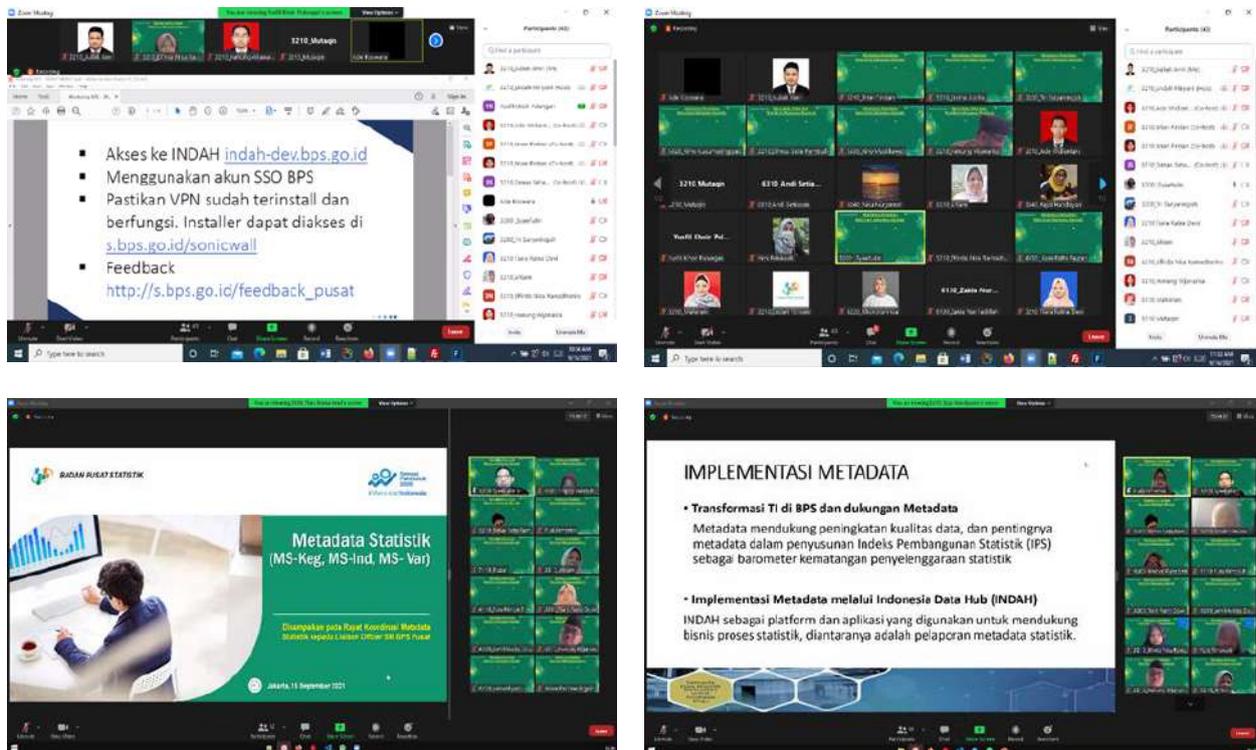
1. Metadata pada tahun 2021 disusun sesuai dengan petunjuk teknis Metadata. Dengan demikian instrumen Q-metadata yang digunakan sebelumnya digantikan dengan ketiga instrumen metadata sesuai peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020. Hal tersebut juga berkenaan dengan proses input metadata tahun 2021 yang sudah tidak dapat lagi menggunakan aplikasi SiRusa lama. Aplikasi entri metadata dengan instrumen yang baru menggunakan aplikasi "Indonesia Data Hub" (INDAH).
2. Pelatihan dan knowledge sharing mengenai penyusunan metadata sesuai standar dan penggunaan aplikasi dilaksanakan secara daring pada:

	Jadwal	Peserta
Pusat	Rabu-Kamis, 15-16 September 2021	Satu orang dari Subject Matter BPS Pusat (<i>Liaison Officer</i>)
Daerah	Senin-Selasa, 20-21 September 2021	Dua peserta IPDS tiap-tiap Provinsi dan satu peserta dari IPDS setiap Kabupaten/Kota.

3. Penggunaan aplikasi tersebut memberikan peranan yang berbeda dibandingkan metode sebelumnya, untuk masing-masing pelaksana, yaitu pada tahun ini subject matter yang

dalam hal ini diwakilkan oleh Liaison Officer (LO) yang ditunjuk, berperan dalam penyusunan sekaligus melakukan entri pada sistem tersebut, atau berperan sebagai operator untuk masing-masing fungsi.

4. Target-target yang diharapkan pada pelaksanaan metadata tahun 2021 adalah:
 - a. Delapan puluh persen (80%) metadata statistik dasar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Tujuh puluh persen (70%) K/L/I/D menyampaikan metadata sektoral sesuai standar; dan
 - c. Lima puluh persen (50%) tabel KOR pada Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) dilengkapi dengan metadata statistik.



Dokumentasi Metadata Statistik Dasar/Sektoral/Khusus Sesuai Standar dan Workshop Pelatihan WebEntri Metadata Statistik melalui aplikasi INDAH kepada Subject Matter BPS Pusat dan pelaksana layanan di beberapa BPS Provinsi.

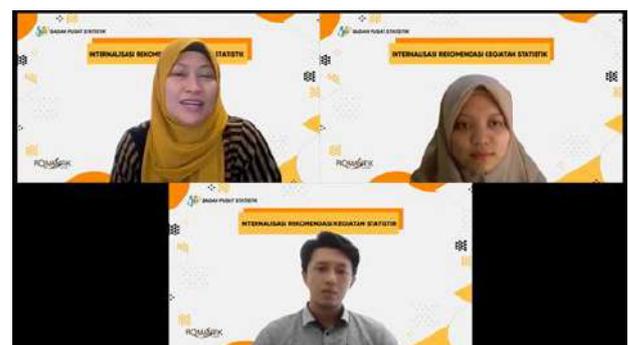
7.10.2 Internalisasi Rekomendasi Kegiatan Statistik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei telah diatur melalui Keputusan Kepala (Kepka) BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral. Ketentuan tentang pemberitahuan rencana survei sektoral ke BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi dan hasil kegiatan statistik sektoral dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik sektoral ke BPS dapat mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, bahwa BPS berkewajiban melakukan pembinaan statistik. BPS sebagai pembina data statistik memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada penyelenggara kegiatan statistik, diantaranya pembinaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) tentang pengajuan rancangan survei statistik sektoral melalui instrumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). Selama ini banyak K/L yang kesulitan dalam mengisi FS3 dikarenakan atribut-atribut yang ada di FS3 menggunakan istilah-istilah teknis statistik. Disamping itu, masih banyak K/L yang belum memahami secara teknis bagaimana mengisi FS3 secara online.

Dalam rangka memperkuat kapasitas BPS selaku pembina statistik dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik, sehingga dilakukan internalisasi di lingkungan BPS terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik.

Jadwal		Peserta
Pusat	Selasa, 16 Februari 2021	Peserta kegiatan ini adalah pejabat administrator dan pejabat fungsional madya di lingkungan BPS. IPDS Provinsi se-Indonesia
Daerah	Rabu, 04 Agustus 2021	



Dokumentasi Internalisasi Kegiatan Rekomendasi Kegiatan Statistik Kepada Pelaksana Layanan di Beberapa BPS Provinsi

7.10.3 Sharing knowledge serta evaluasi Kegiatan Fungsi Rujukan Statistik

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, BPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator kegiatan statistik di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS melakukan fungsi Koordinasi Integrasi, Standardisasi, dan Sinkronisasi. Dengan demikian, BPS harus dapat menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan statistik.

Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus oleh BPS Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia dilakukan untuk mewujudkan BPS sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan statistik. Proses input metadata tahun 2021 sudah tidak dapat lagi menggunakan aplikasi SiRusa lama. Aplikasi entri metadata dengan instrumen yang baru menggunakan aplikasi “Indonesia Data Hub” (INDAH). Oleh karena itu Fungsi Rujukan Statistik melakukan internalisasi kepada pelaksana layanan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Pada bulan September sampai dengan Desember 2021, Fungsi Rujukan Statistik melakukan perjalanan dinas dalam rangka sharing knowledge serta evaluasi penghimpunan metadata statistik sektoral dan disesuaikan Dengan kebutuhan dan kegiatan di provinsi/kabupaten/kota.

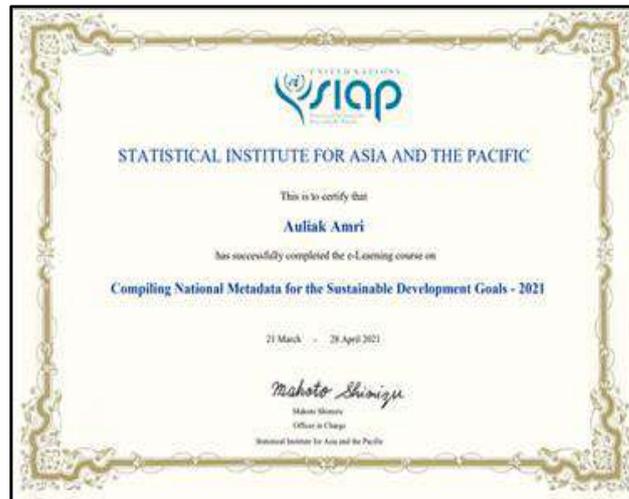


Dokumentasi Internalisasi Kegiatan Fungsi Rujukan Statistik kepada pelaksana layanan di beberapa BPS Provinsi

7.11 Pengembangan SDM (kursus metadata)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang wajib terus dilakukan, terutama dalam era perkembangan teknologi saat ini yang terus berkembang memaksa

sumber daya manusia juga terus berkembang mengikutinya. Fungsi Rujukan Statistik sebagai unit kerja yang menangani metadata di Badan Pusat Statistik juga turut mengembangkan ilmu pegawainya terkait metadata dengan mengikuti kursus Compiling National Metadata for the Sustainable Development Goals dari United Nation for the Asia and Pacific (UNSIAP). Sebanyak 13 pegawai Fungsi Rujukan Statistik mengikuti kursus yang diselenggarakan dari 22 Maret sampai dengan 28 April 2021.



Sertifikat kursus Compiling National Metadata for the SDGs

Lampiran 8 Laporan Kegiatan Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik

8.1 Upaya Pengembangan TI (E-Government)

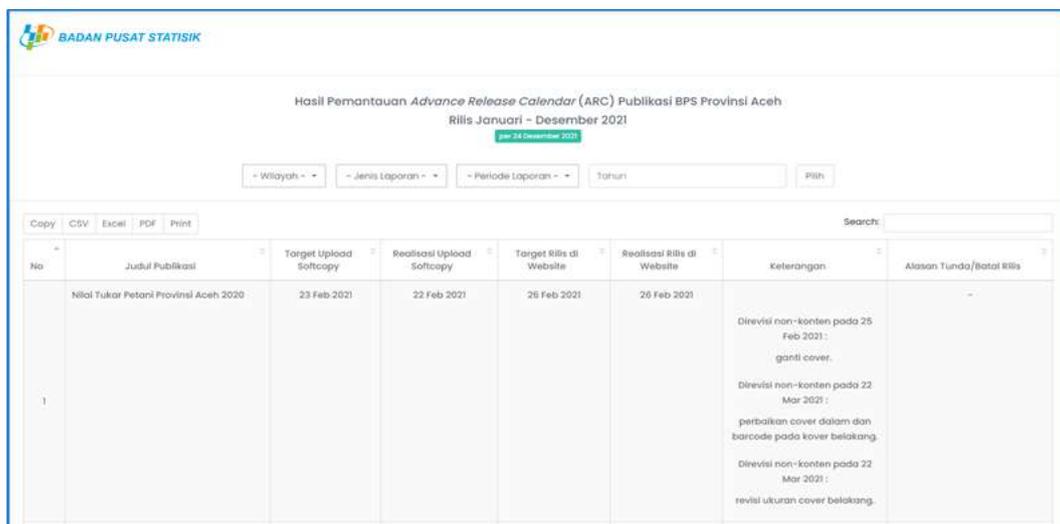
Salah satu upaya Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik untuk peningkatan kualitas dan layanan publikasi dan kompilasi statistik adalah dengan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, dengan mengembangkan sistem guna mendukung kegiatan layanan publikasi dan kompilasi statistik. Di tahun 2021, Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik mngembangkan dan memelihara 5 (lima) aplikasi pendukung layanan publikasi dan kompilasi statistik sebagai berikut:

8.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Portal Publikasi

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Portal Publikasi dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja kegiatan publikasi yang dilakukan BPS. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Portal Publikasi oleh Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik dilakukan dalam upaya memudahkan dan menyederhanakan proses penerbitan publikasi, pengelolaan metadata dan *softcopy* publikasi, dan juga monitoring dan evaluasi publikasi.

Di tahun 2021 dilakukan perjalanan supervisi kegiatan publikasi ke BPS provinsi yang salah satu agendanya adalah untuk membahas kendala-kendala dalam penggunaan Sistem Portal Publikasi dan masukan untuk pembaharuan-pembaharuan agar sistem menjadi lebih baik. Dengan kondisi pandemik, diskusi perkembangan Sistem Portal Publikasi juga dilakukan melalui media *online* seperti Whatsapp Group.

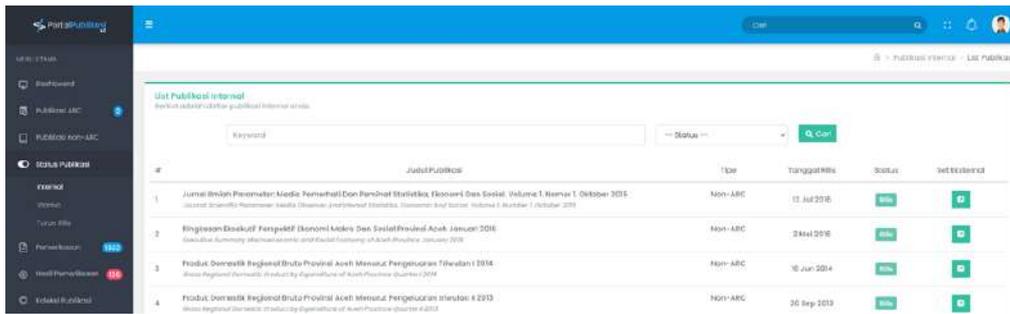
Beberapa perubahan pada Sistem Portal Publikasi dilakukan karena adanya perubahan aturan dan kebijakan pada kegiatan publikasi yang dikarenakan perubahan struktur organisasi di BPS di tahun 2021. Salah satu perubahan ini adalah aturan penomoran publikasi dan pergantian akun menjadi akun eselon 2. Selain itu juga dilakukan pengembangan terhadap fitur portal publikasi antara lain: monitoring dan evaluasi publikasi yang sudah dirilis tahun-tahun sebelumnya, penambahan submenu manajemen status publikasi, edit SPRP, dan perubahan mekanisme pemeriksaan publikasi.



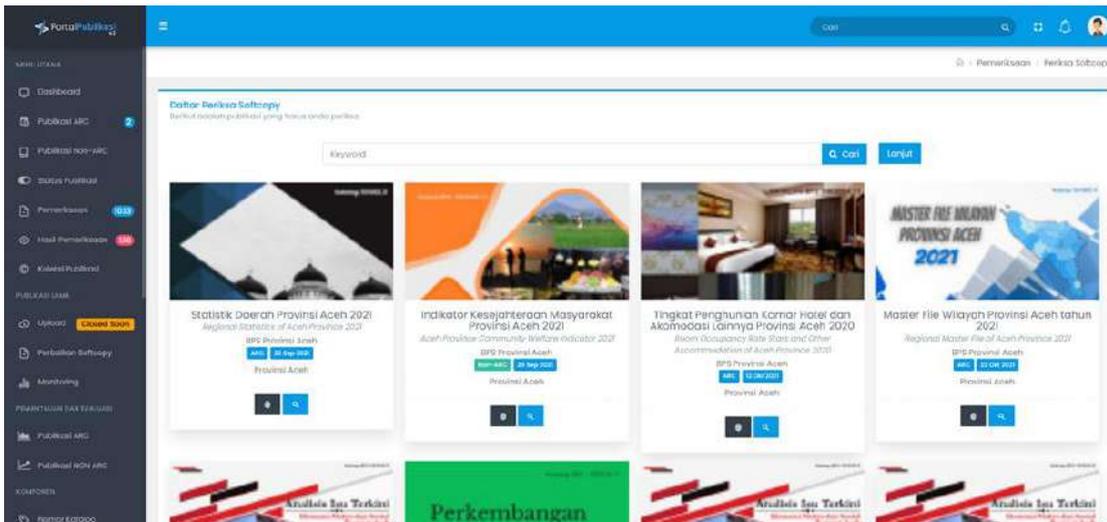
The screenshot shows the 'Hasil Pemantauan Advance Release Calendar (ARC) Publikasi BPS Provinsi Aceh' interface. It includes a search bar, filter buttons for 'Wilayah', 'Jenis Laporan', and 'Periode Laporan', and a table with the following data:

No	Judul Publikasi	Target Upload Softcopy	Realisasi Upload Softcopy	Target Rilis di Website	Realisasi Rilis di Website	Keterangan	Alasan Tunda/Batal Rilis
1	Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh 2020	23 Feb 2021	22 Feb 2021	26 Feb 2021	26 Feb 2021	Direvisi non-konten pada 25 Feb 2021 : ganti cover. Direvisi non-konten pada 22 Mar 2021 : perbaiki cover dalam dan barcode pada cover belakang. Direvisi non-konten pada 22 Mar 2021 : revisi ukuran cover belakang.	--

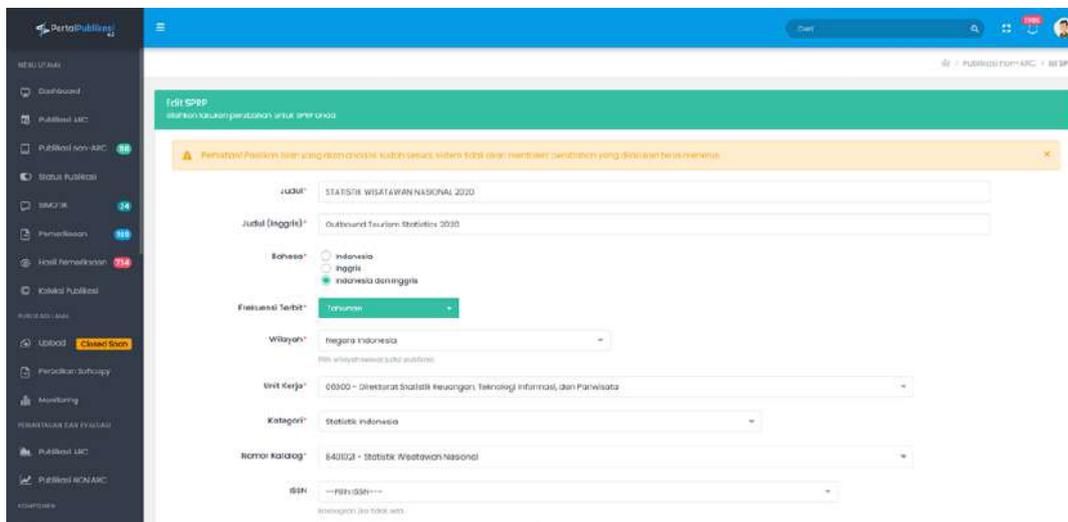
Kolom filter tahun pada halaman hasil pemantauan publikasi ARC



Menu Status Publikasi



Halaman Pemeriksaan Publikasi BPS Provinsi Aceh pada akun BPS Provinsi Aceh



Halaman Edit SPRP

8.1.2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK)

Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK) adalah sistem yang dibangun untuk memonitor mekanisme penerbitan publikasi. Pengguna yang terlibat pada

SIMOTIK ini terdiri dari subject matter pembuat publikasi; Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik; Bagian Percetakan, Arsip, dan Ekspedisi; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan.

Pada tahun 2021, sehubungan dengan kondisi pandemi dimana aktivitas pencetakan sangat dikurangi, SIMOTIK melakukan penyesuaian pada aktivitas upload untuk publikasi yang tidak dicetak. Beberapa perubahan/penambahan fitur lain yang terjadi pada SIMOTIK selama tahun 2021 adalah pengajuan cetak Jilid ke-2, pengajuan cetak publikasi daerah, fasilitas edit mailing oleh petugas, revisi softcopy dan berkas pencetakan, serta penyesuaian akun pengelolaan publikasi menjadi akun eselon 2 untuk mengikuti perubahan struktur organisasi BPS.

Form Upload untuk Publikasi tidak dicetak

Form Upload untuk Publikasi dicetak

Form Pengajuan Cetak

Form Pengajuan Cetak Publikasi Daerah

Form Kelengkapan Berkas Pengajuan Cetak

Form Login SIMOTIK

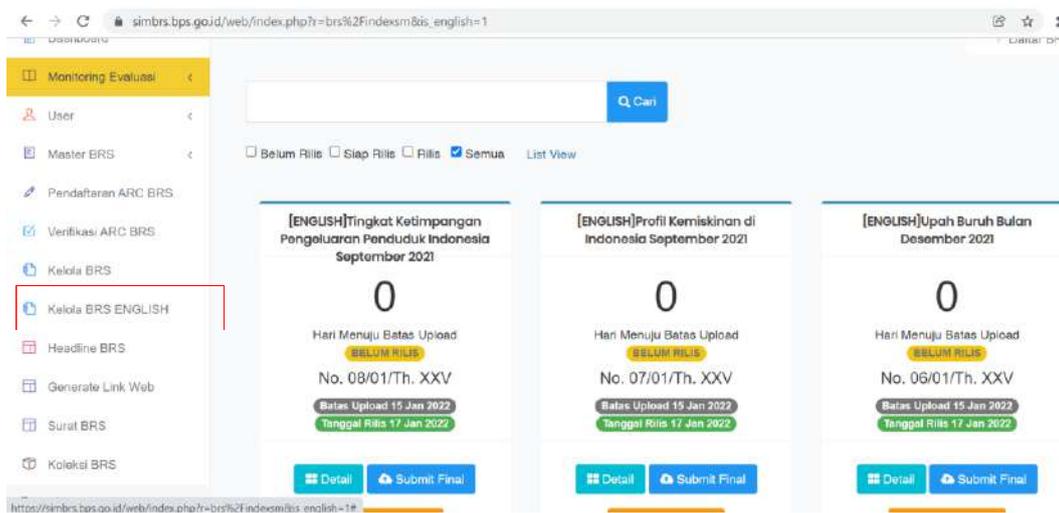
8.1.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berita Resmi Statistik (SIMBRS)

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS) bertujuan untuk memudahkan pegawai BPS dalam melakukan pengelolaan terhadap penyusunan naskah Berita Resmi Statistik (BRS). Sistem ini baru diimplementasikan dan disosialisasikan di tahun 2019. Sistem ini dibuat karena adanya masalah-masalah pada mekanisme berjalan saat penyusunan naskah BRS. Sistem ini dibuat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan:

- Untuk melihat *timeline* pengerjaan BRS, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat melihat sejauh mana BRS sudah dikerjakan.
- Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi BRS secara efektif dan efisien.
- Memberikan notifikasi kepada pihak terkait yang bertanggung jawab selama pengerjaan BRS. Dengan demikian, waktu pengerjaan BRS akan semakin efektif karena petugas dapat memberi dan menerima respon lebih cepat.
- Mekanisme persetujuan naskah (*Approval*) dari pimpinan agar pencetakan yang dilakukan oleh penggandaan menjadi efisien.

Pengembangan sistem yang dilakukan pada tahun 2021 adalah penambahan menu kelola Berita Resmi Statistik dalam Versi Bahasa Inggris dan penambahan menu *generate link QR code*. Selain itu, pada tahun 2021 ini juga dilakukan pengembangan untuk SIMBRS versi 2 dengan menambahkan beberapa fitur seperti:

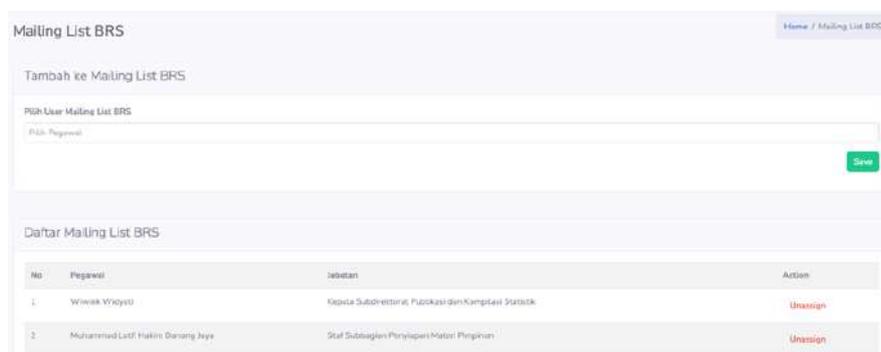
- a. Manajemen LBDSE
- b. *Login SSO BPS*
- c. *Assign User* ke Unit Kerja lebih dinamis.
- d. Multi User di Unit Kerja.
- e. Assign Unit Kerja ke BRS dan LBDSE lebih dinamis.
- f. BRS dan LBDSE yang terintegrasi.
- g. Template Notifikasi yang dinamis.
- h. Mailing List BRS yang dinamis.
- i. Improvement di *Whatsapp Service*.



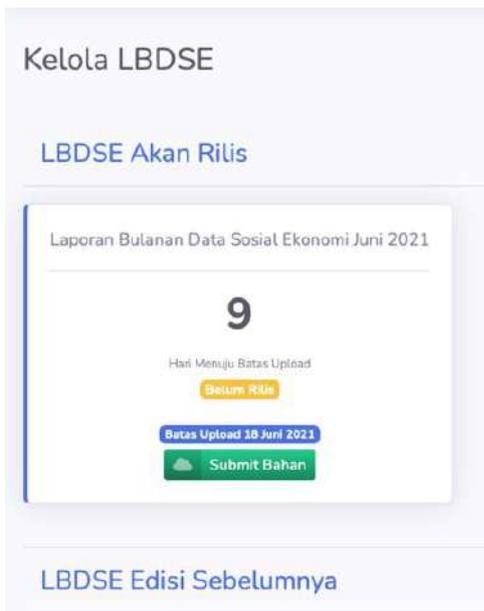
Fitur kelola BRS versi Bahasa Inggris



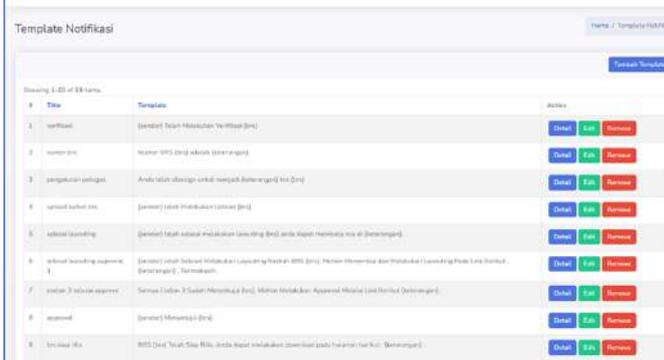
Fitur generate link QR Code



Mailing List BRS



Fitur kelola LBDSE



Template Notifikasi

Saat ini, SIMOTIK dan SIMBRS digunakan di lingkungan BRS pusat. Untuk mengetahui kebutuhan pengguna kedua sistem tersebut, maka pada 16–18 Juni 2021 dilakukan pertemuan dalam rangka evaluasi SIMOTIK dan SIMBRS. Hasil dari pertemuan ini memberikan masukan untuk pengembangan SIMOTIK dan SIMBRS ke depan.



Pembahasan Evaluasi SIMOTIK dan SIMBRS

8.1.4 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI)

Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) dibangun dalam upaya mengharmonisasi kegiatan pengumpulan data DDA dengan rencana dan strategi pembangunan Satu Data Indonesia (SDI). Sebagai langkah awal, BPS berfokus pada konsistensi angka yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) untuk data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) untuk data level regional/daerah. Melalui SIMDASI, sinkronisasi data dapat ditingkatkan karena adanya standarisasi data, mekanisme pemeriksaan data yang sesuai standar, mekanisme interoperabilitas untuk mengurangi kesalahan mengambil data, dan fitur untuk melihat tingkat dan masalah dalam sinkronisasi.

Pada awal tahun 2021 SIMDASI melakukan updating sistem dari versi 2 ke versi 3. Kemudian pada akhir tahun 2021, SIMDASI kembali melakukan updating Sistem ke versi 3.1. Beberapa pengembangan yang dilakukan SIMDASI selama tahun 2021 antara lain: melakukan standarisasi pembabakan berdasarkan buku SI/DDA dan MMS, memperbaiki service API, menambahkan kolom angka sinkron pada menu capaian SIMDASI, memperbaiki bugs, otomatisasi metadata dan sinkronisasi, dan menambahkan pembagian metode kompilasi.

#	Judul	Kode	Kode Provinsi	Kode Kab/Kota	K/L Penanggung Jawab	Sumber
Geografi dan Iklim <i>Geography and Climate</i>						
1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan <i>Total Area and Number of Islands by Province/Regency/Municipality/Subdistrict</i>	111	111	111	Badan Pusat Statistik	Desentralisasi
Pemerintahan <i>Government</i>						
2	Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota <i>Number of Subdistricts by Province/Regency/Municipality</i>	213	211		Badan Pusat Statistik	Sentralisasi
3	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan <i>Number of Villages/Kelurahan by Province/Regency/Municipality/Subdistrict</i>	214	212	211	Badan Pusat Statistik	Sentralisasi

Pembabakan berdasarkan buku SI/DDA dan MMS

Sinkronisasi					Export
206	2019	0.00	Sentralisasi	17 Des 2021 - 09:50 PM	
207	2019	0.00	Sentralisasi	17 Des 2021 - 09:50 PM	
208	2020	0.00	Sentralisasi	17 Des 2021 - 09:50 PM	
Total					
	Desentralisasi	37.40			
	Sentralisasi	65.68			
	Interoperabilitas	99.66			
	Angka Sinkron	73.30			

Penambahan pembagian metode kompilasi

```

{
  "data": [
    {
      "id": "0TJzVUFu8khLQUiITVJUn45Zko3Q109",
      "bab": "Geografi dan Iklim",
      "bab_en": "Geography and Climate",
      "subject": "Keadaan Geografi",
      "subject_en": "Geography Condition",
      "mes_id": 516,
      "mes_subject": "Statistik Lingkungan Hidup Dan Multi-domain",
      "tabel": [
        "UFp9MwJZOVZlZTjnc1pXai8hDV1hPQT09"
      ]
    }
  ],
  {

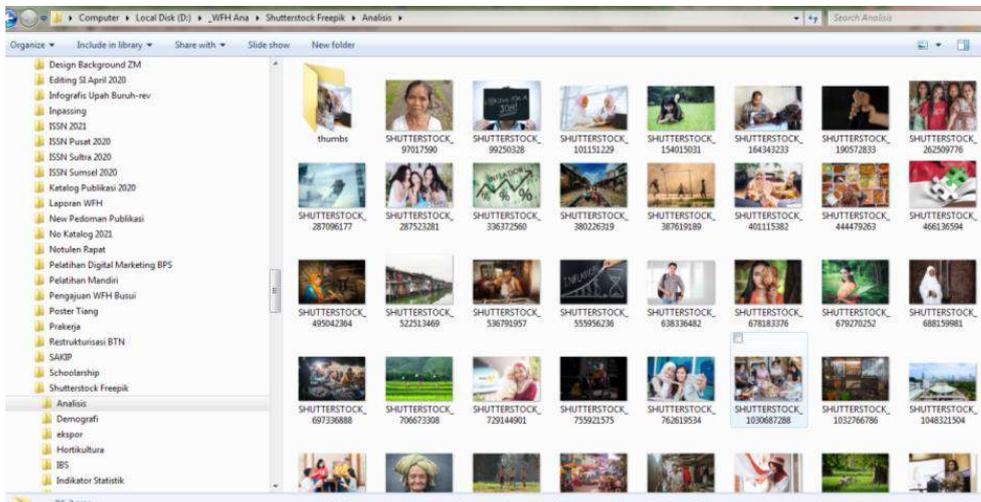
```

Pembuatan service API untuk menginformasikan id yang digunakan

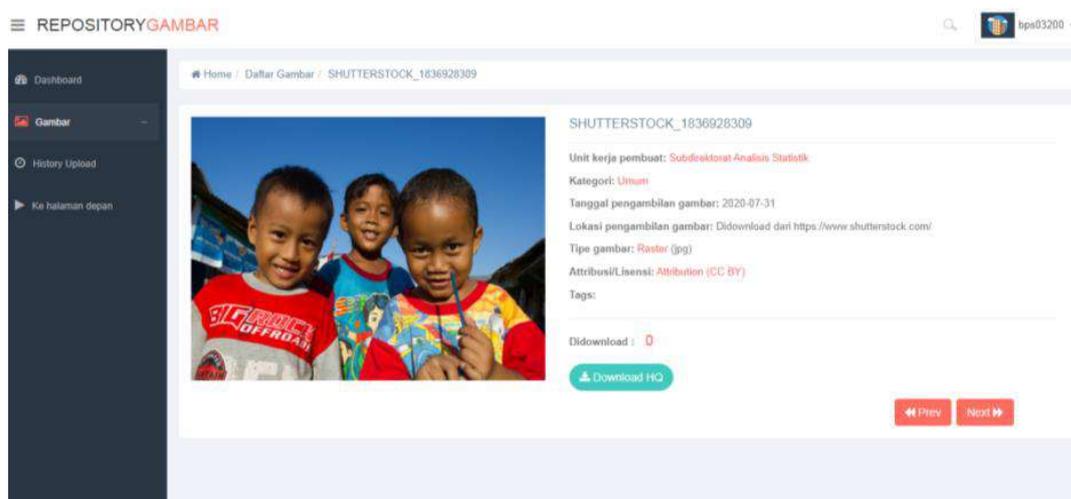
8.1.5 *Repository gambar*

Sistem *repository* gambar adalah sistem yang dibangun dengan tujuan sebagai tempat penyimpanan gambar (foto) yang terpadu, sehingga BPS pusat maupun daerah dapat saling berbagi pakai gambar tersebut. Gambar pada sistem ini diharapkan dapat melengkapi basisdata maupun sebagai referensi untuk berbagai tujuan contoh untuk pembuatan desain cover, desain halaman pembatas publikasi, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021 dilakukan maintenance sistem meliputi *refresh* sistem/penambahan fungsi dan penambahan koleksi gambar. Untuk menambah koleksi gambar pada sistem ini, dilakukan pengadaan gambar yang berupa akses satu tahun gambar dari *Shutterstock* dan *Freepik*. Dengan dilakukan pengadaan gambar tersebut, diharapkan kualitas dan pemanfaatan foto atau gambar untuk desain cover maupun halaman pembatas setiap topik dalam publikasi BPS menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu, juga berguna dalam pembuatan booklet, leaflet, dan poster agar kualitas hasil desainnya lebih baik.



Gambar dari shutterstock yang diunggah ke system



Gambar yang diupload bisa diunduh oleh unit kerja lain

8.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas publikasi BPS, salah satunya dengan melakukan pengembangan SDM dalam mengemas dan menghasilkan publikasi. Berbagai bentuk pengembangan SDM yang sudah dilakukan fungsi publikasi dan kompilasi statistik selama tahun 2021 adalah:

8.2.1 Pelatihan Menulis Berita Statistik Dalam Bahasa Inggris

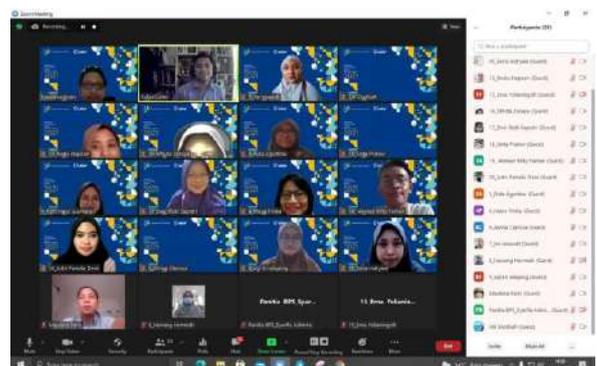
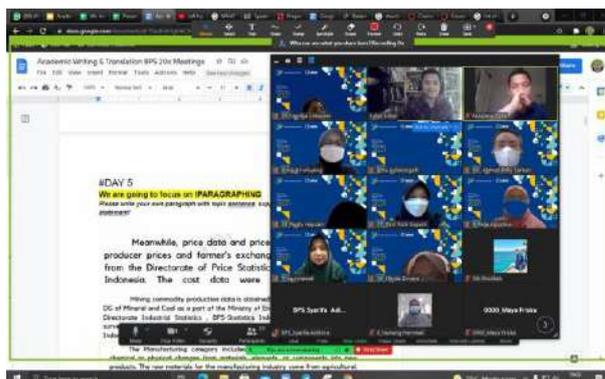
Visi misi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi yang baru tersebut BPS berusaha berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Sering dengan Visi BPS tersebut, maka peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang akan didiseminasikan harus menjadi salah satu faktor yang mendapatkan perhatian. Secara rutin BPS telah menyajikan indikator strategis hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dikemas dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) dan diseminasikan melalui kegiatan press release maupun website BPS.

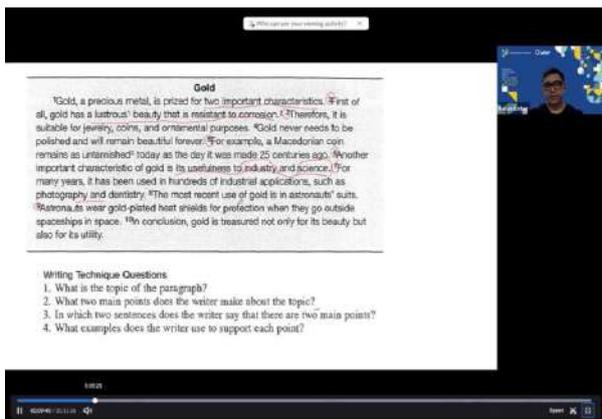
Dalam rangka peningkatan eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik yang berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyajikan Berita Resmi Statistik dalam versi Bahasa Inggris. Untuk mendukung upaya penyajian BRS dalam Bahasa Inggris, Direktorat Diseminasi Statistik melaksanakan pelatihan menulis Berita Resmi Statistik dalam Bahasa Inggris yang diikuti oleh pegawai dari unit kerja produsen BRS. Melalui pelatihan ini diharapkan penulisan BRS dalam Bahasa Inggris sesuai dengan tata bahasa yang berlaku dapat segera diwujudkan.

Pelatihan Penulisan dalam Bahasa Inggris yang dilakukan ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

- Meningkatkan kemampuan dalam penulisan BRS dan publikasi yang sesuai dengan teknik dan kaidah penulisan Bahasa Inggris yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh pengguna data.
- Meningkatkan kemampuan menulis Bahasa Inggris yang efektif.
- Meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna.

Dikarenakan masa pandemi, pelatihan dilakukan secara daring dengan memperhatikan jadwal WFH/WFO pegawai yang telah disusun dan mematuhi protokol kesehatan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober s.d 12 November 2021 menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

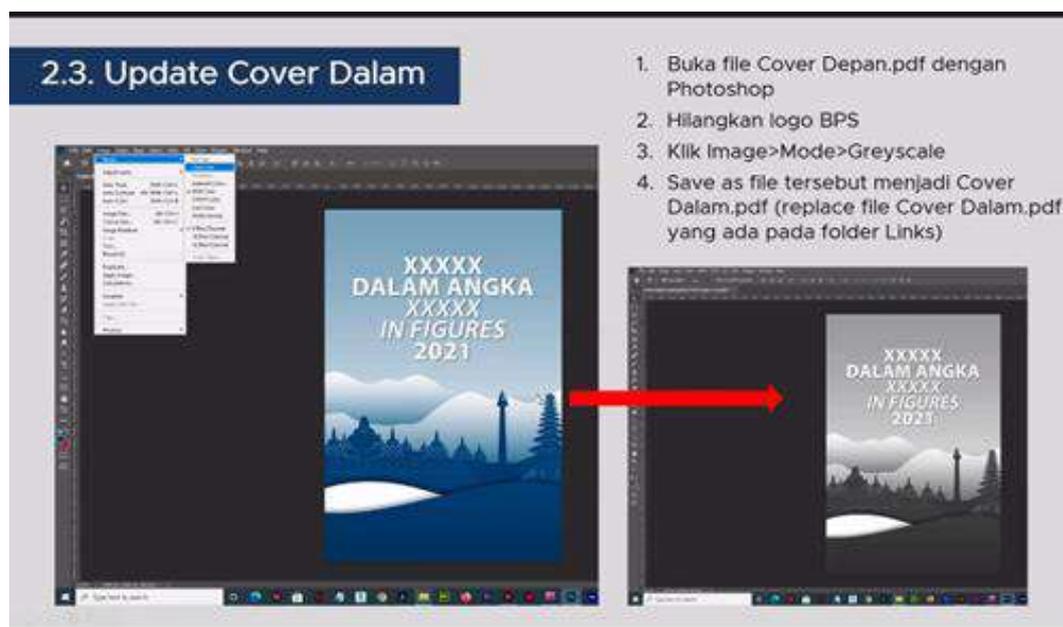




Dokumentasi Pelatihan Bahasa Inggris

8.2.2 Webinar Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) 2021

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas, sejalan dengan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan sampai dengan wilayah terkecil secara komprehensif dan terpadu. Sumber data yang digunakan diperoleh dari sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. Sebagai wujud komitmen BPS dalam menyediakan data perencanaan pembangunan yang up to date, BPS melakukan peningkatan penyajian publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dari berbagai sisi, seperti waktu rilis publikasi yang lebih cepat dengan tetap menjaga kualitas data yang disajikan, penyeragaman template tabel dan publikasi untuk rilis Daerah Dalam Angka seluruh Indonesia, serta sosialisasi dan pelatihan template publikasi DDA tersebut. Webinar penyusunan publikasi DDA 2021 dilakukan pada 26 Januari 2021 yang diikuti oleh seluruh perwakilan Fungsi DLS BPS Provinsi dan Fungsi IPDS BPS Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Dokumentasi Webinar Penyusunan Publikasi DDA 2021:

8.2.3 Pelatihan Penggunaan Template Wajah Baru Berita Resmi Statistik (BRS) untuk Subject Matter Penyusun BRS di BPS Pusat dan BPS Daerah

Penyajian BRS dalam versi bahasa Inggris serta perwajahan baru BRS yang lebih menarik dilakukan guna memenuhi kebutuhan pengguna data yang semakin dinamis. Dalam perwajahan baru BRS, dilakukan standarisasi template BRS yang diimplementasikan untuk seluruh BRS yang rilis baik di tingkat BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Implementasi QR Code pada halaman depan, infografis, dan halaman belakang BRS, memungkinkan pengguna BRS dapat mengakses secara langsung pada halaman BRS yang dimaksud di website BPS. Selain itu, otomatisasi penomoran tabel, standarisasi struktur paragraf dan standarisasi infografis BRS juga memudahkan subject matter BRS dalam menyusun BRS dan memudahkan pengguna BRS dalam membaca dan memahami informasi yang tersaji dalam BRS.

Pelatihan penggunaan template wajah baru BRS dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pada 18 Agustus 2021 yang diikuti oleh perwakilan seluruh subject matter penyusun BRS di BPS Pusat serta tim kompilasi BRS Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik dan tahap kedua pada 20 Agustus 2021 yang diikuti oleh perwakilan Fungsi DLS BPS Provinsi dan perwakilan Fungsi IPDS BPS Kabupaten/Kota yang melakukan rilis BRS.

Struktur Layout

Text box/frame text
Terus berlanjut, tidak discontinued

Tabel box
Satu kesatuan frame dengan judul tabel dan keterangan/sumber tabel

Grafik box
Layer grafik yang berasal dari Excel, Grafik dan excel tanpa background color, layer grafik excel berada di depan layer warna transparan. Keterangan sumber berada dalam box grafik/gambar

Tabel 1 TPK Menilai Kinerja Belajar di Indonesia Mei 2021

Kategori Belajar	TPK (%)				Perubahan Maret 2021- Mei 2021	Perubahan Maret 2021- Mei 2021
	Mei 2021	Apr 2021	Mar 2021	Mei 2021		
1. Belajar 1	82,8	73,9	82,8	82,8	-1,3	-1,3
2. Belajar 2	81,8	81,8	81,8	81,8	-1,2	-1,2
3. Belajar 3	83,1	84,8	83,1	83,1	-1,3	-1,3
4. Belajar 4	83,8	83,8	83,8	83,8	-1,6	-1,6
5. Belajar 5	83,9	83,8	83,8	83,8	0,4	0,4
Kategori Belajar	83,6	83,8	83,8	83,6	0,4	0,4

Tabel 2 Perbandingan TPK-HSN/Kualitas Belajar di Indonesia Januari-Mei 2021

Kategori Belajar	TPK (%)					Perubahan Januari- Mei 2021
	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	
1. Belajar 1	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	0,0
2. Belajar 2	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	0,0
3. Belajar 3	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	0,0
4. Belajar 4	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	0,0
5. Belajar 5	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0,0
Kategori Belajar	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	0,0

Tabel 3 Rata-rata Lulus Mengajar Lulus Belajar dan Indikator

Kategori Belajar	Rata-rata Lulus Mengajar Lulus Belajar (%)					Perubahan Januari- Mei 2021
	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	
1. Belajar 1	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	0,0
2. Belajar 2	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	0,0
3. Belajar 3	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	0,0
4. Belajar 4	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	0,0
5. Belajar 5	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	0,0
Kategori Belajar	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	0,0

Dokumentasi Pelatihan Penggunaan Template Wajah Baru BRS

8.3 Kegiatan Perwajahan Publikasi

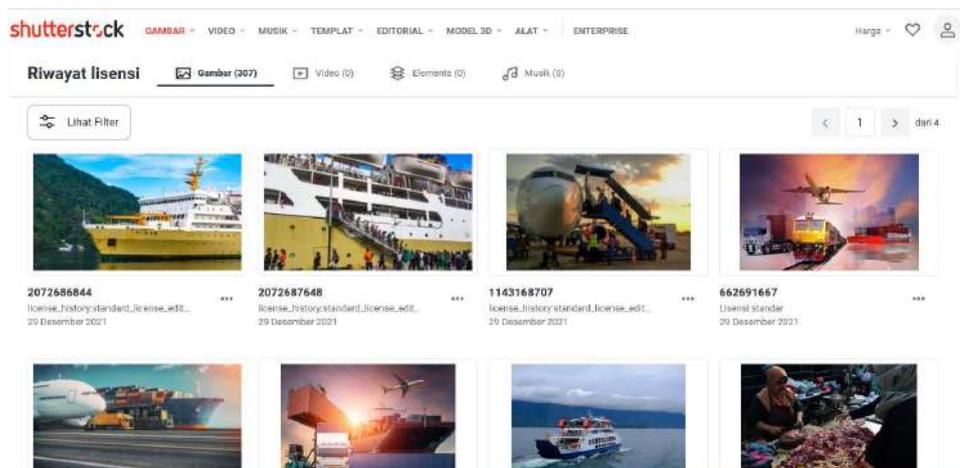
8.3.1 Pengadaan Akun Berlangganan Desain Grafis

Badan Pusat Statistik, sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju terus berupaya untuk dapat mendiseminasikan data statistik tersebut secara lebih efektif, mudah dipahami dalam bentuk konten visual yang lebih menarik. Gambar-gambar atau foto-foto yang eye-catching untuk kebutuhan perwajahan publikasi dalam cover publikasi ataupun dalam isi pembahasan publikasi untuk lebih mendukung materi/teks yang disajikan sangat diperlukan.

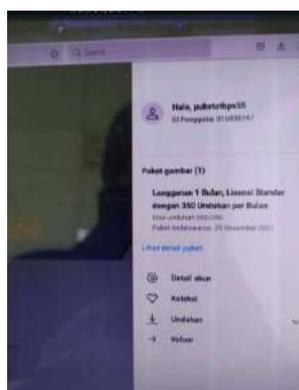
Untuk menambah koleksi gambar dan elemen desain grafis yang lain, dilakukan pengadaan akun berlangganan desain grafis ditahun 2021 yang berupa: akses satu tahun berupa elemen graphics, fonts, templates dan stock video, music tracks dan sound effects, dan elemen lainnya dari Freepik dan Envato Elements; serta akses 1 bulan untuk 350 gambar dari Shutterstock. Dengan dilakukan pengadaan akun berlangganan desain grafis untuk koleksi gambar dan elemen lain seperti graphics, fonts, 3D, templates dan stock video, music tracks dan sound effects tersebut, diharapkan kualitas dan pemanfaatan foto atau gambar untuk halaman pembatas setiap topik, cover dalam publikasi BPS menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu, juga berguna dalam pembuatan booklet, leaflet, poster dan video agar kualitas hasil desainnya lebih baik.

Screenshot Pengadaan Akun Berlangganan Desain Grafis:

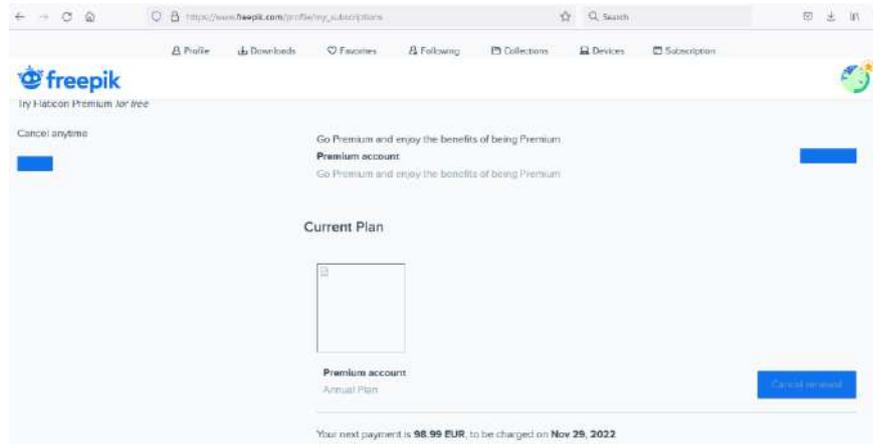
a. Shutterstock



b. Envato Elements



c. Freepik



Screenshoot contoh foto-foto dari shutterstock

8.3.2 Peluncuran Wajah Baru Berita Resmi Statistik

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban menyebarluaskan hasil kegiatannya kepada publik. Salah satu produk data BPS yang wajib disebarluaskan adalah Berita Resmi Statistik (BRS). BRS merupakan media resmi penyebarluasan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS. BRS dibuat dalam beberapa topik atau materi yang memuat ringkasan statistik dari masing-masing unit kerja terkait. Penyebarluasan BRS telah mengalami berbagai perubahan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik bahwa pelaksanaan teknis penyebarluasan berita resmi statistik ditetapkan oleh Kepala BPS.

BPS selalu berkomitmen menjadi Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dengan mengemban misi mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional, kualitas penyebarluasan Berita Resmi Statistik baik dari sisi perwajahan maupun konten BRS senantiasa terus ditingkatkan. Peluncuran wajah baru BRS dilaksanakan pada 1 Oktober 2021 bertepatan dengan rilis Berita Resmi Statistik 1 Oktober 2021.

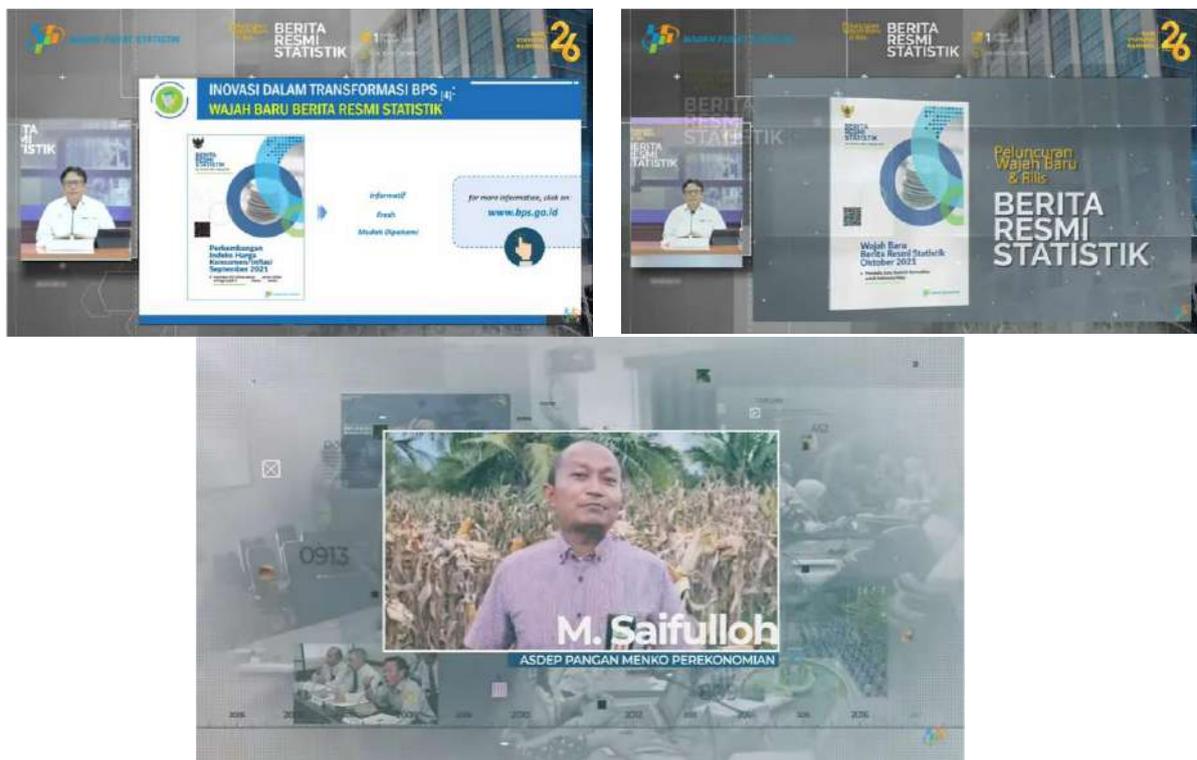


Foto-Foto Kegiatan Peluncuran Wajah Baru BRS

8.4 Kegiatan Kompilasi Naskah

8.4.1 Penyusunan publikasi Statistik Indonesia

Penyusunan publikasi Statistik Indonesia dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publikasi dengan memberikan informasi yang lengkap dan efektif mengenai data statistik kepada pengguna data BPS. Statistik Indonesia merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim,

pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi, pertanian, pertambangan energi, industri, konstruksi, pariwisata, transportasi komunikasi serta data perekonomian lainnya di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat provinsi dan internasional untuk melihat perbandingan antarwilayah dan antarnegara.

Publikasi Statistik Indonesia (SI) 2021 dirilis pada Februari 2021. Hal ini sebagai komitmen BPS untuk penyediaan data dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai profesi. Adapun untuk meningkatkan kualitas data pada publikasi Statistik Indonesia dilakukan FGD dengan Kementerian dan Lembaga yang membahas mengenai data/informasi yang akan disajikan di publikasi Statistik Indonesia. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Statistik Indonesia 2021 dan persiapan penyusunan Statistik Indonesia 2022, diadakan pertemuan trilateral antara perwakilan kementerian/lembaga penyedia data SI, Subject Matter penanggung jawab, dan Direktorat Diseminasi Statistik pada 13-15 Oktober 2021. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan kualitas data yang ada pada SI dan Daerah Dalam Angka.



Dokumentasi FGD Penyusunan SI-DDA 2022

8.4.2 Penyusunan publikasi Statistik Indonesia 2021 dalam Infografis

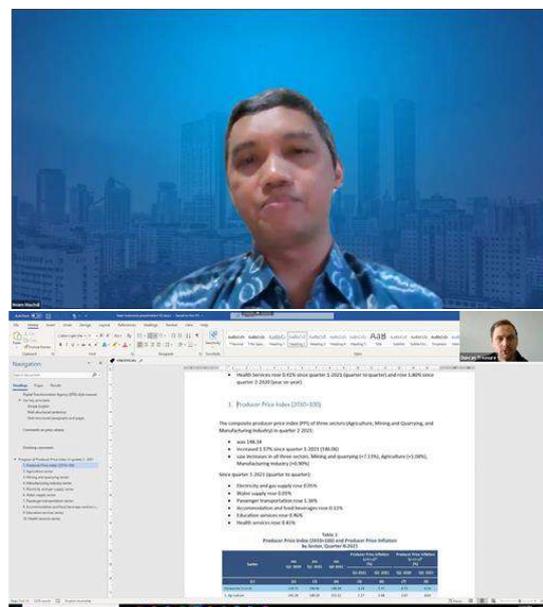
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publikasi, fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik pada tahun 2021 menyusun publikasi Statistik Indonesia 2021 dalam Infografis. Publikasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna data dalam memahami data yang disajikan pada Statistik Indonesia 2021. Publikasi ini juga menggambarkan

visualisasi data Statistik Indonesia 2021 menurut wilayah, yang divisualisasikan dengan peta wilayah Indonesia menurut provinsi.

8.4.3 Penyusunan BRS dan publikasi Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE)

Penyusunan BRS dan publikasi Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) setiap bulan untuk memberikan informasi mengenai data-data penting yang dihasilkan oleh BPS. Dalam penyusunan publikasi ini dilakukan koordinasi antara subject matter dan tim tata naskah publikasi, untuk menghasilkan publikasi yang lebih berkualitas (akurat dan tepat waktu).

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) menyajikan beragam jenis data dan informasi yang mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS berasal dari hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia. Keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (official statistics) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada Oktober 2021, dilakukan peluncuran BRS dengan wajah baru. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan menambahkan QR code pada halaman depan, belakang, dan infografis BRS. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna data, pada tahun 2021 dilakukan kajian dan latihan untuk penyusunan BRS dalam bahasa Inggris. Selain itu, juga diadakan workshop secara daring dengan mengundang pembicara dari Australian Bureau of Statistics (ABS). Pada workshop tersebut dilakukan review terhadap naskah BRS versi Bahasa Inggris yang telah disusun oleh BRS.





Dokumentasi Workshop dengan ABS

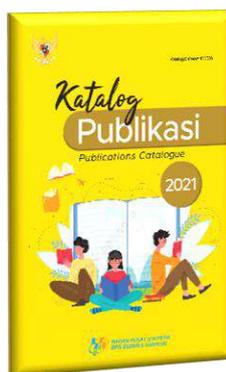
Sebagai tindak lanjut dari saran yang diberikan ABS dan untuk menggali kebutuhan pengguna akan BRS, pada 9 November 2021 dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* antara perwakilan kementerian/lembaga yang rutin memanfaatkan BRS, *subject matter* produsen data BRS, dan Direktorat Diseminasi Statistik.



FGD BRS

8.4.4 Penyusunan Buku katalog publikasi

Buku katalog publikasi disajikan untuk memberikan informasi daftar kumpulan publikasi BPS yang terbit setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ini, dilakukan penyusunan buku Katalog Publikasi kembali oleh Fungsi Publikasi dan Kompilasi Statistik. Pada buku Katalog Publikasi 2021 dilakukan inovasi dengan menambahkan *QR code* pada setiap judul publikasi BPS. *QR code* tersebut langsung menuju halaman unduh publikasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pengguna data jika ingin langsung mengunduh publikasi tertentu.



Katalog Publikasi 2022

8.5 Kegiatan Evaluasi Publikasi

8.5.1 Evaluasi publikasi Daerah Dalam Angka (DDA)

Penilaian terhadap Daerah Dalam Angka (DDA) perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas publikasi DDA. Penilaian DDA terbaik juga diharapkan dapat memacu kinerja BPS daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas baik dari sisi tampilan maupun dari kelengkapan dan konsistensi data.

8.5.2 Evaluasi publikasi Statistik Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas diseminasi data publikasi Statistik Indonesia (SI), dilakukan berbagai upaya dalam perbaikan pengelolaan data yang dihasilkan sehingga pada akhirnya data yang dihasilkan dalam Statistik Indonesia dapat lebih akurat dan terpercaya. Perbaikan kualitas data ini termasuk didalamnya melakukan perbaikan dalam mekanisme kompilasi data Statistik Indonesia.

Lampiran 9 Laporan Kegiatan Fungsi Layanan dan Promosi Statistik

9.1 Manajemen Tabel Subject Matter (MTSM)

Dalam operasional pelaksanaan pengelolaan website BPS RI, ada dua aktor yang terlibat secara aktif dalam proses bisnis kegiatan pengelolaan konten website. Kedua aktor itu adalah:

- a. Webadmin, yaitu orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, pengaturan standar kelayakan serta melakukan perekaman informasi dari setiap konten yang akan ditampilkan pada halaman frontend website.
- b. Webmaster, yaitu orang yang ditunjuk oleh subject matter dan bertanggung jawab menyediakan konten-konten yang akan diinputkan oleh webadmin, disebut juga dengan istilah content/data supporting.

Salah satu konten yang perlu disediakan oleh webmaster yaitu tabel statistik baik tabel statis maupun dinamis. Lain halnya dengan konten Publikasi dan BRS, penyampaian tabel statistik dari sejumlah 39 webmaster ke webadmin tidak termonitoring dengan baik. Hal tersebut salah satunya dikarenakan tidak adanya ARC untuk tabel statistik. Dengan tidak adanya ARC tersebut, manajemen tabel statistik untuk webadmin tidak terorganisir secara maksimal.

Selain itu, monitoring update data dari subject matter sangat rendah jika dibandingkan dengan tingginya minat pengunjung website BPS RI akan tabel statistik ini. Tidak sedikit konsumen mengeluhkan keterlambatan series data pada tabel statistik di website BPS RI. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada konsumen data dan menurunnya integritas dari BPS sendiri sebagai penyedia data publik.

Untuk itu, tim website mengembangkan aplikasi tata kelola tabel Subject Matter yang dikenal dengan sebutan aplikasi MTSM. MTSM memungkinkan webmaster untuk :

- a. Melakukan setting kepemilikan tabel
- b. Mengisi ARC tabel berdasarkan kepemilikan
- c. Mengupdate tabel sesuai dengan waktu ARC yang ditetapkan

Di sisi lain, MTSM memungkinkan admin website untuk :

- a. Verifikasi tabel yang telah diupload oleh webmaster
- b. Monitoring ARC tabel
- c. Monitoring keaktifan websmater masing-masing Subject Matter

Hasil upload dan entri data oleh webmaster di dalam aplikasi MTSM akan dimoderasi/verifikasi dahulu oleh tim Web di LPS, selanjutnya jika isian data dan metadata lengkap, akan ditayangkan di website BPS. Jika dalam proses verifikasi terdapat data/metadata/file upload yang tidak lengkap/error atau ada konfirmasi terkait data, maka hasil entri/upload akan dikembalikan lagi ke SM untuk dicek ulang. SM dapat melihat di Dashboard MTSM pada tabel 'Daftar Tabel/Indikator Konfirmasi Ulang' yang berisi list tabel/indikator yang perlu mendapat penjelasan/konfirmasi ulang dan SM/webmaster dapat langsung melakukan upload ulang tabel/indikator pada list menu konfirmasi ulang tersebut.

Pada tahun 2021, terdapat 1893 tabel dan indikator website yang telah dikelola oleh 39 Subject Matter melalui MTSM dengan jumlah arc tabel sebanyak 1689 ARC. Sejak semester 2 tahun 2020 yaitu dimulai dari bulan Juli 2020 telah sukses dilakukan tata kelola baru melalui

MTSM. MTSM sudah berjalan dengan baik, proses alur data menjadi lebih transparan dan tata kelola menjadi lebih jelas dan mudah.

9.2 Evaluasi Webmaster

Setiap tahun diadakan evaluasi webmaster untuk mempererat jalur komunikasi dan kolaborasi antara webmaster dengan Direktorat Diseminasi Statistik dalam mendukung tersedianya data yang lengkap dan mutakhir di website BPS. Pada tahun 2021, Kelas Webmaster diadakan selama 3 hari, yaitu tanggal 28-30 Oktober 2021.

Kelas webmaster yang diselenggarakan di Hotel Le Meridien Jakarta ini bertujuan untuk:

1. Refreshing Penggunaan Aplikasi Manajemen Tabel Subject Matter (MTSM)
2. Peningkatan Informasi Metadata pada Tabel Statistik Website (konsep, definisi, satuan, ukuran, kode referensi) sebagai bentuk upaya BPS dalam peningkatan literasi data statistik ke masyarakat.
3. Peningkatan Konten Tabel Statistik yang Mengikuti Kebutuhan Pengguna Data BPS. Permintaan data (publik, agregat) yang selama ini melalui konsultasi (karena tidak ada di website BPS) baik oleh konsumen umum maupun dari Kementerian/Lembaga, diharapkan dapat dihadirkan menjadi sebuah tabel statistik baru di website BPS.
4. Jaminan Kepastian Update Data Tabel Statistik melalui ARC Tabel. Dengan adanya Jadwal Rilis/Update Tabel Statistik, kita memberikan kepastian layanan data kepada pengguna data BPS. Untuk itu agar menjadi perhatian bagi webmaster untuk mengisi ARC tahun 2022.
5. Kerjasama dan kolaborasi yang erat antara Subject Matter BPS dengan Direktorat Diseminasi.
6. Webmaster agar dapat melakukan verifikasi mapping subjek CSA yang telah dilakukan oleh webadmin.



Dokumentasi Acara Evaluasi Webmaster

9.3 Standardisasi Pengelompokan Subyek tabel website

Subyek statistik yang terdapat di website BPS saat ini masih belum terstandardisasi dengan baik, oleh karena itu perlu adanya adaptasi ke standar internasional yaitu *Classification of Statistic Activities (CSA)* pada master subjek di website BPS.

Hal-hal yang melatarbelakangi adaptasi ini diantaranya:

1. Pada website BPS indikator/tabel dikelompokkan ke dalam subyek-subyek untuk lebih mempermudah konsumen dalam mencari indikator/tabel, tetapi belum ada standar untuk mengelompokkan indikator/tabel ke dalam subyek pada website bps.
2. Terdapat 2 (dua) jenis subjek statistik pada website bps (subyek pada banner perencanaan pembangunan dan subyek pada website bps)

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari system berjalan yaitu:

1. Master subyek bervariasi (id/label) di tiap website bps (pusat/daerah)
2. Letak indikator/tabel yang identik/sama tetapi berbeda posisi subyek diantara website-website bps
3. Kesulitan dalam memberikan posisi keberadaan indikator/tabel ke konsumen
4. Kesulitan dalam melakukan monitoring konten website

Tujuan dari mapping CSA yaitu:

1. Membuat panduan pengelompokan indikator/tabel ke dalam subyek statistik pada website bps.
2. Penyeragaman master subjek statistik pada website bps (pusat/daerah)

9.4 Pemeliharaan Website Sensus Penduduk 2020

BPS melaksanakan kegiatan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) di seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dengan metode kombinasi, yaitu pada bulan Februari-Maret 2020 dengan metode Sensus Penduduk Online (SPO) dan pada bulan Juli 2020 dengan metode wawancara (SPW) untuk menghasilkan data karakteristik kependudukan. Kegiatan Sensus Penduduk ini menggunakan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan SP2020. Upaya ini menjadi langkah penting perwujudan satu data kependudukan Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk realisasi kegiatan diseminasi statistik maka dibangunlah website sensus penduduk dengan menggunakan jasa konsultan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Pengembangan website SP2020 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020. Sesuai dengan tahapan pengembangan sistem, setelah dilakukan pengembangan maka perlu dilakukan pemeliharaan untuk menjamin kualitas setiap fungsi yang ada. Oleh karena ini dilakukan tahapan pemeliharaan pada Oktober 2020 – Oktober 2021.

Target kegiatan pemeliharaan website SP2020 sebagai berikut :

- a. Memperbaiki bug dan error yang muncul terdapat pada website frontend website SP2020.
- b. Memperbaiki bug dan error yang muncul terdapat pada website backend admin, kontributor, dan verifikator website SP2020.

- c. Memperbaiki bug dan error yang muncul terdapat pada website backend superadmin website SP2020.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan 2 metode yaitu metode jarak jauh dan metode onsite. Metode jarak jauh dilakukan dengan menyediakan akses menggunakan aplikasi TeamViewer yang digunakan oleh konsultan dalam mengirim file aplikasi website SP2020. Metode onsite dilakukan dengan cara menyediakan akses di kantor BPS, Direktorat Diseminasi Statistik untuk digunakan langsung oleh konsultan dalam pemeliharaan website SP2020.

Selama kegiatan pemeliharaan menggunakan metode jarak jauh dilakukan, Fungsi Layanan dan Promosi Statistik secara rutin melakukan rapat dengan konsultan setiap minggu. Kegiatan rapat dilakukan untuk mendapatkan laporan mengenai progres pemeliharaan dan mengetahui kendala yang dialami oleh konsultan selama proses pemeliharaan berlangsung. Selain itu, Fungsi Layanan dan Promosi Statistik secara aktif melakukan pengecekan dan uji coba dari item pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh konsultan, serta terus mencari bug dan error dari website SP2020 yang kemudian secara aktif dikomunikasikan dengan pihak konsultan untuk dilakukan pemeliharaan. Ringkasan hasil pemeliharaan Website Sensus Penduduk 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Ringkasan hasil pemeliharaan Website Sensus Penduduk 2020

No	Sub Sistem	Jumlah bug/error yang ditemukan	Jumlah bug/error yang berhasil diperbaiki	Persentase keberhasilan perbaikan bug/error
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Frontend	81	81	100
2	Backend Admin	10	10	100
3	Backend Kontributor	4	4	100
4	Backend Verifikator	7	7	100
5	Backend Superadmin	10	10	100
Total		112	112	100

Berdasarkan tabel diatas makanya dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan Website Sensus Penduduk 2020 sudah berjalan baik, terbukti dengan terpenuhinya semua target perbaikan bug/error pada masing-masing sub sistem.

9.5 WEB API BPS

WebAPI memungkinkan data BPS untuk diberbagipakaikan. WebAPI menyediakan beragam services yang siap dipakai, seperti menampilkan seluruh publikasi, BRS, tabel statis, tabel dinamis, berita dan banyak lagi services lain yang berhubungan dengan produk BPS. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang webAPI BPS, bisa mengakses <https://webapi.bps.go.id/developer>. Sedangkan untuk jenis-jenis web service yang disediakan oleh webAPI BPS bisa mengakses <https://webapi.bps.go.id/developer>.

Pada tahun 2021 telah ditambahkan web service baru, antara lain:

- Foreign Trade Data (Export&Import).

- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Special Data Dissemination Standard (SDDS)
- Statistical Classifications (KBLI: 2009, 2015, 2017, 2020 dan KBKI 2015) Searching

Pengguna WebAPI BPS adalah seluruh aplikasi yang telah terverifikasi status registrasinya dalam menggunakan WebAPI BPS dan aplikasi tersebut minimal melakukan satu request ke WebAPI BPS di kurun tahun tertentu. Setiap aplikasi yang telah terdaftar, dapat melakukan request (permintaan) data ke WebAPI BPS menggunakan token unik aplikasi masing-masing. Request dapat berupa request list BPS, request list publikasi, request list tabel statis, dsb. WebAPI BPS akan merespon setiap request yang masuk dengan sebuah data format JSON (*Javascript Object Notation*) yang dapat dibaca oleh mesin. Respon ini pada dasarnya adalah teks yang dapat diukur besaran ukurannya (byte) dan merupakan objek yang dipertukarkan.

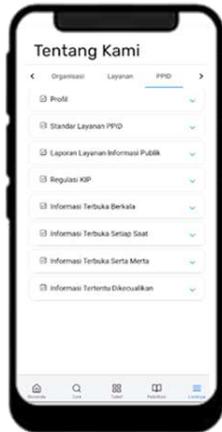
Tahun 2021 jumlah log akses dari aplikasi yang mengakses web API BPS tercatat sejumlah 7.005.595 permintaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya data BPS dalam mendukung terbentuknya aplikasi lain.

9.6 AllStats

Allstats adalah sebuah aplikasi berbasis android dan iOS yang digunakan untuk menyebarkan data BPS kepada pengguna perangkat mobile. Saat ini Allstats sudah tersedia versi 1.6.8 dan dapat diunduh di google playstore dan app store. Dengan tersebarnya data BPS di 549 domain/subdomain, pengguna data yang mengakses data BPS melalui perangkat mobile terasa kurang praktis ketika harus selalu berpindah domain saat mengakses data BPS Pusat, Provinsi atau Kab/Kota. Begitu juga beberapa fitur website kurang optimal apabila diakses via browser mobile, oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna data ketika mengakses melalui perangkat mobile.

Dengan Allstats hal tersebut bisa terpenuhi karena pengguna data cukup akses 1 aplikasi di perangkatnya untuk mengakses data dari beragam daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tampilan dan menu yang lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks dibandingkan jika mengakses langsung di browser.

Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat mobile dan sistem operasi android maupun iOS yang selalu update, maka aplikasi Allstats harus selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut agar aplikasi bisa berjalan dengan optimal di perangkat mobile. Oleh karena itu dalam kurun waktu 2021, tepatnya bulan Agustus 2021 ini aplikasi Allstats sudah dilakukan update untuk peningkatan performa dan perbaikan bug saat proses download untuk android versi 10 keatas. Allstats versi 1.6.8 juga ditambahkan informasi tentang PPID di bagian menu tentang kami.



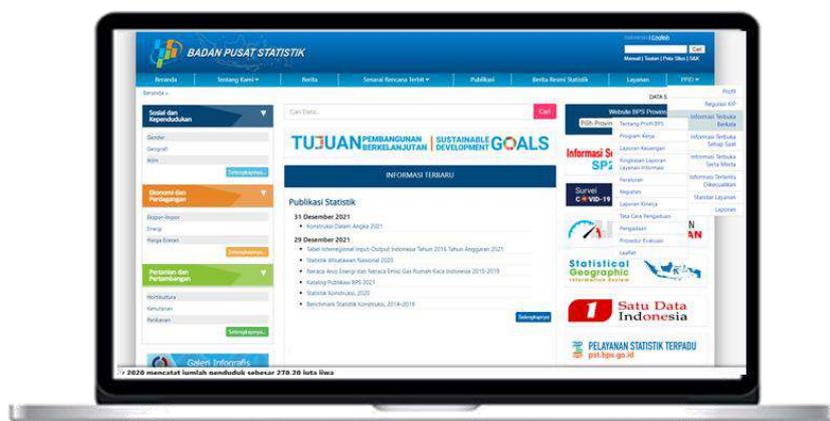
Menu PPID pada Allstat

Data yang ditampilkan Allstats sama dengan data yang ada pada website BPS seluruh Indonesia (1 domain BPS Pusat, 34 domain BPS Provinsi dan 514 domain BPS Kab./Kota), karena memanfaatkan fasilitas web service/API yang disediakan oleh BPS <https://webapi.bps.go.id>.

9.7 Tata Kelola menu PPID pada website BPS

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14/2008 tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2011 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporannya ditampilkan di website BPS pada menu PPID. Pada tahun 2021, admin website telah melakukan perubahan dan penambahan menu dan konten PPID yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Menu PPID

9.8 Anugerah Media Humas 2021

BPS kembali mencatatkan namanya dalam kancah prestasi tingkat nasional. Pada acara Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan di Bali 4 November 2011, website bps.go.id menyabet Terbaik II Kategori Website Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan tinggi Negeri. Penghargaan diterima oleh Marsudijono, Kepala Biro Umum BPS. Turut hadir pula, Hanif Yahya, Kepala BPS Provinsi Bali. AMH 2021 merupakan AMH ke-14 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kegiatan Anugerah Media Humas 2021 bertujuan untuk :

- Memberikan penghargaan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia.
- Menciptakan semangat kompetisi positif di lingkungan humas yang berbasis kinerja.
- Memberikan ruang dan peluang bagi peningkatan kualitas kinerja humas pemerintah.
- Memperkuat peran humas pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi terkait program penanganan pandemi COVID-19.

Peserta kegiatan Anugerah Media Humas 2021 diikuti oleh Humas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Humas Perguruan Tinggi Negeri, Humas BUMN dan BUMD, dimana pemenang akan diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi diantaranya kategori Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anugerah Media Humas 2021 dilombakan dalam berbagai kategori, diantaranya Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Website, Komunikasi Publik. Website BPS masuk dalam nominasi kategori Website pada klasifikasi kategori Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri Bersama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Website BPS meraih terbaik II dalam kategori website Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi Negeri. Terbaik I diraih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan terbaik III diraih oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Parameter yang digunakan di dalam penilaian ada empat hal. Pertama adalah aspek tampilan desain, kedua konten, ketiga adalah aspek teknologi, dan yang keempat adalah aspek interaktif. Website bps.go.id mampu tampil baik dalam multiformat, baik di desktop maupun handphone. Selain itu, konten berupa data dan publikasi BPS yang lengkap, informasi rilis, serta PPID yang mudah, gratis, dan dapat diakses secara cepat mampu menarik banyak pengunjung.



Sertifikat dan Piagam Anugerah Media Humas 2021

9.9 Manajemen Monitoring Konten Website

Website BPS merupakan satu produk layanan BPS yang menjadi antarmuka terdepan pelayanan BPS kepada publik. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2020, yang mencatat bahwa sebagian besar konsumen Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS RI mendapatkan data melalui fasilitas website dengan persentase sebesar 41,88% mengalahkan SILASTIK sebanyak 31,41% dan datang langsung ke perpustakaan sebanyak 10,47%. Berdasarkan hal tersebut, layaklah jika website BPS perlu terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maka diperlukan suatu analisis statistik website pada Website BPS RI.

Analisis statistik website dapat diwujudkan dengan memanfaatkan portal monitoring konten website berbasis web yang disebut Webdash versi 1.0. Berdasarkan hasil monitoring di webdash per tanggal 13 Januari 2022, di website bps <http://bps.go.id> terdapat sejumlah 4.569 Publikasi, 1.662 berita Resmi Statistik, 637 Tabel Statis, 1387 Tabel Dinamis dan 438 Berita Kegiatan.



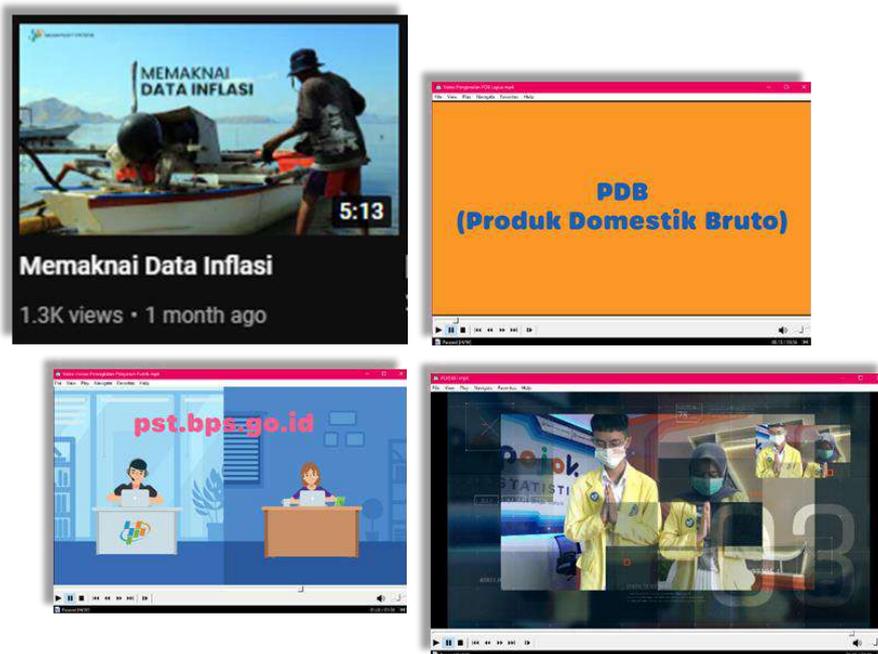
Tampilan Dashboard Webdash



Infografis Mengenai Produk dan Layanan Statistik, serta Kegiatan Diseminasi BPS

9.10.2 Penyusunan Videografis Seputar Informasi Produk dan Layanan BPS

Dalam rangka memberikan informasi statistik kepada para pengguna, disusun videografis yang mengangkat tema mengenai beberapa indikator statistik sebagai produk BPS serta panduan layanan statistik BPS. Beberapa diantaranya adalah penjelasan mengenai perolehan indikator statistik, seperti inflasi dan PDB Lapangan Usaha, serta panduan mengenai Pelayanan Statistik Terpadu dan Pojok Statistik. Sebanyak 4 videografis telah disusun di tahun 2021 dan menjadi media promosi statistik yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi statistik, serta beberapa diantaranya disebarluaskan melalui berbagai kanal media sosial BPS, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Contoh-contoh videografis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Videografis Mengenai Produk dan Layanan Statistik

9.11 Penyusunan Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia (Triwulanan)

Berkurangnya minat baca masyarakat merupakan salah satu fenomena yang berkembang di era milenial saat ini. Fenomena ini merupakan tantangan bagi BPS dalam menyajikan data dengan memberikan tampilan menarik dengan tetap mempertahankan kualitas serta esensi data dan informasi yang disajikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses data, Fungsi Layanan dan Promosi Statistik memandang perlu untuk melanjutkan penyusunan publikasi ringkas yang berisi beberapa indikator utama yang diproduksi BPS, yang kemudian dikemas dalam bentuk booklet. Peningkatan dan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah berfokus pada pengembangan perwajahan dan desain dari booklet yang diterbitkan sehingga tampilan booklet menjadi lebih menarik. Adapun konten yang ditampilkan masih sama dengan booklet tahun 2020.



Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia (Triwulanan 2021)

9.12 Pojok Statistik

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta pemanfaatan data statistik serta penyebarluasan informasi terkait prosedur pelayanan data di BPS pada lingkungan akademisi, Fungsi Layanan dan Promosi Statistik membuat terobosan berupa penyediaan media promosi di lingkungan akademisi yang interaktif serta mengusung konsep kreativitas, pendampingan intensif, dan bersifat tematik sesuai dengan karakter milenial melalui Pojok Statistik.

Penyelenggaraan Pojok Statistik bertujuan untuk meningkatkan minat serta kesadaran para akademisi dalam pemanfaatan data statistik untuk memenuhi kebutuhan akademik serta penelitian. Pojok Statistik merupakan program kolaborasi antara BPS RI maupun BPS Provinsi dengan perguruan tinggi. Program ini merupakan salah satu quick win RB BPS yang ditargetkan pada tahun 2021-2024.

Hingga akhir tahun 2021 terdapat sebanyak 7 perguruan tinggi di 7 provinsi yang sudah memiliki Pojok Statistik, yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Sulawesi Selatan, Universitas Sumatera Utara (USU) di Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang (UNP) di Sumatera Barat, Universitas Sriwijaya (UNSRI) di Sumatera Selatan, Universitas Sebelas Maret (UNS) di Jawa Tengah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Jawa Timur, dan Universitas Bangka Belitung (UBB) di Kepulauan Bangka Belitung.



Pojok Statistik di Perguruan tinggi

9.13 Pojok Statistik Virtual

Pojok Statistik merupakan media layanan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan statistik, khususnya di lingkungan mahasiswa dan akademisi. Dalam pelaksanaannya, BPS berkolaborasi dengan Forstat dan ISI untuk membangun agen-agen statistik dalam penyediaan layanan statistik di perguruan tinggi dan untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pandemi Covid-19 yang saat ini berlangsung, telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, sistem perkuliahan beralih dari metode tatap muka menjadi metode online. Hal ini menuntut adanya strategi baru dalam penyelenggaraan Pojok Statistik, yaitu melalui Pojok Statistik Virtual.

Pojok statistik virtual menyajikan konten yang dikemas dengan visualisasi yang menarik, memadukan kemudahan layanan dan akses belajar statistik tanpa batas wilayah. Seluruh konten dan layanan yang disajikan dalam Pojok Statistik Virtual merupakan hasil sinergi antara BPS dengan perguruan tinggi. Pojok Statistik Virtual dapat diakses pada pojokstatistik.bps.go.id.



Aplikasi Pojok Statistik Virtual

9.14 Pengembangan SDM

9.14.1 Seminar Daring “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Teknik Copywriting”

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dimana BPS sebagai penyelenggara dan penyedia statistik dasa serta Permenpan No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, BPS senantiasa melakukan upaya peningkatan pelayanan publik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru terutama bagi sektor pelayanan publik. BPS sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan strategi dalam rangka mencapai misi “Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional” demi mewujudkan BPS sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan seminar daring sebagai optimalisasi pemanfaatan IT dalam pelayanan publik.

Seminar daring dengan tema “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Teknik Copywriting” dalam pelaksanaannya dibagi kedalam 2 batch yang diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 Juli 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh unit kerja yang melakukan kegiatan terkait pelayanan publik di BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang pada masing-masing batch.

Narasumber kegiatan merupakan ahli/praktisi di bidang terkait dengan kualifikasi dan standar nasional dalam bidang yang dikuasai.



Seminar Daring “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Teknik Copywriting”



Sertifikat Seminar Daring “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Teknik Copywriting”

9.14.2 Pelatihan “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Penyusunan Konten Marketing Kreatif”

Berdasarkan Perka BPS No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik, disampaikan bahwa tugas dan fungsi Fungsi Layanan dan Promosi Statistik salah satunya adalah mengatur dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan layanan dan promosi statistik, maka Direktorat Diseminasi Statistik dalam hal ini Fungsi Layanan dan Promosi Statistik menyelenggarakan pengembangan SDM untuk kegiatan pemasaran dan promosi dengan tema Pelatihan Daring mengenai Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Penyusunan Konten Marketing Kreatif dalam rangka meningkatkan wawasan dan kapasitas pengelolaan

digital marketing di BPS, Kegiatan promosi secara digital merupakan jawaban atas tantangan dan kendala pelaksanaan kegiatan promosi statistik dikarenakan pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan promosi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara tatap muka.

Dalam pelaksanaan pelatihan daring pada 7-9 September 2021, BPS bekerjasama dengan pelatih/trainer yang memiliki spesialisasi dalam bidang pemasaran dan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan internal marketing BPS dalam sektor publik, khususnya pelayanan publik statistik. Pelatihan tersebut diikuti oleh sejumlah 60 peserta yang merupakan perwakilan dari Direktorat Diseminasi Statistik dan Bagian Hubungan Masyarakat di BPS Pusat, serta Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Provinsi seluruh Indonesia.



Eka J. Budhiman, SH., Assoc. Dipl. Bus., M. Com.
Certified Professional Marketer (Asia).

MARKPLUS, INC.
Knowledge. Insights. Solutions.



- Senior Facilitator – MarkPlus Institute (MarkPlus, Inc.)
 (838 Classes / 1,321 Days / 9,460 Hours / 23,915 Pax / 202 Companies / 45 Industries)
- Competition Project Consultant – Pertamina Domestic Gas, Pertamina Coaching UMKM & BTN Sales Award
- Facilitator, Speaker – Indonesia & Singapore
- Coach - Bong Chandra Schools for Billionaires
- Marketing Judge – Indocare Marketing Competition.
- Lecturer – BINUS International, Raffles Design Institute, Ukrida 3, President Uni.
- Insurance Agent – Allianz.
- Marketing Manager – PT Cordlife.
- Marketing Support Manager – PT Sinar Sosro.
- Product Manager – PT Kawan Lama Sejahtera.
- Commissioner – Proteksi Aman Indonesia.
- Operation Manager – UBM Eng.Serv., - Singapore & Ind.
- Representative – Innovax System Pte Ltd – Singapore.
- Assistant GM – Ultra.Com
- Marketing Executive – SLS Bearings Pte Ltd – Singapore.
- Sales Manager – Inter-Continental Hotel, Sorobudur.

Pelatihan Daring “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Penyusunan Konten Marketing Kreatif”



Sertifikat Pelatihan Daring “Optimalisasi Diseminasi Statistik Melalui Penyusunan Konten Marketing Kreatif”

9.15 Perancangan Draft Kebijakan Diseminasi

Sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga statistik pemerintah, BPS memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyebarluasan data kepada pengguna data.

Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi BPS dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dalam waktu cepat dan mudah diakses. Oleh sebab itu, BPS melakukan beberapa penyesuaian dalam mekanisme serta prosedur diseminasi produk statistik dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data yang semakin kompleks.

Kebijakan diseminasi yang disusun telah memanfaatkan sistem dan teknologi terkini dalam penyebarluasan produk statistik. Dalam rangka mendukung penyebarluasan statistik resmi yang berkualitas dan transparan, Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) menetapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan statistik secara komprehensif, utuh, dan terpadu. Kebijakan yang terkait dengan penyebarluasan statistik resmi ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan statistik kepada masyarakat.

Perancangan draft kebijakan diseminasi statistik bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kepada penyelenggara kegiatan diseminasi statistik serta masyarakat pengguna data tentang produk resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Oleh sebab itu, draft kebijakan diseminasi disusun berdasarkan referensi penyelenggaraan pelayanan statistik di Kantor Statistik dari beberapa negara berbeda serta beberapa kajian yang terkait.

9.16 Perancangan Petunjuk Teknis Pojok Statistik

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROMOSI STATISTIK

MELALUI PENYELENGGARAN POJOK STATISTIK

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan promosi statistik adalah peningkatan pemanfaatan data dan informasi atau produk yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa tahapan mulai dari penyebarluasan produk hasil kegiatan statistik, sampai dengan peningkatan literasi data statistik kepada masyarakat.

Latar belakang dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam penentuan kegiatan promosi yang tepat sasaran. Diperlukan strategi promosi statistik yang berbasis pada karakteristik pengguna agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Direktorat Diseminasi Statistik telah melakukan beragam kegiatan promosi yang didesain untuk setiap segmentasi masyarakat, seperti Pameran yang ditargetkan untuk menyentuh masyarakat umum, kalangan swasta dan pemerintahan, serta kegiatan promosi di kalangan akademisi seperti BPS Goes To Campus (GTC) ataupun BPS Goes To School.

Promosi statistik melalui kegiatan BPS Goes to Campus (GTC) telah dilaksanakan sejak 2016 dan mendapatkan tanggapan yang positif dari akademisi. Sebagai tindak lanjut dari

kegiatan tersebut, beberapa perguruan tinggi menunjukkan ketertarikan dan kebutuhan akan asistensi layanan konsultasi secara intensif untuk menjawab kebutuhan akademisi di lingkungan perguruan tinggi akan produk dan layanan statistik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan bagi para pelaksana dalam melakukan kegiatan pembentukan Pojok Statistik dalam rangka peningkatan kualitas layanan statistik.

Tujuan petunjuk teknis adalah untuk:

1. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan Pojok Statistik dalam mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
2. Menetapkan standar prosedur dan mekanisme dalam penyelenggaraan pojok statistik yang efektif.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

D. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis Penyelenggaraan Kegiatan Diseminasi Melalui Promosi Statistik dengan Pembentukan Pojok Statistik di perguruan tinggi meliputi tata kelola, prosedur dan mekanisme, standar kebutuhan minimum, serta aktivitas dalam penyelenggaraan Pojok Statistik.

2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MINIMUM

Petunjuk teknis ini mengatur mengenai kebutuhan minimum sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik melalui Pojok Statistik.

- a. Ruang Pojok Statistik
 1. Lokasi berada di area publik di lingkungan perguruan tinggi dengan jangkauan lintas jurusan.
 2. Lokasi berada dalam ruangan (indoor) dengan pintu dan sebagian dinding dari kaca/transparan.
 3. Memiliki dimensi luas minimum 30 m²
 4. Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

b. Perlengkapan layanan

1. Sarana dan prasarana meliputi meubelair, dan perlengkapan ruangan.
2. Sarana dan prasarana mengacu standar perlengkapan ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

c. Peralatan Teknologi dan Informasi

1. Peralatan teknologi dan informasi mencakup media tayang elektronik, seperti Smart TV atau LED televisi.
2. Komputer dengan mengacu pada kebutuhan minimum yang telah ditetapkan (terlampir).

d. Infrastruktur Jaringan

1. Infrastruktur jaringan meliputi jaringan internet maupun jaringan listrik;
2. Infrastruktur jaringan harus memiliki kecepatan (speed) minimum sebesar 20 Mbps;
3. Daya listrik minimum 2200 Kwh.

e. Spesifikasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam kegiatan layanan Pojok Statistik harus memenuhi kriteria minimum sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan yang baik mengenai informasi dan produk statistik yang dihasilkan oleh BPS;
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Inovatif dan kreatif;
4. Memiliki kemampuan dalam memberikan konsultasi dasar dan/atau mendalam mengenai dasar dan metode statistik.

3. PIHAK TERKAIT

Penyelenggaraan Pojok Statistik melibatkan 2 Pihak, yaitu:

- a. Badan Pusat Statistik sebagai Pihak Pertama
- b. Perguruan tinggi sebagai Pihak Kedua

4. HAK dan TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

a. Hak

1. Menyelenggarakan kegiatan promosi statistik di kalangan akademisi perguruan tinggi secara terjadwal;
2. Melakukan pengumpulan data pengguna dan aktivitas layanan melalui survey, sensus atau data administratif baik elektronik maupun non elektronik kepada kalangan akademisi untuk peningkatan kualitas layanan BPS;
3. Melakukan analisis dan penyebarluasan hasil analisis layanan pojok statistik;
4. Memperoleh laporan aktivitas layanan Pojok Statistik secara berkala sesuai kesepakatan dari pengelola Pojok Statistik.

- b. Tanggungjawab
- 1. Menyediakan standar desain dekorasi ruang Pojok Statistik;
- 2. Menyediakan anggaran dekorasi Pojok Statistik;
- 3. Menetapkan rancangan kegiatan edukasi dan promosi statistik;
- 4. Menyediakan konten promosi statistik;
- 5. Menyediakan materi kegiatan promosi statistik;
- 6. Menyediakan narasumber/pemateri dalam kegiatan promosi statistik;
- 7. Melakukan pembinaan kegiatan Statistik Khusus pada lingkungan perguruan tinggi.

PIHAK KEDUA

- 1. Hak
 - 1. Memperoleh materi kegiatan promosi statistik
 - 2. Memperoleh layanan edukasi statistik
 - 3. Memperoleh konten promosi statistik
-
- 2. Tanggungjawab
 - 1. Menyediakan ruangan dan fasilitas Pojok Statistik sesuai standar kebutuhan yang telah ditentukan;
 - 2. Menyediakan petugas layanan Pojok Statistik sebagai counter part Pihak Pertama dalam menyelenggarakan layanan Pojok Statistik;
 - 3. Menyampaikan laporan layanan aktivitas kegiatan Pojok Statistik kepada Pihak Pertama;
 - 4. Berperan aktif dalam penguatan Statistik Khusus yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi.

5. AKTIVITAS KEGIATAN POJOK STATISTIK

- a. Layanan Konsultasi
Merupakan layanan tanya jawab terkait produk statistik yang telah tersaji pada website BPS.
- b. Edukasi Seputar Data dan Informasi Statistik (ESTIMASI)
Merupakan layanan edukasi tematik dalam bentuk kelas /kelompok yang menyampaikan materi terkait kegiatan, produk dan layanan BPS.
- c. Kegiatan Promosi Statistik
Penyelenggaraan kegiatan promosi statistik dilakukan secara periodik oleh BPS.

6. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Layanan Pojok Statistik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Telah terjalin Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak;
- b. Telah dibentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak;
- c. Pengajuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat dilakukan dengan menghubungi unit kerja Bagian Kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat email: kerjasama@bps.go.id;
- d. Sebelum pembentukan Pojok Statistik, Pihak Pertama akan melakukan survei lokasi sebagai dasar dalam proses verifikasi;
- e. Proses pembentukan Pojok Statistik dapat dilakukan setelah proses verifikasi selesai.

7. PENANGANAN MASALAH

Jika pihak perguruan tinggi atau BPS mengalami permasalahan dalam proses pelaksanaan layanan statistik di Pojok Statistik maka dapat melaporkan ke layanan pusat bantuan melalui:

1. Layanan pusat bantuan untuk perguruan tinggi tersedia melalui telepon ke unit layanan departemen terkait atau melalui email;
2. Layanan pusat bantuan untuk BPS tersedia melalui telepon 021-3507057 atau email lps@bps.go.id; dan
3. Layanan pusat bantuan untuk BPS provinsi tersedia melalui telepon Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik atau melalui email.

8. PENANGANAN PERSELISIHAN

Hak dan tanggungjawab masing-masing pihak diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau email. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

b. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional dilakukan oleh Departemen Statistika di perguruan tinggi, Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik-BPS Provinsi dan/atau Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik-BPS Pusat.

c. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

9. PENUTUP

a. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara perguruan tinggi dan BPS dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan Peraturan Bersama yang mengatur

Petunjuk Teknis tersendiri antara perguruan tinggi dan BPS, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

b. Pemantauan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk.

9.17 Analisis Pengembangan *Diseminasi Official Statistics*: Transformasi Digital dalam Layanan Statistik di Masa Pandemi Covid-19

Sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan badan yang berperan dalam menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPS senantiasa berupaya melakukan peningkatan dan pengembangan kualitas layanan statistik publik. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan tantangan baru bagi seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali layanan statistik publik BPS. Sebelum adanya pandemi, layanan statistik publik dijalankan melalui beberapa kanal, yaitu kunjungan langsung, telepon, website, dan SILASTIK. Akan tetapi, berlakunya kebijakan pembatasan kegiatan yang bersifat sosial selama pandemi memberikan ruang terbatas untuk aktivitas layanan statistik publik yang bersifat *offline*. Oleh karena itu, BPS beradaptasi melalui kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas layanan statistik publik, yaitu melalui SILASTIK yang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan statistik sebelum dan pada saat pandemi berlangsung menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan selama masa pandemi pada jenis layanan kunjungan langsung, dimana sebelum pandemi nilainya mencapai 25,3% kemudian menjadi sebesar 6,5% dari keseluruhan jenis layanan yang tersedia. Berbeda halnya dengan jenis layanan konsultasi berbasis online yang sebelumnya sebesar 21,8% mengalami kenaikan menjadi 37,6%. Sejalan dengan hasil yang diperoleh, rating konsumen dalam SILASTIK dan hasil SKD juga memperlihatkan peningkatan kepuasan konsumen terhadap layanan statistik BPS di masa pandemi

9.18 Pengembangan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi

9.18.1 Layanan Data dan Informasi Statistik

Secara absolut jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen terdapat kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sudah semakin banyak data dan informasi yang disajikan melalui website BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh konsumen, sehingga jumlah layanan langsung cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah aktivitas layanan mencapai 5.065 layanan. Adapun jumlah konsumen berdasarkan jenis pelayann dan segmentasi dapat diketahui melalui portal silastik yang dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Jumlah Layanan Menurut Media Layanan dan Bulan, 2021

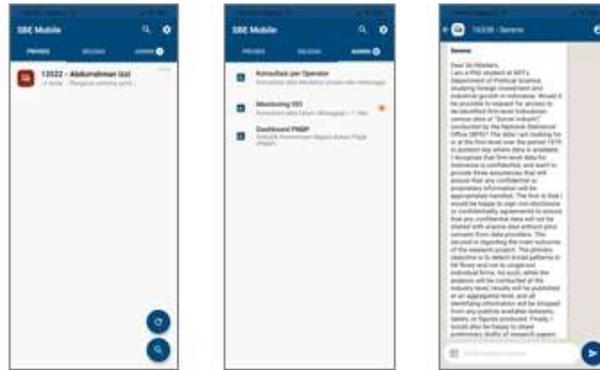
No	Jenis Pelayanan 2021 [0000]	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Online Konsultasi	186	208	164	161	136	167	118	131	167	156	169	152	1.915
2	Telepon	167	128	168	194	117	86	70	65	74	76	94	112	1.351
3	Layanan Online Pembelian	86	86	75	49	65	78	79	78	83	97	92	73	941
4	Surat Internal	70	83	48	56	33	19	19	26	34	29	30	46	493
5	Pemohon Rp0,00	14	16	10	18	14	19	12	13	18	13	12	16	175
6	Surat Eksternal	14	7	13	22	12	8	12	15	18	19	12	19	171
7	Kunjungan Langsung	0	0	0	5	1	1	0	0	1	1	6	4	19
TOTAL		537	528	478	505	378	378	310	328	395	391	415	422	5.065

Jumlah Layanan Menurut Segmentasi Pengguna dan Bulan, 2021

No	Jenis Segmentasi 2021 [0000]	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Peneliti, Mahasiswa, atau Pribadi Lainnya	115	139	125	118	96	127	101	94	112	120	128	85	1.360
2	Instansi Swasta	73	62	56	59	61	65	47	68	70	81	63	84	789
3	Instansi/Lembaga Pemerintah (Pusat/Daerah)	45	43	42	47	38	41	44	48	62	49	40	40	539
4	Mahasiswa Polstat STIS	67	102	63	34	25	14	6	1	10	8	44	41	415
5	Pegawai BPS	17	20	7	14	13	15	13	18	21	22	19	21	200
6	Unit Kerja BPS	22	9	3	24	9	14	14	17	20	12	3	13	160
7	Lembaga/Institusi Pendidikan	21	10	8	6	6	7	8	8	13	13	18	16	134
8	Lembaga Internasional/Perwakilan Negara Asing	10	15	6	9	13	9	7	9	13	10	6	10	117
Total		370	400	310	311	261	292	240	263	321	315	321	310	3.714

9.18.2 Pengembangan SBE Mobile

SBE Mobile dibangun untuk mempermudah komunikasi petugas layanan dengan pengguna data dalam merespon transaksi layanan konsultasi. Dengan dibangunnya aplikasi SBE Mobile pada Agustus 2021 yang lalu, maka petugas layanan dapat menjawab pertanyaan konsultasi dari pengguna dari gadget masing-masing tanpa harus terhubung ke vpn sehingga diharapkan waktu pelayanan menjadi lebih cepat.

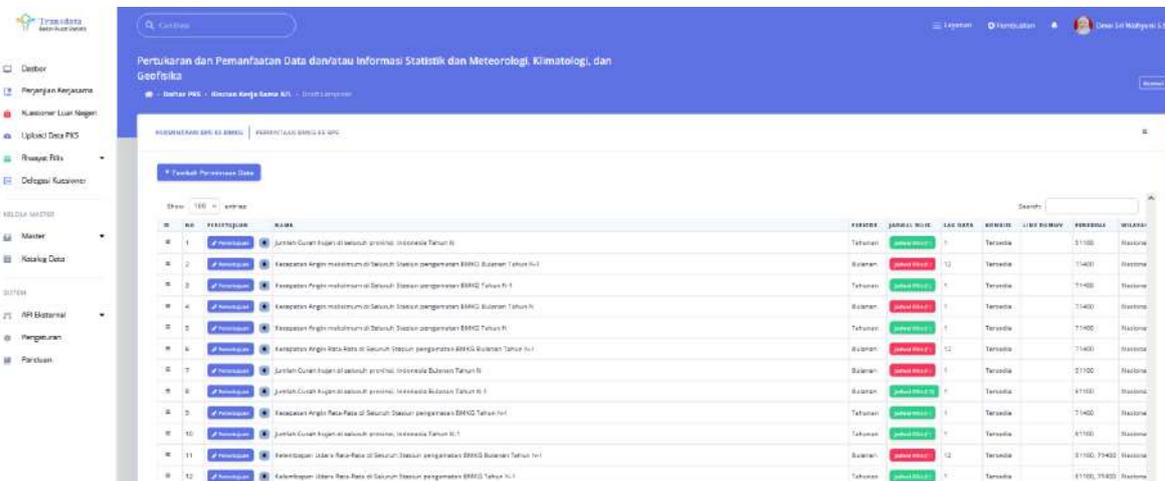


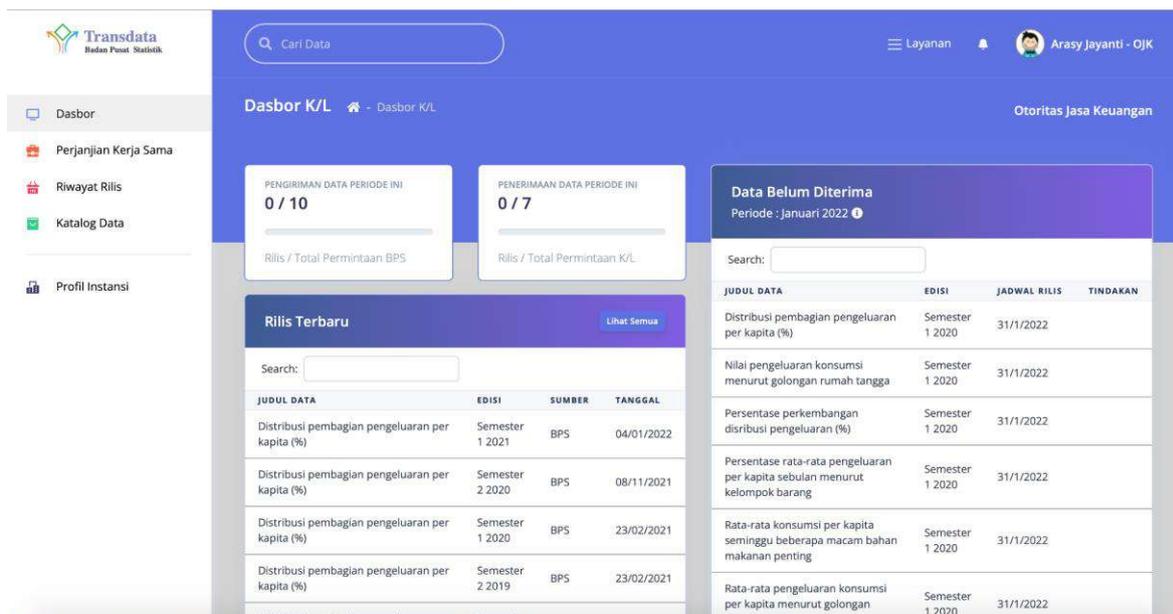
SBE Mobile pada Play Store

9.18.3 Pengembangan Portal Pertukaran Data/Transdata

Perbaikan dalam layanan juga dilakukan pada aplikasi Transdata. Transdata merupakan inovasi baru dalam pelayanan data pada Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem ini berperan dalam menjembatani proses pertukaran data antara Kementerian/Lembaga (KL) dengan BPS. Dengan adanya Transdata, proses pertukaran data menjadi lebih mudah, efisien dan terdokumentasi.

Pada tahun 2021 terdapat pengembangan modul pada Transdata, yaitu fitur Approval Draft PKS, Dashboard Kementerian/Lembaga, dan dashboard Subject Matter seperti pada gambar dibawah ini.





Tampilan transdata pada BPS dan Kementerian/Lembaga/ Instansi

9.18.4 Pengembangan SBE Mail

Aplikasi mobile berbasis untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan proses disposisi dan persetujuan e-sign untuk layanan transaksi melalui surat.



SBE mail

9.19 Melakukan kajian data mikro kaitannya dengan kriteria aset

Dalam penyajiannya, data mikro disajikan berbeda dengan data makro atau data agregat yang menyediakan kesimpulan informasi dalam bentuk nilai rata-rata, rasio, frekuensi dan nilai statistik lainnya. Para pengguna data dapat memanfaatkan data mikro untuk memahami

dan menganalisis permasalahan sosial ekonomi lebih mendalam dibandingkan apabila menggunakan data makro atau data agregat (Dupriez, 2010). Tujuan penelitian yang semakin beragam dan kompleks membutuhkan data dan informasi yang lebih mendetail seperti data yang tersedia dalam data mikro. Data mikro menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi para peneliti untuk mengidentifikasi hubungan dan interaksi antar fenomena yang tercakup dalam sensus atau survei sehingga mendorong keragaman dan meningkatkan kualitas dari penelitian (Dupriez, 2010).

Dalam rangka meningkatkan pengendalian Internal BPS terutama dalam pengakuan, pengukuran dan pencatatan data mikro, BPS berusaha menyusun kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Berdasarkan kriteria pengakuan penetapan aset tetap pada PMK 234/PMK.05/2020, data mikro memenuhi dua dari lima kriteria. Dua kriteria yang terpenuhi tersebut adalah:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- Sedangkan data mikro tidak termasuk kedalam kriteria lainnya yaitu
- Berwujud,
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

Berdasarkan kriteria definisi penetapan ATB pada PMK No 90 /PMK.05/2019 dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020, data mikro memenuhi 3 dari 4 kriteria. Tiga kriteria yang terpenuhi tersebut adalah:

- dapat diidentifikasi
- dapat dikendalikan
- mempunyai manfaat ekonomi di masa depan

Sedangkan kriteria ke-4 yaitu berdasarkan biaya perolehan dapat diukur secara andal, data mikro tidak termasuk kedalam kategori tersebut.

Berdasarkan kriteria pengakuan, data mikro merupakan hasil dari kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan yang merupakan bagian dari suatu penelitian/riset. Adapun tahapan penelitian/riset bukan termasuk ATB.

Data mikro bukan merupakan aset tetap dan juga bukan merupakan ATB berdasarkan identifikasi kriteria penentuan aset tetap dan ATB pada PMK 234/PMK.05/2020.

9.20 Melakukan Reviu terhadap Peraturan Pemerintah PNB

Kajian dilakukan dengan melakukan reviu terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNB yang diatur dalam Undang-Undang PNB 9/2018 ini antara lain definisi PNB, objek dan subjek PNB, pengaturan tarif PNB termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNB antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief*

Financial officer) dan Menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*chief operational officer*) di bidang PNBPNP.

Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBPNP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang PNBPNP ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
- Memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (*non-tax revenue coverage*) yaitu pnbnp agar sesuai dengan paket undang-undang di bidang keuangan negara; dan
- Mengoptimalkan pendapatan negara dari pnbnp guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Berikut beberapa produk PNBPNP yang akan diusulkan pada rancangan PP PNBPNP yang baru:

1. Penjualan publikasi cetakan tetap dimasukkan pada rancangan PP PNBPNP, hal ini dikarenakan masih menjadi salah satu potensi penerimaan PNBPNP BPS. Tarif penjualan publikasi cetakan BPS dihitung berdasarkan jumlah halaman, dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Halaman 1 (satu) sampai dengan 40 (empat puluh) dikenakan PNBPNP Rp50.000,00.
 - b. Setiap terdapat tambahan per 40 halaman berikutnya dikenakan Rp15.000,00
2. Tarif penjualan publikasi elektronik mengikuti tarif penjualan publikasi cetakan, yaitu:
 - a. Halaman 1 (satu) sampai dengan 40 (empat puluh) dikenakan PNBPNP Rp50.000,00.
 - b. Setiap terdapat tambahan per 40 halaman berikutnya dikenakan Rp15.000,00
3. Penjualan data mikro terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau tarif minimum diusulkan sejumlah Rp50.000,00, sedangkan biaya variabel di usulkan menjadi dua skema tarif, yaitu:
 - a. Tarif data mikro sampai dengan 150 MB dikenakan Rp100,00 (Per 1000 byte)
 - b. Setiap terdapat tambahan per 1000 byte diatas 150 MB dikenakan Rp10.00 (Per 1000 byte)
4. Terdapat kesamaan jumlah provinsi dan kab/kota pada peta digital produk BPS dan BIG sehingga untuk permintaan data pada level tersebut dapat diarahkan ke BIG sebagai walidata data geospasial. Adapun Penjualan peta digital wilkerstat BPS hanya disajikan pada tingkat kecamatan dan desa dalam ruang lingkup statistik. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penjualan peta digital wilkertat disertai dengan penjualan data mikro yang sesuai. Tarif penjualan peta digital diusulkan sebagai berikut:
 - a. Peta Indonesia per desa/kelurahan dikenakan PNBPNP sebesar Rp50.0000.000,00 (per peta)
 - b. Peta Indonesia per kecamatan dikenakan PNBPNP sebesar Rp15.0000.000,00 (per peta)
 - c. Peta Kab/Kota per kecamatan dikenakan PNBPNP sesbesar Rp50.000,00 (per peta)

- d. Peta Kab/Kota per desa/kelurahan dikenakan PNBP sebesar Rp100.000,00 (per peta)
5. Datalab dapat diartikan sebagai sebuah solusi media analisis untuk pengguna mahir yang ingin melakukan analisis kompleks secara real-time dengan menggunakan mikrodata yang detail. Tarif yang diusulkan pada akses datalab meliputi unsur-unsur berikut :
- Biaya dataset dikenakan tarif sebesar 10% dari harga data mikro fullset yang diakses
 - Biaya akses datalab dikenakan tarif Rp500.000,00 per jam.
 - Biaya layanan (termasuk pengecekan proposal dan pengecekan output datalab) dikenakan tarif sebesar 1% dari harga data mikro fullset pada setiap satu transaksi.

9.21 Melakukan Kajian Datalab

Seiring berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang inovasi, maka tuntutan akan pemenuhan data dalam bentuk tabulasi juga semakin meningkat, hal ini mendorong BPS dalam memberikan layanan akses datalab kepada pengguna data sehingga kebutuhan akan pemenuhan tabulasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara presisi dapat diberikan.

Datalab dapat diartikan sebagai sebuah solusi media analisis untuk pengguna mahir yang ingin melakukan analisis kompleks secara real-time dengan menggunakan mikrodata yang detail. Beberapa NSO telah menerapkan mekanisme datalab. Berikut terdapat perbandingan kriteria pada tarif biaya datalab beberapa negara:

Perbandingan Kriteria Aspek Biaya Pengaksesan Datalab antar-NSO

Aspek	Australia (ABS)	Denmark (DST)	Belanda (CBS)	Finlandia (STAT-FI)	Selandia Baru (STATS-NZ)	Kanada (STATCAN)	Inggris (ONS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengategorian berdasarkan jenis pengguna (mahasiswa, pemerintah, swasta dsb.)	V	X	V	X	V	V	V
Pengizinan akses untuk tujuan komersil	V	V	V	V	X	V	V
Dasar penentuan biaya pokok	proyek	jam	proyek	jam	proyek	proyek	proyek
Jangka waktu akses yang diberikan di awal (jika per proyek)	tentatif, sesuai proposal	-	1 bulan	-	15 jam	200 jam	
Keringanan biaya untuk mahasiswa/akademisi	V (gratis, ABS/UA agreement)	-	V (reimburse hingga 50%, ODISSEI participant)	-	-	V (gratis, CRDCN partner universities)	V (gratis, not-for-profit research)
Keringanan biaya untuk pemerintah	V (keringanan biaya)	-	V (reimburse hingga 50%, ODISSEI participant)	-	V (keringanan, gratis biaya penilaian proposal)	V (keringanan, biaya berdasarkan proposal)	V (gratis)

Tabel diatas menggambarkan perbandingan kriteria aspek biaya untuk pengaksesan data mikro pada secure-environment-system (datalab) di 7 NSO yang telah menerapkan 5 Safe Framework pada sistem penyediaan data mikro yang dimiliki. Sebagian besar NSO melakukan pengkategorian terhadap calon pengguna datalab. Hampir semua NSO memperbolehkan pengaksesan data untuk tujuan komersil misalkan analisis peluang bisnis, tentunya penelitian tersebut harus tetap menerapkan prinsip dan prosedur 5S melalui datalab. Biasanya, penentuan biaya pokok pengaksesan datalab dilakukan per proyek, dengan jangka waktu awal dan dapat diperpanjang dengan tambahan biaya tertentu. Sebagian NSO memberikan keringanan bahkan menggratiskan biaya akses datalab untuk akademisi dan pemerintah dengan kriteria tertentu. Diluar biaya pokok, masih terdapat biaya-biaya lainnya tergantung dengan NSO yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan rincian biaya pengaksesan datalab untuk setiap NSO.

1. ABS (Australia)

ABS memiliki dua skema berbeda untuk biaya akses datalab. Skema biaya yang berlaku sekarang hanya akan diimplementasikan hingga 31 Desember 2021, selanjutnya mulai 1 Januari 2022 akan berlaku skema baru. Rincian biaya untuk setiap skema dijelaskan pada Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 berikut ini.

**Tabel Skema Biaya Akses Datalab
(periode sekarang hingga 31 Desember 2021)**

A. Biaya Standar Akses <i>Datalab</i>			
Tipe Pengguna	Registrasi Pengguna <ul style="list-style-type: none"> • Satu biaya per orang • Berlaku untuk pengguna baru 	Pengaturan Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Satu biaya per proyek • Dibayarkan ketika proyek disetujui • Berlaku untuk proyek baru (atau fase baru proyek yang sudah ada) yang memerlukan tinjauan dan persetujuan proyek dari ABS 	Penggunaan Aktif <ul style="list-style-type: none"> • Biaya per proyek • Penggunaan aktif tidak termasuk peneliti yang disetujui untuk proyek sebagai pembahas yang tidak memiliki akun DataLab • Berlaku untuk proyek DataLab yang ada dan baru • Biaya setengah tahun keuangan menunggu pengaturan baru dimulai 1 Jan 2022

Pemerintah (Persemakmuran, Negara Bagian dan Wilayah, Lokal) (GST tidak berlaku)	\$750	\$2.500	\$1.300 untuk proyek dengan 1-5 pengguna; \$2.600 untuk proyek dengan 6-20 pengguna; \$5.000 untuk proyek dengan 20+ pengguna
Peneliti non-pemerintah yang disetujui (termasuk lembaga penelitian kebijakan publik dan akademisi yang tidak tercakup dalam Perjanjian ABS/Universities Australia)	\$825	\$2.750	\$1.430 untuk proyek dengan 1-5 pengguna; \$2.860 untuk proyek dengan 6-20 pengguna; \$5.500 untuk proyek dengan 20+ pengguna
Akademisi yang mengerjakan proyek akademik di perguruan tinggi yang tercakup dalam Perjanjian ABS/Universities Australia (UA)	Tercakup dalam Perjanjian ABS/UA	Tercakup dalam Perjanjian ABS/UA	Tercakup dalam Perjanjian ABS/UA
Data kustodian MADIP/BLADE	n/a	n/a	n/a

B. Biaya Non-standar Akses Datalab		
Aspek	Tidak termasuk GST	Termasuk GST
Mesin di atas biaya ukuran mesin i v rtual <ul style="list-style-type: none"> Biaya per orang per proyek 	Kutipan diberikan berdasarkan kasus per kasus tergantung pada persyaratan proyek	Kutipan diberikan berdasarkan kasus per kasus tergantung pada persyaratan proyek
Penyimpanan proyek di atas 1 TB: <ul style="list-style-type: none"> Biaya tahunan untuk setiap TB tambahan per proyek Biaya setengah tahun keuangan, menunggu pengaturan baru yang dimulai 1 Jan 2022 	\$150	\$160

**Tabel Skema Biaya Akses Datalab
(1 Januari hingga 30 Juni 2022)**

A. Biaya Standar Akses Datalab	
Tipe Pengguna	Biaya Standar (per proyek baru) Termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan proyek Lima pengguna DataLab pertama Mesin virtual standar perangkat lunak standar (misalnya R, Python, Stata) Penyimpanan proyek hingga 1 TB
Pemerintah (Persemakmuran, Negara Bagian dan Wilayah, Lokal) (GST tidak berlaku)	\$4.300
Peneliti non-pemerintah yang disetujui (termasuk lembaga penelitian kebijakan publik dan akademisi yang tidak tercakup dalam Perjanjian ABS/Universities Australia)	\$4.730

Akademisi yang mengerjakan proyek akademik di perguruan tinggi yang tercakup dalam Perjanjian ABS/Universities Australia (UA)	Tercakup dalam Perjanjian ABS/UA	
Data kustodian MADIP/BLADE	n/a	
B. Biaya Non-standar Akses Datalab		
Aspek	Tidak termasuk GST	Termasuk GST
Penambahan pengguna DataLab atau pembahas <ul style="list-style-type: none"> • Biaya satu kali per orang per proyek • Biaya dikenakan jika total peneliti dan pembahas melebihi lima orang per proyek 	\$600	\$660
Perubahan yang memerlukan persetujuan ulang kustodian <ul style="list-style-type: none"> • Biaya per perubahan per proyek • Biaya setengah tahun keuangan, menunggu tinjauan tahunan <ul style="list-style-type: none"> • contoh: data, lingkup proyek, atau organisasi mitra berubah untuk proyek yang melibatkan mikrodata terintegrasi 	\$600	\$660
Penggunaan SAS <ul style="list-style-type: none"> • Biaya per orang per proyek • Biaya setengah tahun keuangan, menunggu tinjauan tahunan • Biaya berkontribusi terhadap kumpulan biaya lisensi 	\$450	\$495
Mesin lebih besar dari ukuran mesin virtual <ul style="list-style-type: none"> • Biaya per orang per proyek • Biaya setengah tahun keuangan, menunggu tinjauan tahunan 	\$3.250 (minimum)	\$3.575 (minimum)
Penyimpanan proyek di atas 1 TB <ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk setiap TB tambahan per proyek • Biaya setengah tahun keuangan, menunggu tinjauan tahunan 	\$150	\$165

2. DST (Denmark)

Harga akan ditentukan berdasarkan protokol ekstraksi data. Biaya yang dikenakan dihitung per jam yaitu sebesar DKK 1.150.00 (EURO ~155) per jam untuk ekstraksi data dan layanan konsultasi. Terdapat biaya tambahan untuk tambahan disk penyimpanan dalam proyek skala besar. Terdapat pula biaya log-on untuk akses oleh perusahaan swasta. Setelah

semua biaya proyek dikalkulasi, kontrak akan dikirimkan ke pengguna dengan isi yang menyatakan harga dan ekspektasi waktu siap dimulainya proyek (setelah penyiapan data dan sistem selesai).

3. CBS (Belanda)

Biaya akses mikro data pada CBS dibagi menjadi empat yaitu biaya sebelum proyek, biaya ketika proyek dimulai, biaya selama proyek berjalan, dan biaya setelah proyek. Rincian biaya tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel Rincian Biaya untuk Akses Data Mikro di CBS

Aspek (1)	Biaya (2)
Layanan sebelum proyek dimulai	
Bantuan dengan permintaan otorisasi institusional	gratis
Memberikan informasi tentang kumpulan data yang tersedia	gratis
Studi kelayakan kumpulan data yang tersedia	kustom
Layanan selama proyek dimulai	
Memulai proyek penelitian baru	
• Biaya dasar awal	€ 1800
• Biaya per topik set data	€ 180
Akses OSSC (per peneliti)	€ 250
Otorisasi peneliti atau pengamat baru	
• Otorisasi peneliti baru	€ 375
• Otorisasi penonton baru dengan hak hanya-baca (tidak ada token yang dimiliki)	€ 375
• Otorisasi penonton baru dengan hak hanya baca (sudah memiliki token)	€ 200
• Otorisasi penonton baru tanpa hak hanya baca	gratis
• Token baru jika hilang	€ 150
• Membuat pernyataan kerahasiaan	gratis
Mengimpor mikrodata Anda sendiri	
• Enkripsi sederhana	€ 250
• Enkripsi normal	€ 675
• Enkripsi kompleks	€ 1300
Mengkompilasi <i>dataset</i> penelitian	kustom
Penggunaan perangkat lunak tambahan yang tersedia (per bulan)	
• Penggunaan perangkat lunak tambahan SAS	€ 560
• Penggunaan perangkat lunak tambahan Ox	€ 50
• Penggunaan perangkat lunak tambahan Gauss	€ 60
• Penggunaan perangkat lunak tambahan MLWin	€ 40

Aspek (1)	Biaya (2)
Penggunaan perangkat lunak tambahan yang tidak tersedia	kustom
Layanan selama proyek penelitian yang sedang berlangsung	
Dukungan selama proyek penelitian yang sedang berlangsung (per bulan)	
• Biaya dukungan per topik dataset	€ 18
• Biaya dukungan per peneliti	€ 105
Pengecekan output (per output)	
• Output normal	€ 230
• Output kecil/ringan	€ 115
• Dekripsi dari output terenskripsi	€ 250
Menambahkan atau menarik peneliti dari proyek	gratis
Menambahkan set data ke proyek penelitian	
• Penambahan topik set data baru (per topik)	€ 180
• Tambahan lainnya	gratis
Menjawab pertanyaan ekstensif	kustom
Kapasitas penyimpanan ekstra (per 50 Gb per bulan)	€ 25
Mentransfer file data dari proyek penelitian lain	gratis
Mentransfer kumpulan data katalog yang dikonversi	gratis
Memindahkan proyek penelitian	€ 500
Perpanjangan proyek penelitian	
• Standar	€ 25
• Prosedur administrasi non-standar	€ 100
Membekukan proyek penelitian untuk sementara (per bulan)	€ 80
Menutup proyek penelitian	gratis
Layanan setelah proyek selesai	
Menyimpan arsip proyek besar (per GB ekstra)	€ 50
Perpanjangan periode arsip proyek (per GB)	€ 50
Membuka kembali proyek penelitian yang telah tertutup	€ 750

4. STAT-FI (Finlandia)

Biaya akses datalab di STAT-FI dibagi menjadi tiga bagian yaitu biaya layanan, biaya dataset, serta biaya akses jarak jauh, dengan perincian sebagai berikut:

1. Layanan

Penyusunan dan pengeditan data penelitian dihargai dengan tarif per jam sesuai dengan jumlah jam kerja. Biaya TI yang terkait dengan penugasan ditambahkan ke biaya tenaga kerja. Rincian biaya layanan terdapat pada Tabel berikut ini.

Tabel Biaya Layanan untuk Akses Data Mikro di STAT-FI

Layanan (1)	Biaya (2)
Lisensi pengguna termasuk satu jam pekerjaan persiapan.	
<ul style="list-style-type: none"> Biaya pemrosesan aplikasi akan ditagih terlepas dari apakah aplikasi disetujui atau tidak Aplikasi yang dibatalkan atau tidak selesai setelah penanganannya dimulai, ditagih sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan 	EUR 500
Biaya per jam kerja	EUR 105 per jam
Perluasan/kelanjutan lisensi pengguna	EUR 500
Pembagian faktur ke beberapa organisasi	EUR 105
Menyewa workstation pada laboratorium riset	EUR 70 per hari
Membuka kembali akses jarak jauh untuk proyek penelitian setelah penutupan	EUR 350

2. Dataset

Harga set data yang sudah jadi didasarkan pada pemeliharaan data dan jumlah pekerjaan layanan pelanggan yang terkait dengan dataset. Setiap dataset diberi kode direktori tertentu dan biaya satu set data bervariasi mulai dari EUR 150 hingga EUR 500. Sebagai contoh, data EDUC students dengan direktori EDUC_OPISK memiliki biaya akses EUR 300. Selanjutnya terdapat biaya khusus untuk pengaksesan hasil mikrosimulasi pada set data, yang akan dirincikan pada Tabel berikut ini.

Tabel Biaya Mikrosimulasi Set Data untuk Akses Mikro Data di STAT-FI

Set Data (1)	Biaya (2)
Dataset register SISU, sampel 15 persen untuk setiap tahun set data	Biaya mesin virtual akses jarak jauh
Dataset register SISU, sampel terpisah	EUR 1.000 per tahun set data
Versi mikrosimulasi set data layanan distribusi pendapatan	EUR 4.120 per tahun data; dengan perjanjian terpisah saat meminta file data untuk beberapa tahun set data
Versi mikrosimulasi dataset layanan Survei Anggaran Rumah Tangga	2012 (kedua versi): EUR 3.900; kumpulan data 2016: EUR 3.900; semua set data: EUR 5.175

3. Akses Jarak Jauh

Biaya penggunaan khusus proyek penelitian dibayar untuk penggunaan akses jarak jauh termasuk biaya penggunaan untuk penggunaan akses jarak jauh dan biaya pembukaan dan pemeliharaan. Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Proyek penelitian memilih mesin virtual yang cocok untuk digunakan, dengan rincian seperti Tabel di bawah ini.

**Tabel Biaya Akses Jarak Jauh per Jenis Mesin Virtual
untuk Akses Data Mikro di STAT-FI**

Mesin Virtual (1)	Biaya (2)
S (8 GB RAM, 4 core)	EUR 2.250 per tahun
M (16 GB RAM, 6 core)	EUR 2.750 per tahun
L (32 GB RAM, 8 core)	EUR 3.500 per tahun
XL (64 GB RAM, 8 core)	EUR 4.800 per tahun

Biaya akses jarak jauh ditagih dua kali setahun, periode faktur adalah enam bulan: penggunaan antara Januari dan Juni dibebankan pada Juni dan penggunaan antara Juli dan Desember dibebankan pada Desember. Jika mesin virtual berubah selama periode faktur, biaya penggunaan adalah untuk mesin virtual terbesar yang digunakan.

Panjang minimum untuk faktur adalah satu periode faktur (Januari hingga Juni/Juli hingga Desember). Oleh karena itu, biaya minimum adalah bagian enam bulan dari biaya tahunan. Jika penggunaan akses jarak jauh dimulai atau berakhir di tengah periode faktur, biaya akan ditetapkan secara proporsional ke tingkat bulanan sesuai dengan waktu mulai dan berakhir asalkan penggunaan berlanjut setidaknya selama satu periode faktur penuh.

Jumlah ruang disk yang terbatas disediakan untuk setiap proyek penelitian, ruang disk tambahan dibebankan secara terpisah. Harga untuk ruang tambahan adalah EUR 120 per 200 GB setahun. Harga sudah termasuk biaya pembukaan untuk tahun pertama. Biaya data ditagihkan sesuai dengan daftar harga data penelitian.

5. **STATS-NZ (Selandia Baru)**

- Menilai dan menyetujui pendaftaran: \$500 +GST (biaya dibebaskan untuk pemerintah, tidak ada biaya untuk yang gagal/ditolak).
- Pemeriksaan kerahasiaan: \$155 +GST per jam per proyek (15 jam pertama gratis).
- Penyimpanan: batas 200GB. Lebih dari batas, ada tambahan biaya \$1,50 +GST per GB per bulan.

6. **STATCAN (Kanada)**

Pengguna dari kalangan akademisi dibagi menjadi dua yaitu pengguna primer dan pengguna sekunder, yaitu:

1. Pengguna primer dan internal RDC (Remote Data Access) tidak dikenakan biaya akses, yaitu termasuk peneliti berbasis perguruan tinggi yang: 1. dipekerjakan oleh atau mahasiswa di perguruan tinggi mitra CRDCN / Canadian Research Data Centre Network's (dan/atau yang proyeknya didanai langsung oleh lembaga yang memberikan dukungan keuangan inti untuk operasi berkelanjutan CRDCN); dan 2. mahasiswa yang melakukan penelitian mandiri.

2. Kemitraan antara CRDCN dan Statistics Canada juga menyediakan akses biaya-untuk-layanan yang disetujui ke dan penggunaan fasilitas dan data oleh tiga kategori pengguna sekunder.

- Kategori A

Semua peneliti berbasis perguruan tinggi (tidak termasuk mahasiswa) yang melakukan penelitian mandiri tetapi: 1. yang tidak dipekerjakan oleh perguruan tinggi mitra CRDCN; atau 2. yang bukan profesor emeriti dari perguruan tinggi mitra CRDCN; atau 3. yang proyeknya tidak didanai secara langsung oleh lembaga yang memberikan dukungan keuangan inti untuk operasi berkelanjutan CRDCN. Semua proyek penelitian kategori A dikenai biaya akses berikut: \$6.250 (ditambah pajak yang berlaku) untuk 200 jam pertama akses di RDC. Akses dapat dibagi oleh dua atau lebih peneliti. Untuk proyek yang membutuhkan akses lebih dari 200 jam, akses tambahan dapat dibeli dalam blok 100 jam dengan harga \$3.250 per blok waktu tambahan yang dibeli. Untuk proyek yang membutuhkan lebih dari 25 file data, biaya untuk setiap file data tambahan adalah \$700 per file.

- Kategori B

Para peneliti yang bekerja untuk pemerintah atau sektor amal dan nirlaba termasuk peneliti berbasis perguruan tinggi, profesor emeriti dan mahasiswa yang melakukan pekerjaan terarah atau fee-for-service (kontrak) untuk sektor-sektor ini. Semua proyek penelitian kategori B di RDC perguruan tinggi dikenakan biaya akses berikut: \$6.250 (ditambah pajak yang berlaku) untuk 200 jam pertama akses di RDC. Akses dapat dibagi oleh dua atau lebih peneliti. Untuk proyek yang membutuhkan akses lebih dari 200 jam, akses tambahan dapat dibeli dalam blok 100 jam dengan harga \$3.250 per blok waktu tambahan yang dibeli. Untuk proyek yang membutuhkan lebih dari 25 file data, biaya setiap file data tambahan adalah \$700 per file.

- Kategori C

Semua peneliti yang bekerja untuk sektor swasta termasuk asosiasi industri, peneliti berbasis perguruan tinggi, profesor emeriti dan mahasiswa yang melakukan pekerjaan terarah atau fee-for-service (kontrak) untuk sektor swasta. Semua proyek penelitian kategori C dikenakan biaya akses berikut: \$9.500 (ditambah pajak yang berlaku) untuk akses 200 jam pertama selain \$3.875 (ditambah pajak yang berlaku) untuk setiap file data yang diminta. Akses dapat dibagi oleh dua atau lebih peneliti. Untuk proyek yang membutuhkan akses lebih dari 200 jam, akses tambahan dapat dibeli dalam blok 100 jam dengan harga \$4.750 per blok waktu tambahan yang dibeli. Suplemen Kategori C Suplemen 25% akan berlaku untuk biaya layanan bagi pengguna kategori C sebagai pengakuan bahwa sektor swasta tidak berkontribusi pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dan pengembangan data jaringan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pemerintah dan sektor perguruan tinggi.

- Suplemen SAS Biaya tambahan 10% akan dinilai dan dikirimkan ke SAS untuk semua proyek yang memerlukan penggunaan SAS dan yang melibatkan peneliti dalam kategori B atau C di atas.

- Catatan: Ketika salah satu anggota tim peneliti yang akan mengakses RDC dianggap sebagai peneliti kategori A, B, atau C, seluruh proyek dikenakan biaya akses meskipun semua anggota tim peneliti lainnya adalah pengguna utama.

Pengaksesan oleh pemerintah:

Selanjutnya, untuk peneliti pemerintah, biaya ditentukan pada saat pengajuan proposal berdasarkan kebutuhan akses tim peneliti, organisasi pengakses, dan lokasi akses.

6. ONS (Inggris)

Gratis untuk proyek non-komersial, Proyek non-komersial adalah proyek dengan pendapatan tidak dihasilkan secara langsung dari penggunaan data dan/atau ada barang publik yang dihasilkan darinya. Hal tersebut termasuk penelitian akademis dan kebijakan nirlaba, proyek yang dilakukan untuk badan publik nirlaba oleh organisasi komersial, organisasi komersial yang menggunakan data untuk tujuan penelitian internal, dan penggunaan data untuk proyek mahasiswa, seperti disertasi sarjana atau presentasi kelompok. Tidak termasuk penelitian yang menghasilkan produk yang memerlukan pembayaran, seperti produk berlangganan atau penggunaan data dalam pengaturan kelas. Penggunaan data secara komersial tunduk pada lisensi dan dikenakan biaya administrasi sebesar £450 per proyek, ditambah £50 per kumpulan data yang ditambahkan ke proyek tersebut, ditambah PPN. ONS tidak menjual data dan hak cipta tetap pada pemilik data. Data dan analisis hanya dapat dilakukan melalui secure-environment-system dan tetap dilakukan prosedur 5S framework, termasuk pengecekan output analisis.

Simulasi Tarif Datalab

Skema tarif akses datalab dibagi menjadi 3 jenis biaya, yaitu biaya dataset/aset, biaya akses, dan biaya layanan. Biaya dataset dibebankan sesuai jenis dan jumlah dataset yang dipilih, yaitu berupa persentase tertentu dari biaya pembelian datamikro. Biaya akses dibebankan berdasarkan jangka waktu akses yang dipilih, yaitu biaya per jam. Biaya layanan dibayarkan untuk pemeriksaan abstraksi dan pengecekan output, yaitu persentase tertentu dari biaya pembelian datamikro.

Simulasi tarif datalab sebagai alternatif pilihan dalam penyusunan rumus perhitungan tarif datalab dalam rancangan PP PNBPN Terbaru terbagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Pengaksesan Datalab (dataset dan waktu akses tertentu):
 - Biaya Dataset/Aset = 5%*tarif data mikro terpilih
 - Biaya Akses = Rp 400.000,00/jam
 - Biaya Layanan = 2%*tarif data mikro terpilih
2. Pengaksesan Datalab (dataset dan waktu akses tertentu):
 - Biaya Dataset/Aset = 10%*tarif data mikro terpilih
 - Biaya Akses = Rp 400.000,00/jam
 - Biaya Layanan = 2%*tarif data mikro terpilih
3. Pengaksesan Datalab (dataset dan waktu akses tertentu):
 - Biaya Dataset/Aset = 10%*tarif data mikro terpilih
 - Biaya Akses = Rp 500.000,00/jam
 - Biaya Layanan = 1%*tarif data mikro terpilih

4. Pengaksesan Datalab (dataset dan waktu akses tertentu):
 - Biaya Dataset/Aset = 15%*tarif data mikro terpilih
 - Biaya Akses = Rp 500.000,00/jam
 - Biaya Layanan = 1%*tarif data mikro terpilih
5. Pengaksesan Datalab (dataset dan waktu akses tertentu):
 - Biaya Dataset/Aset = 20%*tarif data mikro terpilih
 - Biaya Akses = Rp 400.000,00/jam
 - Biaya Layanan = 2%*tarif data mikro terpilih

9.22 Sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata kepada Kementerian/Lembaga

Latar Belakang

Dewasa ini, data semakin memiliki peranan penting dalam berbagai aktivitas kehidupan. Data dapat berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan sekaligus berfungsi sebagai penentu arah kebijakan. Bahkan data telah dianggap sebagai salah satu aset penting yang setara dengan aset modal dan aset sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun untuk individu, data dapat digunakan sebagai rujukan dalam pendidikan dan penelitian.

Untuk mendukung sistem pelayanan data yang akuntabel, dimana setiap transaksi akan terdokumentasikan termasuk seluruh komunikasi serta riwayat transaksi konsumen maka dibangun sebuah Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik). Silastik merupakan sistem informasi yang membantu komunikasi antara pengguna data dan operator BPS dalam melakukan transaksi pembelian atau konsultasi data. Melalui silastik kepastian waktu pelayanan dapat dipantau secara real time oleh pengguna data sehingga proses dan penyelesaian permintaan data dapat terukur waktu (measurable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Silastik merupakan aplikasi pelayanan data dan informasi statistik yang terintegrasi dengan sistem lain di BPS, diantaranya :

- Repository publikasi (portalpublikasi.bps.go.id)
- Repository katalog data mikro (microdata.bps.go.id)
- Website BPS (webapi.bps.go.id).

Pada proses integrasi dengan website BPS akan diterapkan teknik login terpusat, dimana sistem yang berbeda dapat terintegrasi dalam satu account user yang valid.

Ada 3 (tiga) layanan (moda) pada Silastik yaitu :

1. Moda Berbayar

Layanan pada moda berbayar adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Terdapat beberapa produk yang dapat diakses melalui moda berbayar ini, yaitu:

1. Penjualan Publikasi Elektronik;
2. Penjualan Data Mikro;
3. Penjualan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik

2. Moda Nol Rupiah

Layanan pada moda nol rupiah didasarkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Tarif Rp.0, 00 Terhadap Pihak Tertentu Atas PNBPN yang Berlaku Pada BPS.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/softcopy, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas:

1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Institusi Pendidikan Dalam Negeri
3. Lembaga Negara
4. Perwakilan Negara Asing
5. Lembaga Internasional

3. Moda Internal

Layanan pada moda internal digunakan untuk pengajuan permohonan data dari unit kerja BPS, mahasiswa Tugas Belajar BPS dan mahasiswa Politeknik Statistik STIS. Jumlah permintaan nol rupiah pada tahun 2018 sebanyak 91 permintaan, tahun 2019 sebanyak 106 permintaan, tahun 2020 sebanyak 144 permintaan dan sampai dengan bulan September 2021 tercatat sebanyak 133 permintaan. Berdasarkan pencatatan transaksi pada silastik tersebut, jumlah permohonan nol rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah permohonan nol rupiah sehingga diperlukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan nol rupiah. Selain terkait Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019, sosialisasi juga terkait mekanisme bagaimana pengajuan nol rupiah melalui silastik, karena pengajuan saat ini masih dilakukan melalui email.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara fullboard pada tanggal 28 – 30 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh walidata Kementerian/Lembaga terkait yang tercatat pernah mengajukan permohonan nol rupiah kepada BPS. Kegiatan ini membahas mengenai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Tarif Rp.0, 00 Terhadap Pihak Tertentu Atas PNBPN yang Berlaku Pada BPS dan juga untuk memberikan pemahaman tentang aplikasi transdata kepada Kementerian/Lembaga yang sudah ada perjanjian kerjasama dengan BPS.

Tujuan

Tujuan kegiatan sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata Kepada Kementerian/Lembaga ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah terkait mekanisme layanan nol rupiah dan transdata;
- Memberikan penjelasan mengenai tata cara pengajuan nol rupiah melalui aplikasi silastik;
- Memberikan penjelasan mengenai tata cara persetujuan, unduh dan unggah data melalui aplikasi transdata;

Jadwal Kegiatan

Guna mendapatkan hasil yang maksimal maka pelaksanaan kegiatan fullboard meeting ini dilaksanakan selama tiga hari pada:

- Hari/tanggal : Kamis – Sabtu/ 28 – 30 Oktober 2021
- Jam : 08.00 – 21.00 WIB
- Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 18-20, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk kegiatan dalam kelas kegiatan sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata Kepada Kementerian/Lembaga yang diikuti semua peserta berdasarkan kelas kegiatannya.

Pada kelas sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata Kepada Kementerian/Lembaga dilakukan pemaparan mengenai :

1. Pembahasan Mekanisme Diseminasi Data dan Informasi Statistik
2. Pembahasan Perban 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Tarif Rp.0, 00 Terhadap Pihak Tertentu Atas PNPB yang Berlaku Pada BPS
3. Pembahasan Layanan Nol Rupiah pada Sistem Informasi Statistik (Silastik)
4. Pembahasan Uji coba pengajuan permohonan nol rupiah pada Silastik
5. Pembahasan Evaluasi permohonan nol rupiah pada Pelayanan Statistik Terpadu
6. Pembahasan Mekanisme Kerjasama dengan BPS
7. Pembahasan Mengenai Aplikasi Transdata
8. Pembahasan Uji Coba transdata dari sisi Kementerian/Lembaga
9. Pembahasan Uji Coba transdata dari sisi Subject Matter BPS
10. Pembahasan Surat Perjanjian Penggunaan Data pada layanan datamikro dan peta digital wilayah kerja statistik
11. Pembahasan Mekanisme input lampiran Perjanjian Kerjasama pada Transdata
12. Pembahasan Evaluasi aplikasi silastik nol rupiah
13. Pembahasan Pengembangan aplikasi silastik dan transdata

Peserta Kegiatan

Peserta Fullboard sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata Kepada Kementerian/Lembaga berjumlah 134 orang, yang terdiri dari 37 peserta dari Kementerian/Lembaga dan 97 peserta dari Badan Pusat Statistik.



Sosialisasi Nol Rupiah dan Transdata Kepada Kementerian/Lembaga

Lampiran 10 Laporan Kegiatan Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik

10.1 Pengembangan Layanan Perpustakaan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Layanan perpustakaan mulai berbasis teknologi informasi pada tahun 2017 menggunakan aplikasi PST versi desktop. Tahun 2011, aplikasi dikembangkan menjadi PST-Online. Tahun 2020, seluruh layanan online BPS diintegrasikan pada pst.bps.go.id, sehingga aplikasi PST-Online disesuaikan penamaannya menjadi aplikasi perpustakaan (perpustakaan.bps.go.id). Sejak tahun 2017, layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi sudah diimplementasikan pada PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Aplikasi perpustakaan terdiri dari buku tamu, pencarian pustaka, backend, dan katalog pustaka.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, mendorong perpustakaan BPS untuk melakukan penyesuaian layanan dengan mengalihkan seluruh layanan secara online, melalui penyediaan koleksi pustaka dalam format softcopy pada aplikasi perpustakaan. Tahun 2021, masih di masa pandemi Covid-19, layanan perpustakaan melakukan pengembangan sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan permintaan softcopy untuk koleksi pustaka yang dibutuhkan pengguna namun hanya tersedia dalam format hardcopy (tercetak).
- b. Mengembangkan penyelenggaraan survei kepuasan pengguna terhadap kualitas data BPS dan layanan perpustakaan setelah selesai mengakses aplikasi perpustakaan.

10.2 Pemeliharaan dan Reproduksi Koleksi Perpustakaan

Kegiatan pemeliharaan dan reproduksi koleksi pustaka menjadi kegiatan rutin di perpustakaan BPS. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan menjaga kebersihan ruangan, lemari, rak, dan buku agar bebas dari debu; membuat tata tertib pengunjung yang memuat larangan merokok, makan, dan minum di perpustakaan; merawat dan memperbaiki pustaka; dan fumigasi secara berkala. Kegiatan reproduksi koleksi dilakukan perubahan tata kelola pada tahun 2021, yaitu dari reproduksi berdasarkan data koleksi pustaka yang banyak diakses pengguna menjadi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui mekanisme layanan permintaan *softcopy*. Koleksi pustaka pada perpustakaan BPS ada sebanyak 203.086 judul terdiri dari 57.073 judul dalam format *hardcopy*, 76.266 judul dalam format *softcopy*, dan 99.770 judul dalam format *softcopy* dan *hardcopy*.

10.3 Sensus Koleksi Pustaka sebagai Aset Barang Milik Negara

Sensus Barang Milik Negara (BMN) merupakan kegiatan rutin setiap tahun di setiap instansi pemerintah. Sensus BMN di perpustakaan BPS secara spesifik dilakukan terhadap koleksi pustaka sebagai aset BMN. Kegiatan sensus BMN dilakukan menggunakan aplikasi SIMAN Mobile dengan tahapan sebagai berikut persiapan, pelaksanaan dan pelaporan inventarisasi. Petugas sensus pustaka melibatkan pegawai di Direktorat Diseminasi Statistik, Biro Umum, magang siswa SMA/SMK dan mahasiswa. Pustaka yang disensus pada tahun 2021 ada sebanyak 119.106 pustaka. Kondisi pandemi COVID-19 dengan mekanisme sistem kerja WFH/WFO menjadi kendala penyelesaian sensus pustaka sesuai target waktu. Penyelesaian

sensus pustaka hingga akhir tahun 2021 mencapai 64,58 persen, penyelesaian 100 persen ditargetkan pada Januari 2022.

10.4 Relayouting Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS

Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Reformasi birokrasi perlu melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*).

Fokus utama dalam penataan ulang proses birokrasi berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, setidaknya ada tiga upaya yang perlu dilakukan, Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana fisik dalam pemberian pelayanan, serta mengintegrasikan layanan publik secara terpadu dalam format layanan satu pintu maupun Mal Pelayanan Publik (MPP). Kedua, meningkatkan kualitas ASN sebagai pelaksana pelayanan publik, melalui program peningkatan kapasitas ASN berkaitan dengan *service excellence*. Ketiga, mengubah mindset dari ASN yang bertugas memberikan pelayanan, mendorong ASN untuk mengembangkan pola pikir yang *out of the box* dengan pendekatan baru yang inovatif melalui gerakan *One Agency One Innovation*.

Upaya BPS untuk point pertama di atas, telah diwujudkan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan merilis Wajah Baru Pelayanan Statistik Terpadu BPS dimana mengintegrasikan layanan offline terpadu satu pintu di gedung 2 lantai 1. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan menyediakan kelengkapan sarana prasarana yang lebih modern sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan BPS, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Respon/feedback pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan di instansi pemerintah, digunakan oleh Kementerian PANRB untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah termasuk BPS, melalui Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB).

Berdasarkan analisis tersebut maka unit PST BPS memandang perlu untuk menindaklanjuti point pertama di atas dengan menyediakan pembiayaan yang memadai pada tahun 2021 agar dapat meningkatkan prestasi BPS pada evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB. Hal ini sangat penting dalam mendorong kenaikan nilai BPS pada evaluasi tersebut, karena akan berdampak besar pada kenaikan tunjangan kinerja BPS.

10.5 Perubahan Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan BPS

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. PST BPS telah melaksanakan amanat tersebut sejak tahun 2014 setelah PST diresmikan pada tahun 2011. Penerapan standar pelayanan PST BPS dilakukan secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dengan tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan.

Setelah melalui tahapan tersebut, standar pelayanan pada PST BPS ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS. Penerapan standar pelayanan pada PST BPS dilakukan secara bertahap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Kepala BPS No. 78 Tahun 2020 agar bisa diimplementasikan pada PST Provinsi dan kabupaten/kota. Akhirnya ditetapkan, Peraturan Kepala BPS No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan BPS. Perubahan peraturan ini memuat ketentuan tentang Standar Pelayanan PST di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar ditetapkan melalui surat keputusan kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.

10.6 Penyelenggaraan Monitoring dan Review Standar Pelayanan PST BPS Provinsi

Standar pelayanan merupakan tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk meninjau dan menyempurnakan standar pelayanan. Selain evaluasi, standar pelayanan juga wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun. Hasil peninjauan ulang dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan. Perubahan standar pelayanan dilakukan dengan mengikuti tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Standar pelayanan pada PST BPS dilakukan evaluasi dan review secara berkala dan bertahap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sedangkan review dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Review standar pelayanan pada PST BPS Pusat dilakukan pada tahun 2020, selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS. Pada tahun 2021, *review* standar pelayanan pada PST BPS provinsi berpedoman pada Peraturan Kepala BPS No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan BPS, selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan masing-masing kepala BPS Provinsi.

10.7 Pembinaan Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Capaian kinerja PST BPS Pusat di tahun 2020 sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima di ajang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk dapat diimplementasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik pada PST BPS Pusat. Pengetahuan ini menjadi amunisi berharga untuk bisa diberikan kepada unit PST di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat memperbaiki penyelenggaraan pelayanannya sehingga bisa mengikuti ajang penilaian Kementerian PANRB tersebut.

Sharing pengetahuan ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan terhadap unit PST BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prioritas utama pembinaan tahun 2021 pada unit PST pada satker BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinominasikan sebagai unit Zona Integritas BPS, dimana hasil dari perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik sangat berdampak besar terhadap penilaian Zona Integritas.

10.8 Penyelenggaraan *Dissemination Award* kepada Penyelenggara dan Unit Pendukung kegiatan Diseminasi Statistik BPS

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Direktorat Diseminasi Statistik perlu melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada PST BPS, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi tersebut dikemas dalam bentuk kegiatan *Dissemination Statistics Award* kepada unit penyelenggara PST dan unit pendukung kegiatan Diseminasi Statistik BPS. Kegiatan ini sekaligus menjadi program pemberian reward atas upaya setiap unit secara profesional, integritas dan amanah dalam melayani pengguna data.

Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun sejak tahun 2014. Mekanisme evaluasi unit penyelenggara PST BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan metode *self enumeration* menggunakan link survei pada bulan Agustus 2021 dan dokumentasi laporan kegiatan diseminasi statistik periode Januari–Agustus 2021. Komponen evaluasi adalah penyediaan metadata sektoral dan khusus, pengelolaan publikasi statistik, pengelolaan promosi statistik dan pengelolaan perpustakaan.

10.9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Pengelolaan inovasi di internal BPS menggunakan sistem inovasi (sinova.bps.go.id) untuk menjaring inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh seluruh satker BPS selindo, untuk selanjutnya dikelola sebagai persiapan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). BPS aktif berpartisipasi pada ajang KIPP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya sejak KIPP tersebut diselenggarakan pada tahun 2014.

Mekanisme KIPP tahun 2021 ada perubahan dengan dilakukan pembatasan jumlah proposal inovasi yang diajukan oleh setiap instansi pemerintah maksimal sebanyak 10 (sepuluh) proposal. BPS mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) proposal inovasi pada tahun



2021, dari 98 proposal inovasi dalam kondisi isian lengkap yang diterima sekretariat inovasi BPS.

Pengajuan inovasi BPS mencakup 3 (tiga) kategori yaitu umum, replikasi dan khusus. Kategori khusus adalah pengajuan kembali inovasi BPS yang telah meraih TOP 45/35 pada KIPP periode sebelumnya. Inovasi BPS yang diajukan pada KIPP kategori khusus adalah Website BPS. Pada KIPP tahun 2021, BPS belum berhasil lolos seleksi baik untuk kategori umum maupun khusus.

Lampiran 11 Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK, 2021

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Kegiatan 2021											
	Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Fungsi Rujukan Statistik												
Pembinaan Statistik: Workshop metadata Kementerian/Lembaga												
Pembinaan Statistik: Evauasi penyelenggaraan Statistik sektoral												
Internalisasi pemberian rekomendasi												
Pengembangan SDM: compaling national metadata for the SDGs												
Sosialisasi perban 5 tahun 2020												
Penyusunan 4 modul												
Penyusunan draf juknis pemeriksaan data prioritas												

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Kegiatan 2021											
	Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyusunan Publikasi Statistik Indonesia 2021												
Webinar Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) 2021												
Penyusunan Publikasi Statistik Indonesia Dalam Infografis 2021												
Pelatihan Penggunaan Template Wajah Baru Berita Resmi Statistik (BRS) untuk Subject Matter Penyusun BRS di BPS Pusat dan BPS Daerah												
Pengadaan Akun Berlangganan Desain Grafis												
Workshop Penulisan Berita Resmi Statistik dalam Bahasa Inggris dengan ABS												
Peluncuran Wajah Baru Berita Resmi Statistik												
Focus Group Discussion Persiapan penyusunan Statistik Indonesia-Daerah Dalam Angka 2022												
Pelatihan Menulis Berita Resmi Sttaistik Dalam Bahasa Inggris												

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Kegiatan 2021											
	Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Layanan email bpshq												
Pemeliharaan Website SP 2020												
Evaluasi Webmaster												
Manajemen Tabel Subject Matter												
Update Aplikasi Allstats												
Tata Kelola Menu PPID												
Layanan Data dan Informasi Statistik (Konsultasi dan Pembelian Publikasi Cetakan/Publikasi Elektronik/Data Mikro/Peta Digital Wilkerstat)												
Integrasi e-sign dengan Silastik												
Perjadiin evaluasi layanan data dan informasi statistik												

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Kegiatan 2021											
	Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Proses administrasi Pokja												
Fungsi Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik												
Pengembangan Layanan Perpustakaan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST)												
Pemeliharaan dan Reproduksi Koleksi Perpustakaan												
Sensus Koleksi Pustaka sebagai Aset Barang Milik Negara												
Relayouting Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS												
Perubahan Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan BPS												

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	Kegiatan 2021											
	Trw I			Trw II			Trw III			Trw IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyelenggaraan Evaluasi dan Review Standar Pelayanan PST BPS Provinsi												
Pembinaan Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi/Kabupaten/Kota												
Penyelenggaraan Dissemination Statistics Award kepada Unit Penyelenggara dan Unit Pendukung kegiatan Diseminasi Statistik BPS												
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik												

Keterangan:

- : Rencana
- : Realisasi
- : Tidak terealisasi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id